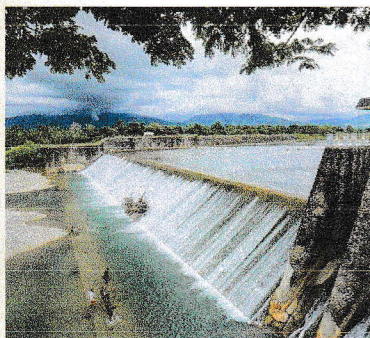
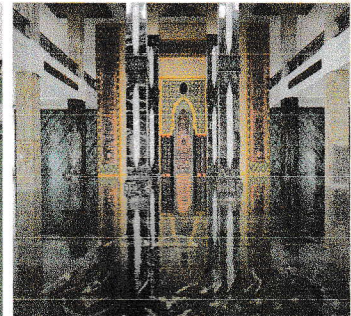
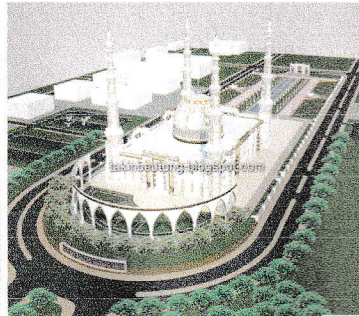




**LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga penyusunan Dokumen **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)** Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Shalawat beriring salam kepangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak, Amin YRA

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pasal 42 ayat (1) huruf h dan huruf i serta pasal 46 ayat (2), dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 69 ayat (1) bahwa salah satu tugas dan kewenangan Bupati/Walikota adalah memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah melalui Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah. Untuk itu LPPD tahun 2021 ini disusun sebagai kewajiban kami melaporkan berbagai urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Nagan Raya selama tahun 2021 yang lalu.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagan Raya pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) belum memenuhi harapan kita semua, namun Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah berupaya secara optimal. Saran dan masukan dari berbagai pihak sebagai perbaikan kinerja sangat kami harapkan untuk meningkatkan efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nagan Raya pada masa yang akan datang.

Kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyelesaian dokumen laporan ini, semoga Allah SWT selalu memberikan Ridha-Nya kepada kita semua untuk terus berkarya bagi kemajuan Kabupaten Nagan Raya yang kita cintai bersama.

Suka Makmue, | Maret 2022
BUPATI NAGAN RAYA
H.M. JAMIN IDHAM

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Nagan Raya dengan ibukota Suka Makmue, merupakan salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta diresmikan pada tanggal 2 Juli 2002 oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

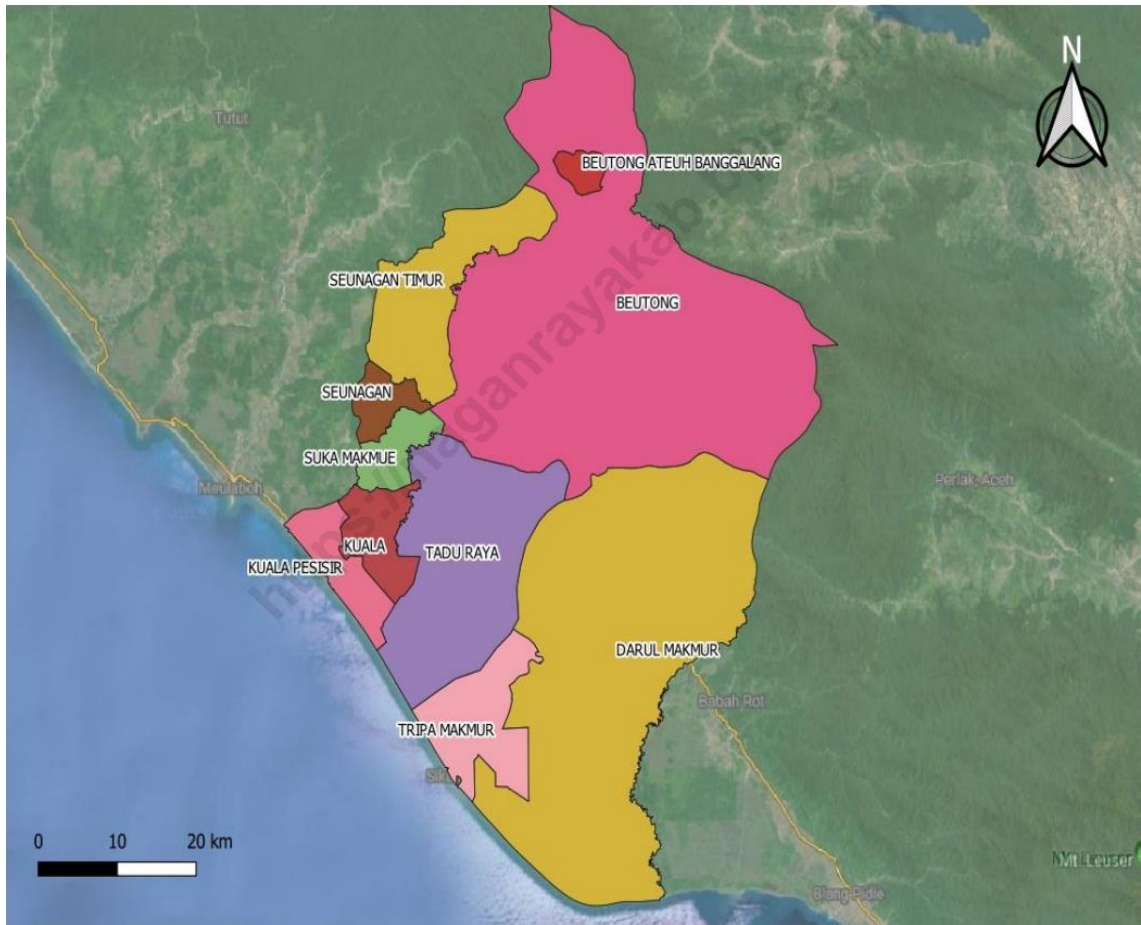
b. Data Geografis Daerah

Kabupaten Nagan Raya yang terletak di wilayah pantai Barat-Selatan Provinsi Aceh memiliki luas wilayah sebesar 3.544,91 Km² (354.491,05 Ha), atau sekitar 6,25% dari luas wilayah Provinsi Aceh. Dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Untuk lebih jelasnya dapat melihat gambar di bawah ini:

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Nagan Raya



Secara Astronomis Kabupaten Nagan Raya terletak pada lokasi $03^{\circ} 43'5''$ - $04^{\circ}37'55''$ Lintang Utara dan $96^{\circ}11'23''$ - $96^{\circ}47'58''$ Bujur Timur (BT). Berdasarkan letak geografis dan potensinya, Kabupaten Nagan Raya memiliki posisi yang strategis dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- a) Wilayah Kabupaten Nagan Raya berada di pantai Barat yang dilalui oleh jalan arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antar Provinsi.
- b) Wilayah Kabupaten Nagan Raya dilalui juga oleh jalan arteri primer sebagai penghubung antara pantai Barat dengan pantai Timur Provinsi Aceh melalui lintas Tengah Aceh.
- c) Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya Electric Power (NREP) di Kecamatan Kuala Pesisir yang merupakan salah satu pemasok listrik jalur transmisi Sumatera.

Kabupaten Nagan Raya terdiri atas 10 Kecamatan, 222 Desa/Gampong dan 30 Kemukiman meliputi Darul Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong, Seunagan, SukaMakmue, SeunaganTimur, Beutong Ateuh Banggalang dan Tripa Makmur.

Luas wilayah Kabupaten Nagan Raya 354.491,05 ha dengan pembagian secara wilayah administratif sebagaimana pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Luas Kabupaten Nagan Raya dirinci menurut Wilayah Administratif Pemerintahan Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah Luas (Ha)	Luas (%)
(1)	(2)	(5)	(6)
1	Darul Makmur	102.793	29,00
2	Kuala	12.089	3,41
3	Kuala Pesisir	7.634	2,15
4	Tadu Raya	34.719	9,79
5	Beutong	101.732	28,70
6	Seunagan	5.673	1,60
7	Suka Makmue	5.156	1,45
8	Seunagan Timur	25.161	7,10
9	Tripa Makmur	18.941	5,34
10	Beutong Ateuh Banggalang	40.592	11,45

Sumber: BPS Nagan Raya 2021

c. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2021 sebanyak 170.591 jiwa, berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 86.166 jiwa laki-laki (50,51%) dan 84.425 jiwa perempuan (49,49%). Sementara itu angka seks rasio sebesar 102%, ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk laki-laki terdapat 98 penduduk perempuan Rincian penduduk menurut jenis kelamin dalam kecamatan sebagaimana tertera pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dalam Kecamatan

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		
		LAKI	PEREMPUAN	JML
1	2	6	7	8
1	Darul Makmur	25.139	24.273	49.412
2	Kuala	11.303	11.047	22.350
3	Kuala Pesisir	8.883	8.455	17.338
4	Tadu Raya	7.493	7.238	14.731
5	Beutong	6.886	6.815	13.701
6	Seunagan	7.915	8.009	15.924
7	Suka Makmue	4.923	5.008	9.931
8	Seunagan Timur	6.944	7.033	13.977
9	Tripa Makmur	4.541	4.747	9.288
10	Beutong Ateuh Banggalang	1.012	978	1.990
JUMLAH		85.039	83.603	168.642

Sumber: BPS Nagan Raya 2021

Dari data tersebut, penduduk yang paling banyak bertempat tinggal di Kecamatan Darul Makmur dengan jumlah penduduknya mencapai 49.412 jiwa, Kecamatan Kuala dengan jumlah penduduk sebanyak 22.350 jiwa.

d. Jumlah Kecamatan dan Gampong

Jumlah Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 10 Kecamatan, Jumlah Gampong definitif di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2021 mencapai 222 Gampong dan 30 mukim. Kecamatan yang memiliki jumlah Gampong definitif terbanyak adalah Kecamatan Darul Makmur, Seunagan, dan Seunagan Timur dengan jumlah masing-masing Gampong sebanyak 40 Gampong, 35 Gampong, dan 34 Gampong. Data Jumlah Kecamatan dan Gampong dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Jumlah Kecamatan dan Gampong di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

No	Kecamatan	Kemukiman	Jumlah Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Darul Makmur	5	40
2	Kuala	2	17
3	Kuala Pesisir	3	16
4	Tadu Raya	2	22
5	Beutong	4	24
6	Seunagan	5	35
7	Suka Makmue	2	19
8	Seunagan Timur	4	34
9	Tripa Makmur	2	11
10	Beutong Ateuh Banggalang	1	4
Total		30	222

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Nagan Raya 2021

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Daerah dan Pegawai Pemerintahan

Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Daerah dan Pegawai Pemerintah di Kabupaten Nagan raya dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Daerah dan Pegawai Pemerintahan

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		JUMLAH PNS
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	70	14	84
2	Sekretariat DPRK	24	7	31
3	Inspektorat	19	19	38
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16	10	26
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26	20	46
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	38	20	58
7	Dinas Pendidikan	48	21	69

8	Dinas Kesehatan	19	14	33
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	54	15	69
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	23	4	27
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	21	3	24
12	Dinas Sosial	17	8	25
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17	2	19
14	Dinas Lingkungan Hidup	16	6	22
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	8	20
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan	23	10	33
17	Dinas Perhubungan	19	3	22
18	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	14	6	20
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah	14	13	27
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	11	24
21	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	19	4	23
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	8	20
23	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	22	7	29
24	Dinas Pertanian dan Peternakan	71	51	122
25	Dinas Perkebunan	19	7	26
26	Dinas Syari'at Islam	12	10	22
27	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	4	2	6
28	Sekretariat Majelis Adat Aceh	3	3	6
29	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	4	1	5
30	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	7	1	8
31	Dinas Pertanahan	7	1	8
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16	4	20
33	Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya	34	112	146

34	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	8	3	11
35	Sekretariat Kecamatan Darul Makmur	15	13	28
36	Sekretariat Kecamatan Kuala	14	10	24
37	Sekretariat Kecamatan Kuala Pesisir	17	10	27
38	Sekretariat Kecamatan Tadu Raya	15	1	16
39	Sekretariat Kecamatan Beutong	23	11	34
40	Sekretariat Kecamatan Seunagan	18	6	24
41	Sekretariat Kecamatan Suka Makmue	17	8	25
42	Sekretariat Kecamatan Seunagan Timur	16	7	23
43	Sekretariat Kecamatan Tripa Makmur	11	4	15
44	Sekretariat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang	13	0	13
TOTAL PNS KABUPATEN NAGAN RAYA		900	498	1398

Sumber: Bagian Organisasi Setdakab Nagan Raya, 2021

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1,234 triliun. Kemudian sesuai Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 28 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021, menjadi Rp.1,145 triliun atau berkurang sebesar Rp. 88.403 milyar. Sampai dengan akhir Desember 2021 target itu dapat direalisasikan sebesar Rp.1,102 triliun atau 96.2%.

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini sudah berumur 18 Tahun, situasi dan kondisi semakin kondusif dan banyak perkembangan yang telah dicapai sejak pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Keberadaannya yang sangat strategis untuk lintasan jalur Barat Selatan yang memberikan kontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Meskipun Kabupaten Nagan Raya masih tergolong muda, namun secara perlahan Kabupaten Nagan Raya telah mampu berdiri sejajar dengan Kabupaten/kota

lain di Aceh. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang telah diraih, diantaranya pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 kali berturut turut dari BPKRI Perwakilan Aceh sejak tahun 2008-2021 atas pengelolaan keuangan daerah dengan baik, dan semua itu merupakan bukti nyata kerja keras dan keseriusan dalam membangun Kabupaten Nagan Raya yang lebih baik.

Meskipun laju pembangunan dan kehidupan masyarakat semakin dinamis, banyak tantangan yang masih dihadapi Kabupaten Nagan Raya seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang menimbulkan dampak pada permasalahan-permasalahan pembangunan daerah.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah antara lain:

- **Penerapan dan Pengamalan Syariat Islam;**

Kabupaten Nagan Raya dalam sejarahnya merupakan kabupaten yang sangat komitmen dalam menjalankan syariat islam dan menerapkan nilai-nilai islam dalam semua tatanan masyarakat secara kaffah yang menjadi landasan pembangunan untuk melahirkan generasi dan masyarakat cerdas, beragama dan memiliki nilai budaya dengan karakter moral yang baik, maka penerapan syariat islam menjadi sangat penting dan isu strategis utama yang harus menjadi perhatian semua pihak.

Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan masih banyak terjadi dan menjadi tantangan dalam melaksanakan penerapan nilai-nilai islam secara kaffah di Kabupaten Nagan Raya. Diantara permasalahan sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka pelanggaran terhadap Syariat Islam.
2. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga pendidikan (MUQ, TPA, Majelis Taklim) yang mampu membentuk karakter dan berkepribadian islam
3. Masih rendahnya mutu pendidikan dayah
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana ibadah
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) ke Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.
6. Masih kurangnya masyarakat yang memahami tata cara Tajhiz Mayat (Pemandian Mayat)

- **Reformasi Birokrasi, Pemerintahan, Partisipasi Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kelembagaan dan kinerja aparatur yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Permasalahan dalam pembangunan sistem pemerintahan yang masih terjadi di Nagan Raya adalah sebagai berikut;

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang bebas KKN, pemerintahan yang bersih (clean government) dan berwibawa
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur yang mendukung Sistem manajemen pemerintahan dan belum optimalkan kinerja birokrasi
3. Belum tersedianya sistem database yang terpadu dan terintegrasi
4. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat dan penerapan PPRG dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik.

- **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Kearifan Lokal, Industri dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Permasalahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai berikut;

1. Masih tingginya angka kemiskinan
2. Masih rendahnya kemampuan/ keterampilan masyarakat dalam mata pencaharian.
3. Kurangnya dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis kearifan lokal.
4. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah.
5. Belum optimalnya pengelolaan potensi unggulan daerah
6. Terbatasnya akses lapangan kerja
7. Masih rendahnya investasi sektor swasta.

- **Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga**

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Nagan Raya di bidang pendidikan, budaya, pemuda sebagai berikut;

1. Masih kurangnya aksesibilitas Pendidikan.
2. Masih rendahnya mutu pendidikan.
3. Belum terwujudnya lembaga pendidikan vokasi yang unggul dan berdaya saing
4. Rendahnya tingkat literasi masyarakat
5. Masih rendahnya peran dan fungsi lembaga adat
6. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan
7. Masih rendahnya prestasi olahraga
8. Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga

- **Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

1. Permasalahan di bidang sosial masyarakat dan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut;
2. Penerima subsidi listrik dan subsidi beras belum tepat sasaran
3. Belum adanya program asuransi kematian bagi masyarakat

4. Rendahnya keterampilan dan terbatasnya modal usaha masyarakat miskin
5. Belum optimalnya penanggulangan masyarakat miskin dan rentan miskin
6. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan dan diversifikasi pangan
7. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok perempuan
8. Belum optimalnya pemberdayaan kombatan dan korban konflik
9. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
10. Belum tersedianya Grand Desain Pembangunan Kependudukan;
11. Masih tingginya angka pengangguran;
12. Belum berfungsinya Balai Latihan Kerja (BLK)

- **Kesehatan**

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang produktif. Tanpa kondisi kesehatan prima, masyarakat Kabupaten Nagan Raya tidak akan produktif dan tidak akan mampu mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal.

Saat ini angka kesakitan masyarakat Kabupaten Nagan Raya masih berkisar 1-10 hari dalam sebulan. Dalam kerangka pembangunan kesehatan, Kabupaten Nagan Raya menghadapi berbagai permasalahan yaitu antara lain sebagai berikut;

1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
2. Masih rendahnya kualitas SDM tenaga kesehatan dan para medis;
3. Masih minimnya tenaga kesehatan (dokter spesialis);
4. Masih terdapat kasus gangguan gizi (mal nutrisi);
5. Masih tingginya angka kematian ibu dan anak;
6. Belum optimalnya pelayanan di RSUD Sultan Iskandar Muda;
7. Belum terakreditasinya Puskesmas dan RSUD Sultan Iskandar Muda;

- **Pembangunan Infrastruktur, Pemukiman, Tata Ruang, Komunikasi dan Informasi, Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Transmigrasi**

Ketersediaan dan kemapaman infrastruktur wilayah menjadi potret kemajuan daerah. Infrastruktur wilayah mendukung distribusi barang, jasa dan manusia. Namun demikian, kondisi pembangunan infrastruktur wilayah menghadapi beberapa kendala, sebagai berikut;

1. Belum meratanya infrastruktur, sarana dan prasarana antar wilayah.
2. Belum maksimalnya pengembangan kawasan strategis
3. Belum mememadainya sarana dan prasarana irigasi
4. Masih minimnya penanganan infrastruktur kebencanaan

5. Masih rendahnya akses sanitasi dan air minum bagi masyarakat
6. Masih adanya masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni
7. Belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka Publik
8. Masih banyak rumah yang tidak layak huni
9. Akses jalan usaha tani belum memadai
10. Saluran irigasi tersier belum memadai
11. Pembangunan destinasi wisata tidak merata
12. Belum berfungsi laboratorium daerah untuk analisis limbah industri dan limbah rumah tangga
13. Pencemaran lingkungan kawasan pelabuhan khusus batubara, juga mengganggu kesehatan masyarakat sekitar
14. Pencemaran Air dari kegiatan rumah tangga dan home industri
15. Limbah padat dan cair mengganggu lingkungan pasar
16. Pencemaran dan Polusi udara oleh kegiatan industri (PLTU) dan tambang
17. Pembukaan lahan dengan cara pembakaran
18. Tingginya penggunaan pestisida
19. Pembuangan sampah tidak selektif menurut sifat sampah
20. Pengelolaan sampah belum optimal
21. Sumber makanan tercemar
22. Pencemaran lingkungan dan air oleh PKS
23. Antisipasi ancaman bahaya keberadaan PLTA
24. Pembinaan kelompok masyarakat perkebunan sedikit
25. Peningkatan suhu udara akibat pengelolaan rawa gambut
26. Terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi penggunaan lahan lainnya terutama perkebunan kelapa sawit
27. Pemanfaatan area sempa dan sungai untuk permukiman dan perkebunan
28. Kerusakan lahan akibat kegiatan Pertambangan dan Perkebunan
29. Perambahan kawasan lindung (kawasan hutan lindung dan kawasan lindung gambut)
30. Konservasi lahan gambut (Rawa Tripa) yang terintegrasi.
31. Kebakaran hutan dan lahan

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Bupati Nagan Raya berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN NAGAN RAYA YANG SEJAHTERA, MANDIRI,
MAJU DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
YANG BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM “.**

Visi ini mengandung empat kata kunci sebagai berikut :

1) Berlandaskan Syariat Islam

Menjadikan Masyarakat bersama pemerintah daerah dapat mewujudkan masyarakat yang religius. Menerapkan nilai-nilai islam dalam setiap kegiatan dan tatanan kehidupan bermasyarakat, social dan budaya. Dan Agama harus menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan bersama;

2) Berdaya Saing

Menciptakan Masyarakat dan Pemerintah Daerah yang memiliki daya saing melalui peningkatan sumber daya manusia, mengingat tantangan global yang semakin tinggi dan cepat yang mengharuskan setiap generasi mampu berkompetisi dalam setiap bidang dengan segala tantangannya;

3) Sejahtera

Pemerintah harus mampu menurunkan angka kemiskinan secara periodik. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah. Memberi stimulus dan pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat memberi dampak positif perkembangan etos kerja ekonomi masyarakat;

4) Mandiri

Kabupaten Nagan Raya dan masyarakatnya harus lebih mandiri, mampu menciptakan PAD dalam kapasitas besar, sehingga mampu melakukan pembiayaan belanja daerah dengan jangkauan pembangunan yang luas. Selain itu, masyarakat diharapkan harus mampu menjadi lebih mandiri, meningkatkan produktivitas tanpa harus terus menerus diberikan stimulus oleh pemerintah, sehingga pemerataan pemberdayaan akan tercapai dengan jangka waktu yang relatif lebih cepat.

Selanjutnya Misi Bupati Nagan Raya yang tertuang dalam RPJMK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 adalah :

Misi 1: Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam Secara Kaffah

Melalui misi 1 ini akan menanamkan nilai-nilai Dinul dan Syariat Islam dalam setiap sendi kehidupan pemerintahan dan bermasyarakat dengan gerakan 'meramaikan mesjid'. Sehingga dapat berkurangnya kasus pelanggaran syariat islam, melalui Majelis Taklim yang aktif, serta meningkatkan dan mengembangkan peran dan fungsi Lembaga Pendidikan Dayah melalui standarisasi Pendidikan Dayah, dan mendukung fungsi- fungsi Lembaga Bazis dan sejenisnya.

Misi 2: Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Baik dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan

Melalui misi 2 ini akan menciptakan Tata Kelola dan Tata Laksana pemerintahan daerah yang terbuka dan bersih (open and clean governance) dengan meningkatnya Indeks Pelayanan Publik, APBK yang tepat waktu, Opini BPK yang baik dan meningkat setiap tahunnya, tingkat akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas dalam kinerja Pemerintah Daerah yang tinggi dengan didasari pada basis data yang terpadu dengan melibatkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan di Nagan Raya.

Misi 3: Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Kearifan Lokal Menuju Masyarakat Yang Produktif Sebagai Upaya Pemberantasan Kemiskinan dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Penopang Kemandirian Daerah

Melalui misi 3 ini akan dioptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sektor pertanian, perkebunan dan kelautan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada perdagangan dan industri, membangun pasar sentra di kecamatan agar hasil pertanian dan perkebunan dapat dipusatkan pada pasar kecamatan hingga membentuk harga pasar lokal. Selain itu bidang mitigasi dan penanganan kebencanaan dilaksanakan melalui penempatan bidang Mitigasi Bencana di salah satu Organisasi Perangkat Daerah seperti BPBD atau Dinsos melalui kerja sama dengan kampus-kampus khususnya dengan Pusat Kajian Kebencanaan dengan sistem koordinasi kebencanaan yang terintegrasi dengan semua Organisasi Perangkat Daerah, membangun kerja sama dengan Akademisi khususnya dengan Pusat Kajian Kebencanaan, membangun sistem koordinasi mengenai kebencanaan yang terintegrasi dengan semua Organisasi Perangkat Daerah. Disamping itu, upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat melalui pemberian ketrampilan dan permodalan

masyarakat melalui perkreditan gampong dengan sistem simpan pinjam melalui BKG (Bank Kredit Gampong).

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Memberi Dukungan Maksimal Terhadap Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga

Misi 4 untuk meningkatkan mutu Pendidikan Umum, Agama dengan memerankan guru sebagai sentra pendidikan melalui penyusun kurikulum muatan lokal, pentingnya pendidikan agama bagi masyarakat sebagai sarana pengembangan akhlak dan normal bangsa, mamacu lembaga-lembaga pendidikan keagamaan untuk lebih siap bersaing dalam hal pengembangan mutu dan kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, peningkatan taraf kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam upaya peningkatan kualitas layanan Pendidikan disetiap jenjang pendidikan. Selain itu, dengan penyelenggaraan festival Seni dan Budaya dalam rangka menjaga nilai-nilai dan kearifan local yang menjadi salah satu identitas masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Nagan Raya pada khususnya. Dan juga melakukan pembinaan kepada induk-induk oranisasi olahraga dan kepemudaan dalam rangka meningkatkan daya saing SDM Pemuda di Kabupaten Nagan Raya.

Misi 5: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Misi 5 ini akan memastikan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Nagan Raya dengan fokus pada menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Nagan Raya. Secara khusus dalam rangka menanamkan pemahaman mantan kombatan mengenai kehidupan berbangsa, bernegara dan berpolitik, berpengetahuan tentang perdamaian, ekonomi, pembangunan, lingkungan, bahaya narkoba dan terorisme melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan baik lokal maupun nasional dengan tujuan meningkatnya kesejahteraan Mantan Kombatan dan para korban konflik dengan partisipasi aktif dan positif dalam pembangunan Nagan Raya.

Misi 6: Meningkatkan Pelayanan Yang Berkualitas Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat

Melalui misi 6 ini akan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak serta masyarakat miskin, terutama di daerah terpencil, tertinggal dan daerah perbatasan melalui pembukaan akses akses maupun pembangunan infrastruktur, pengendalian penyebaran penyakit, gizi buruk dan krisis kesehatan

akibat bencana, memperbaiki kualitas pelayanan dasar institusi kesehatan (standarisasi Rumah Sakit Daerah, Puskesmas, dan Pustu) untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan ceria dan Menggalakkan masyarakat untuk perilaku hidup bersih dan sehat.

Misi 7: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Kebutuhan Potensi dan Karakteristik Wilayah

Misi 7 dimaksudkan untuk penyediaan infrastruktur dasar dan pendukung dalam rangka mendukung potensi kewilayahan dan sektor prioritas, seperti pertanian, perkebunan, kelautan, pertambangan dengan mewujudkan aksesibilitas infrastruktur antar wilayah dengan prinsip berkelanjutan dengan tetap mempertahankan aspek kelestarian lingkungan yang berpotensi terkait peningkatan ekonomi masyarakat dan juga peningkatan PAD daerah dengan membuka akses ke desa-desa terpencil. Selain itu dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengurangan resiko bencana dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota/Kecamatan sehingga integrasi dan keterhubungan antar wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang lestari.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK 2017-2022) yaitu :

Misi 1: Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam Secara Kaffah

1. Program Pelayanan Keagamaan;
2. Program Peningkatan dan Pengawasan Syariat Islam;
3. Program Pengembangan Penguatan Syariat Islam;
4. Program Pembinaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan;
5. Program Peningkatan Pengkaderan Ulama;
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendidikan;
7. Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Agama Islam;
8. Program Pembinaan Mutu Pendidikan Dayah;
9. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (Bidang Pemberdayaan santri-DayahTerpadu);
10. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan;
11. Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Agama Islam;
13. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Kehidupan Beragama.

Misi 2: Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Baik dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
9. Program Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
10. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
11. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
12. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
13. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
14. Program Layanan Publik;
15. Program Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
16. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
17. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
18. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
19. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
20. Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas;
21. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
22. Program Peningkatan Kesehatan KDH/WKDH;
23. Program Peningkatan Kerja Sama AntarPemerintah Daerah;
24. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
25. Program Pengembangan Data /Informasi Statistik Sektoral;
26. Program Pengembangan Data/Informasi;
27. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
28. Program Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
29. Program Pengembangan Data Statistik Perikanan;
30. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database jalan dan jembatan;
31. Program Pengembangan Pusat Komando Penanggulangan Bencana;
32. Program Perencanaan Tata Ruang;
33. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;
34. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
35. Program Pengembangan Transmigrasi dan Perencanaan RTSP;
36. Program Penyusunan Laporan Pelaksanaan Investasi PMDN / PMA;
37. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Program Penataan Daerah Otonomi Baru;

39. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
40. Program Perencanaan Sosial Budaya;
41. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
42. Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
43. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;
44. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Gampong;
45. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
46. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
47. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Misi 3: Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Kearifan Lokal Menuju Masyarakat Yang Produktif Sebagai Upaya Pemberantasan Kemiskinan dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Penopang Kemandirian Daerah

1. Program Keluarga Berencana;
2. Program Keluarga Sejahtera;
3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
8. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
9. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
10. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda;
11. Program Pengembangan Kerja Sama Pengelolaan Kekayaan Budaya;
12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
13. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
14. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
15. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
16. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;
17. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
18. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut;
19. Program Pengembangan Penyuluhan Perikanan;
20. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan;
21. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
22. Program Pendataan Tanah-Tanah Asset Milik Pemerintah Daerah;
23. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi;
24. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
25. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
26. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;

27. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan;
28. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif;
29. Program Pengembangan Kewirausahaan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
30. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
31. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
32. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
33. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
34. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
35. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan;
36. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
37. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
38. Program Pemberdayaan SDM Pertanian/Perkebunan;
39. Program Peningkatan Kelembagaan RDK/RDKK Pupuk Bersubsidi;
40. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
41. Program Peningkatan Kelembagaan dan SDM Penyuluh Pertanian;
42. Program Penguatan Kelembagaan Pertanian/Perkebunan;
43. Program Rehabilitasi Tanaman Pertanian/Perkebunan.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Memberi Dukungan Maksimal Terhadap Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga

1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Non Formal dan Informal;
2. Program Peningkatan Mutu Ruang Sekolah;
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
4. Program Pendidikan Non Formal;
5. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
6. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Program Peningkatan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
9. Program Pengembangan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;
10. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
11. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah;
12. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
13. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
14. Program Penguatan Lembaga Adat dan Budaya;
15. Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai Adat dan Budaya;
16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
17. Program Pagelaran Seni dan Budaya Daerah (Nagan Festival);
18. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
19. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
20. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
21. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga;
22. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga;
23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

Misi 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
2. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
6. Program Pembinaan Anak Terlantar;
7. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
8. Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapina, PSK , Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya);
9. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
10. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
12. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
13. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
14. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
15. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
16. Program Peningkatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
17. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
18. Program Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum;
19. Program Jaminan Sosial Santunan Kematian;
20. Program Keluarga Harapan Plus.

Misi 6: Meningkatkan Pelayanan Yang Berkualitas Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Program Penyehatan Lingkungan;
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
5. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
6. Program Pengembangan Kesehatan;
7. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
8. Program Kesehatan Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (PDTK) Termasuk Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK);
9. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
10. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
11. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
13. Program Pendampingan Akreditasi Puskesmas;
14. Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Puskesmas;
15. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan;
16. Program Pelaksanaan Operasional BLUD;

17. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
18. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
19. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
20. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
21. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
22. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.

Misi 7: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Kebutuhan Potensi dan Karakteristik Wilayah

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
3. Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong;
4. Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
5. Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Talud/Bronjong;
6. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
7. Program Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Tempat;
8. Program Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan;
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
10. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan;
11. Program Perencanaan Kota Menengah dan Besar;
12. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
13. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;
14. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
15. Program Transmigrasi Lokal;
16. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
17. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
18. Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian;
19. Program Peningkatan Sistem Sarana dan Prasarana Pertanian;
20. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan;
21. Program Pengendalian Banjir;
22. Program Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan;
23. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
24. Program Pembangunan Saluran Limbah Rumah Tangga;
25. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman;
26. Program Penyusunan RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum);
27. Program Penyusunan Raqan BUMDPDAM;
28. Program Pembangunan Infrastruktur Air Bersih (PDAM);
29. Program Pengembangan Perumahan;
30. Program Pembangunan Saluran Limbah Rumah Tangga;
31. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
32. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
33. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

34. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
35. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
36. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar;
37. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kawasan Wisata Rawa Tripa.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan (RKPK 2021) dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.5
Dokumen Perencanaan Tahunan (RKPK 2021)

No.	Program/ Kegiatan	OPD Pelaksana	Ket.
1	2	3	4
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
	PENDIDIKAN		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan	
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (OTSUS)	Dinas Pendidikan	
3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	
4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan	
5	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	
6	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (OTSUS)	Dinas Pendidikan	
7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	
8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	Dinas Pendidikan	

	Pendidikan Sekolah Dasar (OTSUS)		
9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan	
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan	
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan	
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan	
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	
15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	
16	Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan	
17	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	
18	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
1	Penambahan Ruang Kelas Baru (OTSUS)	Dinas Pendidikan	
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (OTSUS)	Dinas Pendidikan	
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	
4	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	
5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (OTSUS)	Dinas Pendidikan	
6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	

7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (OTSUS)	Dinas Pendidikan	
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (DAK non fisik-Bos Reguler-OTSUS)	Dinas Pendidikan	
9	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan	
10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan	
11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan	
12	Pembangunan Laboratorium	Dinas Pendidikan	
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan	
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan	
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	
16	Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan	
17	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Dinas Pendidikan	
2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan	
3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (OTSUS)	Dinas Pendidikan	
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (OTSUS)	Dinas Pendidikan	
5	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	

	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	
2	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	
4	Apresiasi PAUD/DIKMAS	Dinas Pendidikan	
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan	
6	Pengadaan Buku Kurikulum /Referensi	Dinas Pendidikan	
7	Pengembangan pendidikan keaksaraan (OTSUS)	Dinas Pendidikan	
8	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup OTSUS)	Dinas Pendidikan	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
1	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Dinas Pendidikan	
2	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Dinas Pendidikan	
3	Diklat Pengetahuan Dasar Matematika Guru SD	Dinas Pendidikan	
4	Diklat Guru PAI SD	Dinas Pendidikan	
5	Diklat Guru PAI SMP	Dinas Pendidikan	
6	Diklat Guru PJOK SD	Dinas Pendidikan	

7	Diklat Guru PJOK SMP	Dinas Pendidikan	
8	Diklat Pengetahuan Pedagogik dan Tematik Guru SD	Dinas Pendidikan	
9	Seleksi Guru/kepala sekolah dan Pengawas Berprestasi	Dinas Pendidikan	
10	Seleksi Guru/kepala sekolah dan Pengawas Berprestasi	Dinas Pendidikan	
11	Olimpiade Guru SD/SMP Nasional (OGN)	Dinas Pendidikan	
12	Lomba Karya Inovasi Pembelajaran (INOBEL)Guru SD/SMP	Dinas Pendidikan	
13	Pelatihan kurikulum Keacehan SD dan SMP	Dinas Pendidikan	
14	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (OTSUS)	Dinas Pendidikan	
15	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi (OTSUS)	Dinas Pendidikan	
16	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (OTSUS)	Dinas Pendidikan	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
1	Rapat Kerja Majelis Pendidikan Daerah.	Sekretariat MPD	
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kesekolah dari tingkat SD/MIN sampai SMP.	Sekretariat MPD	
3	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	Sekretariat MPD	
4	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Sekretariat MPD	
5	Rapat Kerja/Rapat Paripurna MPD.	Sekretariat MPD	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		

1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Pendidikan	
2	Penyelenggaraan Ujian Nasional (UASBN) SD/MI, UN SMP/MTSN	Dinas Pendidikan	
3	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (Datadik)	Dinas Pendidikan	
4	Pengelolaan Beasiswa Miskin/Kurang Mampu	Dinas Pendidikan	
5	Patroli Keamanan Sekolah	Dinas Pendidikan	
6	Kerjasama Kelembagaan Bidang Pendidikan (Saweu Sikulah)	Dinas Pendidikan	
7	Monitoring, evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan BOS Tingkat SD/SMP	Dinas Pendidikan	
8	Pelatihan Teknis Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	
9	Pelatihan Profesi Kepengawasan	Dinas Pendidikan	
10	Pelatihan Website Sekolah Tingkat SD dan SMP	Dinas Pendidikan	
11	Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemetaan Sekolah Berbasis WEB	Dinas Pendidikan	
12	Bimtek Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kabupaten Nagan Raya	Dinas Pendidikan	
13	Pengelolaan BOS Tingkat SD/SMP	Dinas Pendidikan	
14	Peningkatan wawasan kebangsaan	Dinas Pendidikan	
15	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan (OTSUS)	Dinas Pendidikan	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		
1	Peningkatan Kesejahteraan Anggota Majelis Pendidikan Daerah	Sekretariat MPD	
	Program Pendidikan Pembinaan Dayah		
1	Perencanaan Pembangunan Dayah	Dinas Syari'at Islam	

2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren	Dinas Syari'at Islam	
3	Pelaksanaan Hari Santri	Dinas Syari'at Islam	
4	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah type B (OTSUS)	Dinas Syari'at Islam	
Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah			
1	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Dayah	Dinas Syari'at Islam	
2	Pembinaan dan Pelatihan Santriwan dan Santriwati yang Berkualitas	Dinas Syari'at Islam	
3	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Dayah	Dinas Syari'at Islam	
4	Pembinaan kelembagaan dayah dan pengembangan dayah (OTSUS)	Dinas Syari'at Islam	
5	Pelatihan life skill santri, jurnalistik dan penerbitan berkala majalah/jurnal dayah (OTSUS)	Dinas Syari'at Islam	
6	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Siswa	Dinas Pendidikan	
7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	
KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Dinas Kesehatan	

	Kinerja SKPD		
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	
	Administrasi Keuangan		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kesehatan	
3	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dinas Kesehatan	
4	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Kesehatan	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Dinas Kesehatan	
	Administrasi Umum		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Kesehatan	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Kesehatan	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Kesehatan	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	

8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kesehatan	
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Kesehatan	
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Kesehatan	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Dinas Kesehatan	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan	
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Dinas Kesehatan	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kesehatan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Dinas Kesehatan	

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP		
	Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		
1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (OTSUS)	Dinas Kesehatan	
2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	
3	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (OTSUS)	Dinas Kesehatan	
4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (OTSUS)	Dinas Kesehatan	
5	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan	
6	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (OTSUS)	Dinas Kesehatan	
7	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinas Kesehatan	
8	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan	
9	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	

10	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (OTSUS)	Dinas Kesehatan	
11	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinas Kesehatan	

14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan	
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (OTSUS)	Dinas Kesehatan	
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinas Kesehatan	
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan	
23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinas Kesehatan	
24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan	
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	
26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Dinas Kesehatan	
28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan	

29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan	
30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	
31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dinas Kesehatan	
32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	
34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	
35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	
37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	
38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peranserta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (OTSUS)	Dinas Kesehatan	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

2	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan	
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	
1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	
1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Dinas Kesehatan	

2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	
1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Administrasi Keuangan		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan

	Administrasi Umum		
		Penataan Ruang	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perumahan dan Permukiman	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perumahan dan Permukiman	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Perumahan dan Permukiman	
8	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan	

11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
12	Pengadaan Mebeleur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	Pengadaan Mebel	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penataan Ruang	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

2	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDAWS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai (OTSUS)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000Ha dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (OTSUS)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
1	Pembangunan Jalan (OTSUS)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	Pelebaran Jalan Menuju Standar (OTSUS)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3	Rekonstruksi Jalan	Dinas Perumahan dan Permukiman	

4	Rehabilitasi Jalan (OTSUS)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5	Pembangunan Jembatan (OTSUS)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
6	Rehabilitasi Jembatan (OTSUS)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
7	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
8	Pembangunan Jalan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota			
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

	<p>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</p> <p>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</p>		
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
3	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	<p>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</p> <p>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>		
1	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	<p>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</p> <p>Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>		
1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Dinas Perumahan Rakyat dan	

	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</p> <p>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</p>	Kawasan Permukiman	
1	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (OTSUS)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	<p>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</p> <p>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</p>		
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubah suai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	<p>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</p> <p>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</p>		
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat dan	

3	<p>Penataan Bangunan dan Lingkungan</p> <p>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</p> <p>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS</p> <p>2 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS</p> <p>3 Penyediaan Sarana Persampahan</p> <p>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</p> <p>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</p> <p>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</p> <p>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan</p>	<p>Kawasan Permukiman</p> <p>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup</p>	
---	---	--	--

	dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		
2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	Penyusunan Renstradan Renja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
3	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
4	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Administrasi Keuangan			
1	Penyediaan Tunjangan ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perumahan Rakyat dan	

	Administrasi Umum	Kawasan Permukiman	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
14	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perumahan Rakyat dan	

3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (OTSUS)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana (OTSUS)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumdi Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (OTSUS)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH			
Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam			

1	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan (OTSUS)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Administrasi Keuangan			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
Administrasi Umum			
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	

7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
2	Penyediaan Makanan dan Minuman	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
3	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	

2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
2	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
3	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
4	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	

	Perdadan Perkada melalui Penertibandan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		
5	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
6	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	
2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	
3	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Pengelolaan Satuan Polisi Pamongpraaja dan Wilayahatul Hisbah Aceh		
1	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Satuan Polisi Pamong Praja dan	

2	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Wilayatul Hisbah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
Administrasi Keuangan			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
Administrasi Umum			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	

4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
6	Penyediaan JasaKebersihanKantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
14	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
15	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
16	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
	Penataan Organisasi		
1	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Renstradan Renja Perangkat Daerah	BPBD	
	Administrasi Keuangan		
1	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	BPBD	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	BPBD	
	Administrasi Umum		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	BPBD	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BPBD	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPBD	
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	BPBD	

7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPBD	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	BPBD	
11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	BPBD	
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BPBD	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BPBD	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	BPBD	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPBD	
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	BPBD	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	BPBD	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	

	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
1	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	BPBD	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	
	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN		
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (OTSUS)	BPBD	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NONKEBAKARAN		
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (OTSUS)	BPBD	
	SOSIAL		

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Renstradan Renja Perangkat Daerah	Dinas Sosial
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dinas Sosial
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Sosial
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Sosial
Administrasi Keuangan		
1	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Dinas Sosial
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Sosial
3	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dinas Sosial
4	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Sosial
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Sosial
7	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Sosial
Administrasi Umum		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Dinas Sosial

	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
3	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Sosial
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Sosial
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Sosial
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Sosial
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Sosial
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Sosial
12	Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah	Dinas Sosial
13	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Sosial
14	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Sosial
15	Pengadaan Mebeleur	Dinas Sosial
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Sosial
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Dinas Sosial
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Sosial
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Sosial
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Sosial
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Dinas Sosial

22	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Dinas Sosial	
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Dinas Sosial	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Sosial	
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Sosial	
3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Sosial	
4	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Sosial	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
1	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Dinas Sosial	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Dinas Sosial	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1	Pengadaan Mebel	Dinas Sosial	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Sosial	

2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sosial	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK			

	KEKERASAN		
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Dinas Sosial	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
1	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial	
2	Penyediaan Sandang		
3	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial	
4	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dinas Sosial	
5	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		

1	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial	
2	Penyediaan Alat Bantu	Dinas Sosial	
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Dinas Sosial	
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial	
5	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial	
2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial	
3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Dinas Sosial	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
1	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Sekretariat Daerah	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
1	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Dinas Sosial	
2	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Dinas Sosial	

	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Dinas Sosial	
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinas Sosial	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
1	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Renstradan Renja Perangkat Daerah	Dinas Syariat Islam	
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dinas Syariat Islam	
	Administrasi Keuangan		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Syariat Islam	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Syariat Islam	
	Administrasi Umum		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Syariat Islam	

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Syariat Islam	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Syariat Islam	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Syariat Islam	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Syariat Islam	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Syariat Islam	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Syariat Islam	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Syariat Islam	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Syariat Islam	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Syariat Islam	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Syariat Islam	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Syariat Islam	
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Dinas Syariat Islam	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Administrasi Keuangan			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat Majelis Permasyarakatan Ulama	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Sekretariat Majelis Permasyarakatan Ulama	
Administrasi Umum			

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	

11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala MobilJabatan	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas SumberDaya Aparatur			
1	Pengadaan PakaianDinas Beserta Perlengkapannya	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH			
AdministrasiKeuangan			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
AdministrasiUmum			
1	Penyediaan JasaSurat Menyurat	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
3	Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat Majelis Adat Aceh	

4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
14	Pengadaan Mebeleur	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Sekretariat Baitul Mal	
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Sekretariat Baitul Mal	

	Administrasi Keuangan		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat Baitul Mal	
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat Baitul Mal	
3	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Sekretariat Baitul Mal	
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Sekretariat Baitul Mal	
	Administrasi Umum		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat Baitul Mal	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat Baitul Mal	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat Baitul Mal	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sekretariat Baitul Mal	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sekretariat Baitul Mal	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sekretariat Baitul Mal	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat Baitul Mal	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat Baitul Mal	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sekretariat Baitul Mal	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Sekretariat Baitul Mal	
11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sekretariat Baitul Mal	

12	Pengadaan Peralatan GedungKantor	Sekretariat Baitul Mal	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sekretariat Baitul Mal	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat Baitul Mal	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor	Sekretariat Baitul Mal	
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah GedungKantor	Sekretariat Baitul Mal	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas SumberDaya Aparatur		
1	Pengadaan PakaianDinas Beserta Perlengkapannya	Sekretariat Baitul Mal	
2	Pengadaan PakaianKerja Lapangan	Sekretariat Baitul Mal	
3	Pengadaan PakaianKhusus Hari-hari Tertentu	Sekretariat Baitul Mal	
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
	TENAGA KERJA		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
3	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
1	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	

4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		

	Daerah		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (OTSUS)	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas TenagaKerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pelayanan antar Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	

2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
3	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
1	Administrasi Keuangan		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan	
3	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN		

	PEREMPUAN	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan
2	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

3	<p>Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan</p> <p>Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>Dinas Perkebunan</p>	
1	<p>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</p> <p>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan</p>	
1	<p>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</p> <p>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan</p>	

	<p>Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>		
1	<p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan	
	<p>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>		
1	<p>Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan	
	<p>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</p>		
	<p>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data diTingkat Daerah Kabupaten/kota</p>		
1	<p>Penyediaan Data Gender dan Anak diKewenangan Kabupaten/Kota</p>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan	
	<p>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</p>		
	<p>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan</p>		

	Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan	
2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan	
	PANGAN		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
1	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai		

	dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kotadalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
1	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		
1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dinas Pangan	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		
1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada	Dinas Kelautan, Perikanan dan	

	Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pangan	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
	PERTANAHAN		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pertanahan	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanahan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Dinas Pertanahan	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Pertanahan	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pertanahan	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Pertanahan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pertanahan	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Pertanahan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Program Pengembangan sistem informasi pertanahan		
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Pertanahan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1	Pengadaan Mebel	Dinas Pertanahan	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pertanahan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Pertanahan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pertanahan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Pertanahan	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pertanahan	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pertanahan	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pertanahan	
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI		
	Pemberian Izin Lokasi Dalam1(satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Dinas Pertanahan	
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		
	Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi		
1	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Dinas Pertanahan	
	Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN)		

1	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan	
1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan	
2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan	
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan	Dinas Pertanahan	

	Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	PROGRAM REDISTRIBUSITANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Dinas Pertanahan	
2	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Dinas Pertanahan	
3	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan	
	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu)	Dinas Pertanahan	

	Daerah Kabupaten/Kota		
2	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan	
	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT		
	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan	
3	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Dinas Pertanahan	
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		
	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan	
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		
1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Dinas Pertanahan	
2	Pemanfaatan Tanah Kosong	Dinas Pertanahan	

	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		
	Penerbitan Izin Membuka Tanah		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Dinas Pertanahan	
2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Dinas Pertanahan	
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dinas Pertanahan	
2	Koordinasi iPemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan	
	Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi		
1	Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Dinas Pertanahan	
	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATASTANAH		
	Fasilitas, Inventarisasi dan Pengurusan Hakatas Tanah Aset Pemerintah		
1	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Dinas Pertanahan	
	Fasilitas, Inventarisasi dan Pengurusan Hakatas Tanah Milik Masyarakat Miskin		
1	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin	Dinas Pertanahan	

	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN		
	Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong		
1	Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Dinas Pertanahan	
2	Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Dinas Pertanahan	
3	Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat Gampong	Dinas Pertanahan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN		
	Pembinaan dan Kerjasama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten		
1	Pembinaan Kerjasama Pendidikan Pertanahan	Dinas Pertanahan	
2	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Dinas Pertanahan	
	Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan		
1	Pembinaan Pertanahan Bagi Imeum Mukim/Keuchik	Dinas Pertanahan	
	PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah		

	Perbatasan dan Pulau Terpencil		
1	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir	Dinas Pertanahan	
2	Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai	Dinas Pertanahan	
3	Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah Wilayah Perbatasan	Dinas Pertanahan	
4	Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah pada Pulau Terpencil	Dinas Pertanahan	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN		
	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)		
1	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dinas Pertanahan	
2	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dinas Pertanahan	
	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN		
	Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan		
1	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan	
2	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Dinas Pertanahan	
	LINGKUNGAN HIDUP		

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Lingkungan Hidup	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dinas Lingkungan Hidup	
	Administrasi Keuangan	Dinas Lingkungan Hidup	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Lingkungan Hidup	
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup	
	Administrasi Umum	Dinas Lingkungan Hidup	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Lingkungan Hidup	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Lingkungan Hidup	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Lingkungan Hidup	
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Lingkungan Hidup	
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	
7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Lingkungan Hidup	
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Lingkungan Hidup	

10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Dinas Lingkungan Hidup	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Lingkungan Hidup	
	Peningkatan Disiplinan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Lingkungan Hidup	
1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Dinas Lingkungan Hidup	
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Dinas Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)		
	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

	Kabupaten/Kota	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup
2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usahadan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
1	Pengawasan Usahadan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup

	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dinas Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	
2	Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (OTSUS)	Dinas Lingkungan Hidup	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	Administrasi Keuangan		

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Administrasi Umum		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
Peningkatan Disiplinan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kependudukan dan Catatan	

	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Sipil	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
3	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
4	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
5	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
1	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
	Pelayanan Pencatatan Sipil		
1	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan	

	<p>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</p> <p>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatandan Penyajian Database Kependudukan</p>	Sipil	
1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	<p>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p>		
1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	<p>Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan</p>		
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
3	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	

	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		
	Penyusunan Profil Kependudukan		
1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		
1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kecamatan Seunagan Timur	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Renstradan Renja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
	Administrasi Keuangan		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
3	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat,	

	Administrasi Umum	Gampong, P4	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Pemberdayaan Masyarakat,	

10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Gampong, P4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
12	Pengadaan Mebeleur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
	PROGRAM PENATAAN DESA		
	Penyelenggaraan Penataan Desa		
1	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	

	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		
	Fasilitasi Kerjasamaantar Desa		
1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
2	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa		
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
4	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
5	Pembinaan danPemberdayaanBUM DesadanLembaga KerjasamaantarDesa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	

6	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
2	Penyediaan Saranadan Prasarana Kelembagaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
	PERHUBUNGAN		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	
1	Penyusunan Renstradan Renja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	
	Administrasi Keuangan	Dinas Perhubungan	

1	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dinas Perhubungan	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Perhubungan	
	Administrasi Umum	Dinas Perhubungan	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Perhubungan	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perhubungan	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Perhubungan	
10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Perhubungan	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Dinas Perhubungan	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perhubungan	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Perhubungan	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas SumberDaya Aparatur		
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Dinas Perhubungan	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	Administrasi Keuangan		
1	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	Administrasi Umum		
1	Penyediaan JasaSuratMenyurat	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
13	Pengadaan Mebeleur	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	Pengelolaan Informasidan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
1	Monitoring Opinidan Aspirasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2	Pengelolaan Kontendan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
3	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan	

4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
1	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
1	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan perkoperasian	

1	<p>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan perkoperasian	
1	<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</p> <p>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan perkoperasian	
1	<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</p> <p>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</p> <p>Pendataan Potensidan Pengembangan Usaha Mikro</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan	

2	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	dan perkoperasian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan perkoperasian	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		
1	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan perkoperasian	
	PENANAMAN MODAL		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	Administrasi Keuangan		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu	
	Administrasi Umum		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Penanaman Modal dan	

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayana Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu	
11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Penanaman Modal dan	

12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pelayana Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan	
13	Pengadaan Mebeleur	Pelayana Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pelayana Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pelayana Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pelayana Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan	

	<p>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p> <p>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu</p> <p>Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah</p> <p>Kabupaten/Kota</p>	Pelayana Terpadu Satu Pintu	
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu	
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu	
3	Penyediaan Layanan Konsultasidan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu	
	<p>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</p> <p>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan</p> <p>Daerah Kabupaten/Kota</p>		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan	

	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayana Terpadu Satu Pintu	
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu	
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Renstradan Renja Perangkat Daerah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	Administrasi Keuangan		

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
Administrasi Umum			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	

8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
16	Pengadaan Mebeleur	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	

18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	Peningkatan Kapasitas Pemudadan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan			
1	Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahragayang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	

	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
2	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		
1	Seleksi Atlet Daerah	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
2	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
3	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		
1	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	

	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
1	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi (OTSUS)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
2	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
	STATISTIK		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika dan	

4	Membangun Meta data Statistik Sektoral	Statistik Dinas Perkebunan	
	PERSANDIAN		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	KEBUDAYAAN		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		

1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
1	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
2	Pendaya gunaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		
1	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	PERPUSTAKAAN		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		

	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip
	Administrasi Keuangan	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip
	Administrasi Umum	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip

5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
7	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
2	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
3	Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan Daerah dan	

4	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Arsip Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
2	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
3	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
KEARSIPAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Administrasi Keuangan			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
Administrasi Umum			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	

3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
4	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			
1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			
1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung /atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/			

	Kelurahan		
1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
	URUSAN PILIHAN		
	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
	Administrasi Keuangan		
1	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kelautan, Perikanan dan	

3	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pangan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
4	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
Administrasi Umum		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
3	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Kelautan, Perikanan dan

7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pangan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1	Pengadaan Mebel	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan

3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	

	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		
1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		

1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (OTSUS)	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			
1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
PARIWISATA			
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
1	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Pariwisata,	

	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemuda dan Olah Raga	
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		
1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
2	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
	PERTANIAN		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Renstradan Renja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Peternakan	
	Administrasi Keuangan		

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pertanian dan Peternakan
2	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pertanian dan Peternakan
4	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Dinas Pertanian dan Peternakan
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Administrasi Umum	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pertanian dan Peternakan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Pertanian dan Peternakan
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Pertanian dan Peternakan
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pertanian dan Peternakan
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pertanian dan Peternakan
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pertanian dan Peternakan
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian dan Peternakan
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Pertanian dan Peternakan
10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Pertanian dan Peternakan
11	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pertanian dan Peternakan

12	Pengadaan Mebeleur	Dinas Pertanian dan Peternakan	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Pertanian dan Peternakan	
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Dinas Pertanian dan Peternakan	
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pertanian dan Peternakan	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Pertanian dan Peternakan	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
Pengembangan Prasarana Pertanian			
1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Dinas Pertanian dan Peternakan	
2	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Dinas Pertanian dan Peternakan	
Pembangunan Prasarana Pertanian			
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Pertanian dan Peternakan	
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian dan Peternakan	

3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian dan Peternakan	
1	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian dan Peternakan	
1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Dinas Pertanian dan Peternakan	
2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Dinas Pertanian dan Peternakan	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		
1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Peternakan	
2	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Peternakan	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah		

	Kabupaten/Kota		
1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian dan Peternakan	
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian dan Peternakan	
3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	
	PERDAGANGAN		
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	
2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	
3	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	

	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota		
1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, TeraUlang, dan Pengawasan		
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	
	PERINDUSTRIAN		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	
	Administrasi Keuangan		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	
2	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	

4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	dan Perkoperasian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian
	Administrasi Umum	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perindustrian, Perdagangan

9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	dan Perkoperasian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	
11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	
14	Pengadaan Mebeleur	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil/Jabatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	

18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas SumberDaya Aparatur			
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian	
TRANSMIGRASI			
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pelatihan Transmigrasi lokal	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			

	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		
1	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		
	Administrasi Pemerintahan		
	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN		
	Layanan Administrasi DPRD		
1	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD	Sekretariat DPRK	
2	Fasilitasi Rapat DPRD	Sekretariat DPRK	
3	Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD	Sekretariat DPRK	
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRK	
	Layanan Keuangandan KesejahteraanDPRD		
1	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Sekretariat DPRK	
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekretariat DPRK	
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRK	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRK	

2	Pembahasan Rancangan Perda	Sekretariat DPRK	
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRK	
4	Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	Sekretariat DPRK	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		
1	pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRK	
2	pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Sekretariat DPRK	
3	Pembahasan APBD	Sekretariat DPRK	
4	Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRK	
5	Pembahasan Laporan Semester	Sekretariat DPRK	
6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRK	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRK	
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRK	
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRK	
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sekretariat DPRK	
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Sekretariat DPRK	
6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sekretariat DPRK	

7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sekretariat DPRK	
	Peningkatan Kapasitas DPRD		
1	Bimbingan Teknis DPRD	Sekretariat DPRK	
2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRK	
3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRK	
4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRK	
5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRK	
6	Penyusunan Program Kerja DPRD	Sekretariat DPRK	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Sekretariat DPRK	
2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sekretariat DPRK	
3	Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRK	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		
1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRK	
2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRK	
	Pembahasan Kerja Sama Daerah		
1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Sekretariat DPRK	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRK	

2	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRK	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	Administrasi Tata Pemerintahan		
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sekretariat Daerah	
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	
	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah	
2	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah	
3	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Sekretariat Daerah	
	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah	
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah	
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sekretariat Daerah	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		

1	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	
	Administrasi Pembangunan		
1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Sekretariat Daerah	
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekretariat Daerah	
3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah	
	Pengadaan Barang dan Jasa		
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sekretariat Daerah	
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	
	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam		
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Sekretariat Daerah	
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		
	Penataan Organisasi		
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah	
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah	
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	
	Protokol dan Komunikasi Pimpinan		

1	Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat Daerah	
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Sekretariat Daerah	
	Perencanaan dan Keuangan		
1	Pengelolaan Perencanaan	Sekretariat Daerah	
2	Pengelolaan Keuangan	Sekretariat Daerah	
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat Daerah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Beutong	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Beutong	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Beutong	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Kecamatan Beutong	

	Kecamatan		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Beutong	
	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Kecamatan Beutong	
	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam		
1	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Kecamatan Beutong	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Seunagan Timur	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Suka Makmue	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		

1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kecamatan Suka Makmue	
1	Pelaksanaan Konsultasi Publik PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Suka Makmue	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Kecamatan Kuala	
1	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kuala	
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kuala	
2	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Kuala	

	<p>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan</p>		
1		Kecamatan Kuala Pesisir	
	<p>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <p>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan</p>		
1		Kecamatan Kuala Pesisir	
	<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</p> <p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p>		
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Kuala Pesisir	
2	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Kuala Pesisir	
	<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p>		
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kuala Pesisir	
	<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p>		

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Darul Makmur	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Darul Makmur	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Darul Makmur	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Darul Makmur	
	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH		
	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran		
1	Pelaksanaan MTQ	Kecamatan Darul Makmur	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		

1	<p>Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa</p> <p>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>KoordinasiPerencanaanPembangunanDaerah</p>	Kecamatan Tadu Raya	
1	<p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,RPJMDdanRKPD) Tingkat Kecamatan</p> <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p>	Kecamatan Tripa Makmur	
1	<p>Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan</p> <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANUMUM</p> <p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p>	Kecamatan Tripa Makmur	
1	<p>Pelaksanaan TugasForum KoordinasiPimpinan diKecamatan</p> <p>PROGRAM PERENCANAAN ,PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</p>	Kecamatan Tripa Makmur	
1	<p>Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan</p>	Kecamatan Tripa Makmur	

	Dokumen Kebijakan Lainnya		
	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH		
	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran		
1	Pelaksanaan MTQ	Kecamatan Tripa Makmur	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
1	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang	

	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
1	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang	
	PENGAWASAN		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
1	Audit Kinerja dan Keuangan	Inspektorat Kabupaten	
2	Review Kinerja dan Keuangan	Inspektorat Kabupaten	
3	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Inspektorat Kabupaten	
4	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kabupaten	
5	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kabupaten	
6	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Kabupaten	
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kabupaten	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
	Asistensi dan Pendampingan		
1	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Inspektorat Kabupaten	

PERENCANAAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Renstradan Renja Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Administrasi Keuangan		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Administrasi Umum		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
14	Pengadaan Mebeleur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

6	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		
4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		

	DAERAH	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		
Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan		
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMI ANDAN SUMBER DAYA ALAM	

	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian		
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif		
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam		
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,	Badan Perencanaan Pembangunan	

2	RPJMD dan RKPD) Bidang SumberDaya Alam Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang SumberDaya Alam	Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang SumberDaya Alam PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SumberDaya Air dan Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

2	RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan		
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	KEUANGAN		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Renstradan Renja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan	

	Administrasi Keuangan	Daerah	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
4	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
5	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Administrasi Umum		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	

3	Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
6	Penyediaan AlatTulis Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
7	Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
8	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
9	Penyediaan Makanan danMinuman	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
11	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
14	Pengadaan Mebeleur	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
1	Penyusunan KUA dan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
2	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3	Penyusunan dan Review RKASKPD/Perubahan RKA SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
4	Penyusunan dan Review DPASKPD/Perubahan DPASKPD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
5	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
6	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
7	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
8	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Badan Pengelolaan Keuangan	

10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
12	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
13	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
14	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
15	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
17	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
18	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

19	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
2	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
4	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
5	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
6	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
7	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	

	Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	
8	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
9	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban(SPJ)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
6	PenyusunanTanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

7	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
11	Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Kegiatan Penunjang Urusan		
1	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		
1	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	

2	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
4	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
6	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
7	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
8	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
9	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
10	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
11	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan

12	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah			
1	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
2	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
4	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
5	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
6	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
7	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Badan Pengelolaan Keuangan	

8	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
9	Pemeriksaan Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
10	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
KEPEGAWAIAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Renstradan Renja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
Administrasi Keuangan			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
3	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	

4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	Administrasi Umum		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	

9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
12	Pengadaan Mebeleur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
Pengelolaan Data dan Informasi ASN			
1	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
2	Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
4	Pengelolaan Data Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
Administrasi Kepegawaian			
1	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
2	Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kepangkatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
3	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
4	Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN	Badan Kepegawaian dan	

5	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengembangan SDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	Peningkatan Kapasitas ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
1	Peningkatan Kapasitas ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
2	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	Pengembangan Karir ASN		
1	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
2	Evaluasi Pemberhentian ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	

4	Pengelolaan Data Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
	Mutasi dan Promosi ASN	
1	Pengelolaan MutasiASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
2	PengelolaanKenaikan PangkatASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3	PengelolaanPromosiASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
	Pengembangan Kompetensi ASN	
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
2	PengelolaanPendidikanLanjutanASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan	

2	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
4	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Adapun peraturan – peraturan terkait dengan penyusunan laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal baik Bidang Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta Urusan Sosial adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Sosial No. 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Intensitas dan Beban Kerja Urusan Pemerintah Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
8. Peraturan Menteri Sosial No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
14. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
19. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya;
20. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
21. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 069/578/TAPEM/2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (%)	69,18	69,31	0,18
2	Angka Kemiskinan (%)	17,7	18,23	2,99
3	Angka Pengangguran (%)	5,11	4,99	-2,34
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,36	5,34	58,92
5	Pendapatan Per kapita (juta rupiah)	45,12	53,83	19,30
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,275	0,257	-6,54

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

	Urusan Pemerintahan			Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	K e t
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	1	1)	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	Swasta = 11	Dinas Pendidikan	
			2)	Jumlah peserta didik PAUD Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak Ada	Dinas Pendidikan	
			3)	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Tidak Ada	Dinas Pendidikan	
			4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Tidak Ada	Dinas Pendidikan	
			5)	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	473 Negeri = 9 Swasta = 464	Dinas Pendidikan	
			6)	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	300 Paud Negeri: S1 = 8 Paud Swasta: S1 = 236 Total = 244 Guru bersertifikat profesi guru: Paud Negeri = 1 Paud swasta = 55 Total = 56	Dinas Pendidikan	
			7)	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan	75 Paud Negeri = 1	Dinas Pendidikan	

			Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	Paud Swasta = 74		
2	1)	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		168 SDN Terakreditasi A= 8 B= 86 C= 35 Total = 133 SMPN Terakreditasi A= 7 B= 23 C= 5 Total= 35	Dinas Pendidikan	
	2)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Tidak Ada	Dinas Pendidikan	
	3)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Tidak Ada	Dinas Pendidikan	
	4)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		14.817	Dinas Pendidikan	
	5)	Jumlah peserta didik		5.226	Dinas Pendidikan	

		pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan			
	6)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	300	Dinas Pendidikan	
	7)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	120	Dinas Pendidikan	
	8)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.488	Dinas Pendidikan	
	9)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	639	Dinas Pendidikan	
	10)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	250	Dinas Pendidikan	
	11)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	97	Dinas Pendidikan	
	12)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	204	Dinas Pendidikan	
	13)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	98	Dinas Pendidikan	

		14	Jumlah pendidik pada) jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	D IV- S1 = 1.248 Serdik= 404	Dinas Pendidikan	
		15	Jumlah pendidik pada) jenjang sekolah menengah pertama(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	D IV- S1 = 579 Serdik= 158	Dinas Pendidikan	
		16	Jumlah kepala sekolah) pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	D IV- S1 = 137 Serdik= 125 Cakep = 125	Dinas Pendidikan	
		17	Jumlah kepala sekolah) pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	D IV- S1 = 40 Serdik= 35 Cakep = 34	Dinas Pendidikan	
		18	Jumlah tenaga) penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	97	Dinas Pendidikan	
		19	Jumlah tenaga	65	Dinas Pendidikan	

) penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			
		4	1) Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	2 Negeri = 1 Swasta = 2	Dinas Pendidikan	
			2) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak Ada	Dinas Pendidikan	
			3) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Tidak Ada	Dinas Pendidikan	
			4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Tidak Ada	Dinas Pendidikan	
			5) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	112 Negeri = 14 Swasta = 98	Dinas Pendidikan	
			6) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	74 Negeri = 11 Swasta = 63	Dinas Pendidikan	
			7) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki	D IV- S1 = 137 Serdik= 125 Cakep = 125	Dinas Pendidikan	

				ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
			8)	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	9 Negeri = 1 Swasta = 8	Dinas Pendidikan	
2	Kesehatan	1	1)	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1 RS	Dinas Kesehatan	
		2	1)	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1 RS	Dinas Kesehatan	
		3	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Buku KIA: 2.922 Tablet Tambah Darah: 2.922 Vaksin tetanus difetri: 2.922 Kartu Ibu/ Rekam medis Ibu: 2.922 Total: 14.610	Dinas Kesehatan	
			2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Jumlah Tenaga Bidan: 376 Jumlah Tenaga Dokter : 27 Jumlah Dokter Spesialis Kebidanan: 9 Total: 406	Dinas Kesehatan	
		4	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Kartu Ibu (Rekam medis ibu) : 2.731 Buku KIA: 2.731 Formulir Photograf: 2.731 Total: 8.193	Dinas Kesehatan	
			2)	Jumlah SDM kesehatan	Jumlah Tenaga	Dinas Kesehatan	

			untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Bidan: 376 Jumlah Tenaga Dokter : 27 Jumlah Dokter Spesialis Kebidanan: 3 Total: 406		
	5	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Vaksin hepatitis BO: 2.734 Vitamin K1 injeksi: 2.734 Salep/teets mata antibiotik: 2.734 Formulir bayi baru lahir: 2.734 Formulir MTBM: 2.734 Buku KIA: 2.734 Total: 16.404	Dinas Kesehatan	
		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Jumlah Tenaga Bidan: 376 Jumlah Tenaga Dokter : 27 Jumlah Dokter Spesialis Anak: 2 Total: 405	Dinas Kesehatan	
	6	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Kuisisioner pra skrining perkembangan (KPSP) atau instrument standar lain yang berlaku: 10.294 Formulir DDTK: 10.294 Buku Kia: 10.294 Vitamin A biru: 2.458 Vitamin A merah: 8.334 Vaksin Imunisasi lanjutan: *DPT-HB-Hib* Campak Rubella: 518 Jarum suntik dan BHP: 518 Total: 32.472	Dinas Kesehatan	
		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai	Jumlah Tenaga Bidan: 376 Jumlah Tenaga	Dinas Kesehatan	

			standar	Dokter : 27 Total: 403		
	7	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Buku raport kesehatan: 1.767 Buku pemantuan kesehatan: 1.767 Kuesioner skrining kesehatan rubella: 1.767 Total: 5.301	Dinas Kesehatan	
		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah Tenaga Bidan/Perawat: 14 Jumlah Tenaga Dokter : 27 Jumlah tenaga Gizi: 14 Total: 55	Dinas Kesehatan	
	8	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Strip uji pemeriksaan: 14 Gla darah: 14 Kolesterol: 14 Pedoman dan media KIE: 14 Alat ukur BB: 14 Total: 70	Dinas Kesehatan	
		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Tenaga Bidan: 35 Jumlah Tenaga Dokter : 27 Jumlah Tenaga sarjana kesehatan masyarakat: 5 Perawat : 7 Total: 74	Dinas Kesehatan	
	9	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Foemulir pencatatan dan pelaporan aplikasi system Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM): 74.991 Pedoman dan Media KIE: 14 Alat ukur BB: 14 Alat ukur TB: 14	Dinas Kesehatan	

				Alat ukur Lingkar perut: 14 Total: 75.047		
			2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Tenaga Bidan: 67 Jumlah Tenaga Dokter : 27 Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat: 5 Total: 99	Dinas Kesehatan	
		10	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	22 logistik kesehatan	Dinas Kesehatan	
			2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	80 SDM kesehatan	Dinas Kesehatan	
		11	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	22 logistik kesehatan	Dinas Kesehatan	
			2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	80 SDM kesehatan	Dinas Kesehatan	
		12	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 paket	Dinas Kesehatan	
			2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	80 SDM kesehatan	Dinas Kesehatan	
		13	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12.921 logistik kesehatan	Dinas Kesehatan	
			2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	80 SDM kesehatan	Dinas Kesehatan	
		14	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	33 logistik kesehatan	Dinas Kesehatan	
			2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	80 SDM kesehatan	Dinas Kesehatan	
3.	Pekerjaan Umum	1	1) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	17.165 Ha	Dinas PUPR	
			2) Panjang sungai di	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	

			kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)			
		3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	2	1)	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer}} \times 100\%$ 71,06%	Dinas PUPR	
		2)	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder (m)}} \times$	Dinas PUPR	

				100%		
				69,37%		
		3)	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier}} \times 100\%$ 67,69%	Dinas PUPR	
	3	1)	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		2)	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		3)	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		4)	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		5)	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Tidak Ada	Dinas PUPR	
	4	1)	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		2)	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		3)	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah	Tidak Ada	Dinas PUPR	

		untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T			
	4)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak Ada	Dinas PUPR	
	5)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Tidak Ada	Dinas PUPR	
	6)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Tidak Ada	Dinas PUPR	
	7)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas PUPR	
	8)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas PUPR	
	9)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDT}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas PUPR	
	10)	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD - S}} \times 100\%$	Dinas PUPR	

				Tidak Ada		
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas PUPR	
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas PUPR	
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\sum \text{rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\sum \text{jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas PUPR	
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan tangki septiknya sudah disedot}}{\sum \text{wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas PUPR	
	6	1)	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\sum \text{jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\sum \text{jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}}$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas PUPR	
		2)	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		3)	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		4)	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Tidak Ada	Dinas PUPR	

			5)	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Tidak Ada	Dinas PUPR	
			6)	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Tidak Ada	Dinas PUPR	
			7)	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	Tidak Ada	Dinas PUPR	
			8)	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		7	1)	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	924.421 m	Dinas PUPR	
			2)	Panjang jalan yang dibangun	38.415 m	Dinas PUPR	
			3)	Panjang jembatan yang dibangun	126,70 m	Dinas PUPR	
			4)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	60.548 m	Dinas PUPR	
			5)	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Tidak Ada	Dinas PUPR	
			6)	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	2.032 m	Dinas PUPR	
			7)	Panjang jembatan yang direhabilitasi	90 m	Dinas PUPR	
			8)	Panjang jalan yang dipelihara	18.523 m	Dinas PUPR	
			9)	Panjang jembatan yang dipelihara	343 m	Dinas PUPR	

		8	1)	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/ teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas PUPR			
			2)	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas PUPR			
			3)	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas PUPR			
					4)	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Tidak Ada	Dinas PUPR	
					5)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Tidak Ada	Dinas PUPR	
					6)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak Ada	Dinas PUPR	
					7)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak Ada	Dinas PUPR	
					8)	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya	Tidak Ada	Dinas PUPR	

			yang sudah dan sedang dilakukakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala			
		9)	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		10)	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		11)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		12)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		13)	Tersedianya data dan	Tidak Ada	Dinas PUPR	

) informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota			
		14) Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		15) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		16) Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		17) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		18) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		19) Jumlah usaha	Tidak Ada	Dinas PUPR	

) perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota			
		20) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		21) Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		22) Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		23) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		24) Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		25) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	Dinas PUPR	

4	Perumahan Rakyat	1	1)	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Tidak Ada	Dinas Perkim	
			2)	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Tidak Ada	Dinas Perkim	
			3)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Tidak Ada	Dinas Perkim	
			4)	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada	Dinas Perkim	
			5)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada	Dinas Perkim	
			6)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada	Dinas Perkim	
			7)	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak Ada	Dinas Perkim	
			8)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Tidak Ada	Dinas Perkim	
			9)	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Tidak Ada	Dinas Perkim	
		2	1)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dinas Perkim	
			2)	Jumlah rumah tangga		Dinas Perkim	

			penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada		
		3)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dinas Perkim	
		4)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dinas Perkim	
		5)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dinas Perkim	
		6)	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Tidak Ada	Dinas Perkim	
	3	1)	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	97,83 Ha	Dinas Perkim	
		2)	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Tidak Ada	Dinas Perkim	
		3)	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Tidak Ada	Dinas Perkim	
	4	1)	Jumlah rumah di kab/kota	Tidak Ada	Dinas Perkim	
		2)	Jumlah unit PK RTLH	Tidak Ada	Dinas Perkim	

			3)	Jumlah rumah tidak layak huni	Tidak Ada	Dinas Perkim	
			4)	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Tidak Ada	Dinas Perkim	
			5)	Rasio rumah dan KK	Tidak Ada	Dinas Perkim	
			6)	Jumlah rumah pembangunan baru	Tidak Ada	Dinas Perkim	
		5	1)	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Tidak Ada	Dinas Perkim	
			2)	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Tidak Ada	Dinas Perkim	
			3)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Tidak Ada	Dinas Perkim	
			4)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Tidak Ada	Dinas Perkim	
			5)	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Tidak Ada	Dinas Perkim	
			6)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Tidak Ada	Dinas Perkim	
			7)	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Tidak Ada	Dinas Perkim	
			8)	Jumlah pengembang yang terregistrasi	Tidak Ada	Dinas Perkim	
			9)	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Tidak Ada	Dinas Perkim	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	1)	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Pelanggaran : 62 Pengaduan : 184	Satpol PP dan WH	
			2)	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	985	Satpol PP dan WH	
			3)	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3	Satpol PP dan WH	
			4)	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1	Satpol PP dan WH	

			5)	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	2	Satpol PP dan WH	
			6)	Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada 84	Satpol PP dan WH	
		3	1)	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$ <p>0/Tidak Ada Penyelesaian dokumen pada tahun 2021</p>	BPBD	
			2)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100\%$ $\frac{64.445}{168.392} \times 100\% = 38,27\%$	BPBD	
		4	1)	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada Data</p>	BPBD	
			2)	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada Data</p>	BPBD	
			3)	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana}}$	BPBD	

					x 100%		
					Tidak Ada Data		
			4)	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	BPBD	
					Tidak Ada Data		
			5)	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	BPBD	
					Tidak Ada Data		
			6)	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	BPBD	
					Tidak Ada Data		
		5	1)	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100\%$	BPBD	
					Tidak Ada Data		
			2)	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$	BPBD	
					Tidak Ada Data		
			3)	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$	BPBD	
					$\frac{65}{103} \times 100\%$		
					63,1%		
			4)	Persentase jumlah		BPBD	

			korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}} \times 100\%$ $\frac{8436}{16059} \times 100\% = 52,53\%$		
	6	1)	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Tidak Ada Data	BPBD	
		2)	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada 3 <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Darul Makmur • Kecamatan Seunagan Timur • Kecamatan Kuala 	BPBD	
		3)	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada di ketiga kantor Kecamatan	BPBD	
		4)	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Tidak Ada Data	BPBD	
		5)	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	28 Unit <ul style="list-style-type: none"> • Mobil pemadam kebakaran 7 unit • Baju anti api 7 unit • Alat pemadam api ringan (APAR) 7 unit • Mesin gendong karhutla 4 unit 	BPBD	
		6)	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam	Tidak Ada Data	BPBD	

				sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran			
			7)	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Tidak Ada Data	BPBD	
			8)	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Tidak Ada Data	BPBD	
6	Urusan Sosial	1	1)	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Tidak ada	Dinas Sosial	
			2)	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Tidak ada	Dinas Sosial	
			3)	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Tidak ada	Dinas Sosial	
			4)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang dijangkau	Tidak ada	Dinas Sosial	
			5)	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Tidak ada	Dinas Sosial	
			6)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak	Tidak ada	Dinas Sosial	

			terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi			
		7)	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Tidak ada	Dinas Sosial	
		8)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang menerima paket sandang	Tidak ada	Dinas Sosial	
		9)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang memanfaatkan alat bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar (0), anak terlantar (0), lanjut usia terlantar (0) dan gelandangan pengemis (0), Penyandang disabilitas (84)	Dinas Sosial	
		10)	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Tidak ada	Dinas Sosial	
		11)	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Tidak ada	Dinas Sosial	
		12)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Tidak ada	Dinas Sosial	
		13)	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Tidak ada	Dinas Sosial	

			14	Jumlah pekerja sosial) professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	58 Orang	Dinas Sosial	
			15	Jumlah penyandang) disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Tidak ada	Dinas Sosial	
			16	Jumlah bimbingan sosial) yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Tidak ada	Dinas Sosial	
			17	Jumlah penyandang) disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Tidak ada	Dinas Sosial	
			18	Jumlah penyandang) disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Tidak ada	Dinas Sosial	
			19	Jumlah penyandang) disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran	Tidak ada	Dinas Sosial	

				keluarga			
			20	Jumlah penyandang) disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang direunifikasi dengan keluarga	Tidak ada	Dinas Sosial	
			21	Jumlah penyandang) disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang dirujuk	Tidak ada	Dinas Sosial	
		2	1)	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	6.120 Korban yang mendapatkan makanan	Dinas Sosial	
			2)	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	6.120 Korban yang menerima paket sandang	Dinas Sosial	
			3)	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Tidak ada	Dinas Sosial	
			4)	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	18 orang	Dinas Sosial	
			5)	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Tidak ada	Dinas Sosial	
			6)	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	58 Orang	Dinas Sosial	
7	Ketenagakerjaan	1	1)	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Mengidentifikasi/membandingkan dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
			2)	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam	$\frac{\text{realisasi indikator} - \text{target indikator}}{\text{realisasi}} \times$	Dinas Transmigrasi dan Tenaga	

			rencana tenaga kerja	100% Tidak Ada	Kerja	
		3)	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	2	1)	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{\text{Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNl atau okupasi pada tahun } n}{\text{keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun } n} \times 100\%$ Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2)	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun } n}{\text{jumlah instruktur seluruhnya pada tahun } n} \times 100\%$ Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		3)	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{\text{Jumlah instruktur pada tahun } n}{\text{jumlah peserta pelatihan pada tahun } n}$ Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		4)	Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun } n}{\text{jumlah seluruh LPK pada tahun } n} \times 100\%$ Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		5)	Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun } n}{\text{jumlah LPK yang terdata pada tahun } n} \times 100\%$ $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		6)	Jumlah penganggur yang dilatih	Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		7)	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pada tahun } n}{\text{jumlah orang yang dilatih pada tahun } n} \times 100\%$ Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	

			8)	Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun } n}{\text{jumlah lulusan pada tahun } n} \times 100\%$ Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
			9)	Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun } n}{\text{Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun } n} \times 100\%$ Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
			10)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\sum \text{CPMI dilatih}}{\sum \text{CPMI terdaftar}} \times 100\%$ Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
			11)	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		3	1)	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun } n} \times 100\%$ Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
			2)	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi – (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja) Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		4	1)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih}} \times 100\%$ $\frac{17}{63} \times 100\% = 26,98\%$	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
			2)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB}} \times 100\%$ $\frac{6}{8} \times 100\% = 75\%$	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
			3)	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar	8 Perusahaan yang ada Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	

			perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		
		4)	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah}}{\text{jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		5)	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan}}{\text{jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor}} \times 100\%$ <p>$\frac{52}{25} \times 100\% = 208\%$</p>	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		6)	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang berselisih}}{\text{jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada Data</p>	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		7)	Jumlah mogok kerja	Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		8)	Jumlah penutupan perusahaan	Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		9)	Jumlah perselisihan kepentingan	Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		10)	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		11)	Jumlah perselisihan PHK	Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		12)	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	12 Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		13)	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui	Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

			perundingan bipartite		Kerja
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Ada 1 Peraturan Nomor 560/231/kpts/2020 yang menganut tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit kabupaten Nagan Raya Periode 2020-2023	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} \times 100\%$ Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	5	1)	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		2)	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	158 Pencari Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3)	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		4)	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		5)	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		6)	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		7)	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		8)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui	Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

				Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		Kerja	
			9)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\sum \text{CPM atau CTKI yang mendapatkan sosialisasi}}{\sum \text{CPMI atau CTKI}} \times 100\%$ Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
			10)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
			11)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\sum \text{Fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\sum \text{PMI yang dipulangkan}} \times 100\%$ Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
			12)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
			13)	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\sum \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\sum \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya}} \times 100\%$ Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
			14)	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\sum \text{LTSA yang terbaik}}{\text{Jumlah daerah kantong}} \times 100\%$ Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1	1)	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	13 SKPK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
			2)	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui	1 Kali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	

			analisis gender di tingkat kabupaten/kota			
	2	1)	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1 Dengan PWI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
		2)	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	5 terdiri dari : Unit PPA Polres, Kejaksaan Negeri, Mahkamah Syariah, Bapas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
		3)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{\text{jumlah korban kekerasan anak yang dilayani}}{\text{jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten}} \times 100\%$ $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
		4)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan KHA	35 seluruh SKPK telah dilatih Konvensi Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
		5)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Tidak Ada	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
	3	1)	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	2 Organisasi yaitu Puji Center dan Gradasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
		2)	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Tidak Ada	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
		3)	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang	2 Jumlah lembaga layanan perempuan yaitu Puji Center dan Gradasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	

			mendapat pelatihan			
			4) Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
			5) Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Tidak Ada	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
			6) Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	Unit PPA Polres, Kejaksaan negeri, Pengadilan Negeri, Mahkamah Syariah, Bapas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
			7) Kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani}}{\text{jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten}} \times 100\%$ $\frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
9	Pangan	1	1) Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Tidak ada	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
			2) Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Tidak ada	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
			3) Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
			4) Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi	Ada (13)	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	

			seimbang		
			5) Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada (1)	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
			6) Tertanganinya kerawanan pangan	Tidak ada	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
			7) Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak ada	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
			8) Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada (11)	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
10	Pertanahan	1	1) SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan} + \text{jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun}} \times 100\%$ $\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pertanahan
			2) SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	$\frac{\text{Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee}}{\text{Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada Data</p>	Dinas Pertanahan
			3) SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	$\frac{\text{Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee}}{\text{Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada Data</p>	Dinas Pertanahan
			4) Dokumen Izin membuka tanah	$\frac{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang diproses penerbitannya}}{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 t}}$	Dinas Pertanahan

					x 100%		
					Tidak Ada Data		
			5)	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik}}{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pertanahan	
					Tidak Ada Data		
11	Lingkungan Hidup	1	1)	Hasil perhitungan provinsi terhadap : Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH)	<ul style="list-style-type: none"> • IKA = 56,67 • IKU = 94,95 • ITH = 0 	Dinas Lingkungan Hidup	
		2	1)	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Tersedia	Dinas Lingkungan Hidup	
		3	1)	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah/kota	$\frac{\text{Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota}}{\text{jumlah usulan permohonan yang teregistrasi}} \times 100\%$ $\frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup	
			2)	Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah PPLHD yang ada}}{\text{jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup	
			3)	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	$\frac{\text{Jmlh MHA yg diakui}}{\text{jmlh usulan MHA}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup	
			4)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat	$\frac{\text{Jmlh MHA yg mendapatkan pel}}{\text{jmlh MHA yg ada}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup	

				hukum adat terkait PPLH	Tidak Ada Data		
			5)	Jumlah kemasyarakatan yang diberikan diklat	$\frac{\text{Jmlh lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat}}{\text{target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada Data</p>	Dinas Lingkungan Hidup	
			6)	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yg ditangani}}{\text{total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$ $\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1)	Penerbitan akta perkawinan	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perkawinan yang diterbitkan}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			2)	Penerbitan akta perceraian	$\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perceraian yang diterbitkan}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			3)	Penerbitan akta kematian	$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa kematian yang diterbitkan}} \times 100\%$ $\frac{2827}{2827} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			4)	Penyajian data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupate kota dalam satu tahun}}{\text{2 tahun}} \times 100\%$ $\frac{108}{216} \times 100\% = 50\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	222 Gampong	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	
			2)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun	$10 - 0 = 10$ <p>Kerjasama antar desa</p>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4	

			sebelumnya		
			3) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	11 Lembaga Yaitu: Kemasyarakatan (Bumdes, PKK, Karang Taruna, BKD, LPMD, Linmas, Kepemudaan, Posyandu, Posbindu, dan MAA, Keujrun Blang)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4
			4) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	222 Gampong	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	1) Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada (1)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4
			2) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia kawin pertama wanita usia 25-49 tahun adalah di usia 25-29 tahun dengan jumlah jiwa perempuan adalah 4.463 perempuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4
			3) Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ $\frac{4.124}{13.334} \times 1000 = 309,28$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4

			4)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)}}{\text{jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)}} \times 100\%$ $\frac{57.672}{84.682} \times 100\% = 68.10\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4
			5)	Yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4
			1)	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah faskes}} \times 100\%$ $\frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4
			2)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$ $\frac{389}{13.992} \times 100\% = 2,78\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4
			3)	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	25 Jumlah kelompok kerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4
			4)	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100\%$ $\frac{594}{2.376} \times 100\% = 25\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4
		3	1)	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	1 desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4
			2)	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI}}{\text{jumlah keluarga PBI}} \times 100\%$ 100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, P4

					$\frac{11.448}{22.331} \times 100\% = 51,26\%$		
15	Perhubungan	1	1)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	$\frac{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Perhubungan	
			2)	Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang diuji per tahun}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Perhubungan	
			3)	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{\text{Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan}}{\text{Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten atau Kota}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Perhubungan	
			4)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Provinsi}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan Provinsi}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Perhubungan	
		2	1)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Perhubungan	
16	Komunikasi dan Informatika	1	1)	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$ <p>$\frac{14}{44} \times 100\% = 31,81\%$</p>	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			2)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses	$\frac{14}{44} \times 100\% = 31,81\%$ <p>Akses internet</p>	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

			internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	berkualitas: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% • Tingkat ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) • Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps) 		
		3)	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Terdapat dua OPD yaitu Sekretariat Daerah dan Bappeda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	2	1)	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015}}{\text{Jumlah Kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah}} \times 100\%$ $\frac{40}{133} \times 100\% = 30,07\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		2)	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$ $\frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

			3)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$ <p>Aplikasi Umum</p> $\frac{5}{44} \times 100\% = 11,36$ <p>Aplikasi Khusus</p> $\frac{51}{44} \times 100\% = 115,90$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
			4)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{\text{Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$ $\frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
			5)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{\text{Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$ $\frac{1}{44} \times 100\% = 2,27\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
			6)	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah sistem elektronik}} \times 100\%$ <p>Belum Pernah Mendaftarkan</p>	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
			7)	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi}} \times 100\%$ $\frac{3}{44} \times 100\% = 6,81\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

			8)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$ $\frac{1}{44} \times 100\% = 2,27\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			9)	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$ $\frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			10)	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$ $\frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			11)	Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{\text{Jumlah data yang dapat berbagi pakai}}{\text{Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah}} \times 100\%$ $\frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			12)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$ $\frac{21}{44} \times 100\% = 47,72\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			13)	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas ko}}{\text{Jumlah ASN Pengelola TIK}} \times 100\%$ <p>Belum Ada</p>	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			14)	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Terdapat 3 peraturan yaitu Rencana Induk SPDE Perbup e-Kinerja Perbup SDI	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	3	1)		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan	$\frac{\Sigma \text{ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{\Sigma \text{ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi}}$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

				pemerintah dan pemerintah provinsi	$\frac{3}{6} \times 100\% = 50\%$ <p>Terdapat 6 Komunitas Masyarakat/ Mitra Strategis yaitu: KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos.</p>		
			2)	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\sum \text{konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{\sum \text{konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi}} \times 100\%$ $\frac{642}{642} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			3)	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{\sum \text{Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP}}{\sum \text{Diseminasi dan layanan Informasi Publik}} \times 100\%$ $\frac{141}{1} \times 100\% = 14100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	1)	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam}} \times 100$ <p>Tidak Ada Data</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
			2)	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}} \times 100\%$	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	

			keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Tidak Ada Data		
		3)	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{22}{143} \times 100\% = 15,38\%$	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
		4)	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{10}{143} \times 100\% = 6,99\%$	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
		5)	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{37}{143} \times 100\% = 25,9\%$	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
		6)	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian}}{\text{Jumlah anggota koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{47}{143} \times 100\% = 32,9\%$	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
		7)	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
		8)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Tidak Ada	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
		9)	Persentase fasilitasi		Dinas Perindustrian,	

			penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Perdagangan, dan Perkoperasian	
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
		13	Diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
	2	1)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru berskala mikro	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100\%$ $\frac{304}{7.131} \times 100\% = 4,26$	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
		2)	Persentase jumlah usaha		Dinas Perindustrian,	

				mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$ $\frac{55}{7.131} \times 100\% = 0,77\%$	Perdagangan, dan Perkoperasian	
			3)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang bermitra}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
			4)	Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk}} \times 100\%$ $\frac{19}{1.209} \times 100\% = 1,57\%$	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
			5)	Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
			6)	Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$ $\frac{418}{7.131} \times 100\% = 5,86$	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
			7)	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendamping	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$ $\frac{349}{7.131} \times 100\% = 4,89$	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
18	Penanaman Modal	1	1)	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

			2) Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak Ada Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			3) Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak Ada Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			4) Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Tidak Ada Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			5) Kegiatan pameran penanaman modal	Tidak Ada Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			6) Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak Ada Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			7) Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	59	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			8) Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	114	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			9) Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 2.384.330.448.446	Dinas Penanaman Modal dan	

						Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	44	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	49	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	1)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
			2)	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2	1)	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
			2)	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		3	1)	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan	20 <ul style="list-style-type: none"> • Pelatih Bola Voli : 2 • Pelatih Bola Kaki : 6 • Pelatih Tarung derajat : 1 • Pelatih Tinju : 1 	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	

				<ul style="list-style-type: none"> • Pelatih Silat : 2 • Pelatih Tenis Meja : 2 • Pelatih Panahan : 1 • Pelatih Bulu Tangkis : 3 • Pelatih Takraw : 2 		
			2)	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	1 (Kegiatan Prapora)	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
20	Statistik	1	1)	Tersedianya buku profil daerah	Belum Tersedia	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik
			2)	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Survei yang dilakukan 4 kali	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik
			3)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Ada 4	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik
			4)	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Belum Ada	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik
			5)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Belum Ada	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik
			6)	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\%$ $\frac{1}{3} \times 100\% = 33,33\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik
			7)	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\%$ $\frac{139}{500} \times 100\% = 27,8\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik
21	Persandian	1	1)	Pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100\%$ $\frac{6}{10} \times 100\% = 60\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik

			2)	Menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100\%$ <p>Belum Ada Sistem Elektronik, baru akan dilaksanakan TTE.</p>	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik	
			3)	Sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{\text{Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100\%$ <p>Belum Ada</p>	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik	
			4)	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah titik teramankan}}{\text{Jumlah titik pada PHKS}} \times 100\%$ <p>$\frac{14}{44} \times 100\% = 31,81\%$</p>	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik	
22	Kebudayaan	1	1)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
			2)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
			3)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	

			kesejahteraan masyarakat)		
		4)	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		5)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		6)	Kabupaten/Kota (pemugaran)	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		7)	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		8)	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		9)	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		10)	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		11)	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

				prasarana museum			
			12) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
			13) Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
			14) Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
			15) Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
			16) Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
			17) Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
			18) Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
			19) Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
23	Perpustakaan	1	1)	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$ $\frac{39.629}{167.294} \times 100\%$ $= 23,7\%$	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
			2)	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya}} \times 100\%$	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	

				$\frac{3.827}{167.294} \times 100\%$ = 2,29%		
			3)	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$ $\frac{8}{167.294} \times 100\%$ = 0,004%	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip
			4)	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan}}{\text{Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya}} \times 100\%$ Tidak Ada	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip
			5)	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	4 pemasyarakatan	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip
		2	1)	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Tidak Ada	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip
			2)	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Tidak Ada	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip
			3)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Tidak Ada	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip
24	Kearsipan	1	1)	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip aktif}} \times 100\%$ $\frac{351}{351} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip
			2)	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip inaktif}} \times 100\%$ $\frac{64}{100} \times 100\% = 64\%$	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip

			3)	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$\frac{\text{Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik}}{\text{Jumlah seluruh arsip statis}} \times 100\%$ $\frac{110}{230} \times 100\% = 47,8\%$	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
			4)	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Tidak Ada	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
		2	1)	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Tidak Ada	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
			2)	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	3 Dokumen	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
			3)	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	2 Dokumen	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
			4)	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	46 Dokumen	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
			5)	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	221 Dokumen	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
			6)	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang	Tidak Ada	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	

				disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK			
25	Perikanan	1	1)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	40	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
			2)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten Kota}} \times 100\%$ $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
			3)	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	1 Rekomendasi	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
			4)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	15	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
			5)	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	265.300 ekor	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
26	Pariwisata	1	1)	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
			2)	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	145 • Hotel/ Wisma / Losmen : 4 • Rumah Makan/ Restoran : 116 • Warung Kopi/ Café : 23	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	

				<ul style="list-style-type: none"> • Mushalla Tempat Wisata : 1 • MCK Tempat Wisata : 1 		
			3)	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			4)	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			5)	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			6)	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			7)	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			8)	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}} \times 100\%$ Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			9)	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan}}{\text{jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan}} \times 100\%$ Tidak Ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			10)	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Tidak ada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
27	Pertanian	1	1)	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang	Sarana dan Prasarana 36	Dinas Pertanian dan Peternakan

				diberikan			
			2)	Prasarana pertanian yang digunakan	31		Dinas Pertanian dan Peternakan
			3)	Penerbitan izin usaha pertanian	Tidak Ada Data		Dinas Pertanian dan Peternakan
			4)	Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$ $\frac{31}{31} \times 100\% = 100\%$		Dinas Pertanian dan Peternakan
			5)	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	$\frac{\text{Jumlah usulan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan usaha pertanian}} \times 100\%$ Tidak Ada Data		Dinas Pertanian dan Peternakan
		2	1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100\%$ Tidak Ada Data		Dinas Pertanian dan Peternakan
28	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	1)	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Di Kabupaten Nagan Raya tidak terdapat panas bumi atau sumber daya mineral		Setdakab Nagan Raya
29	Perdagangan	1	1)	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	$\frac{\text{Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100\%$ Tidak Ada Data		Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian
			2)	Persentase penerbitan TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG}} \times 100\%$ $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$		Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian
			3)	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG}}{\text{Jumlah gudang yang ada di Kab Kota}} \times 100\%$ Tidak Ada Data		Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian
			4)	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu	Tidak Ada Data		Dinas Perindustrian,

			<p>untuk :</p> <p>a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri</p> <p>b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri</p> <p>c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.</p>		Perdagangan, dan Perkoperasian	
		5)	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab Kota}}{\text{Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada Data</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
		6)	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah SKA yang terbit } \leq 1 \text{ hari kerja (1 x 24 jam)}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar}} \times 100\%$ <p>Daerah Nagan Raya belum ditetapkan sebagai daerah yang mengeluarkan SKA</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
		7)	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ <p>Tidak Ada Data</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
		8)	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Tidak Ada Data	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
2	1)	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = \frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$ $\frac{6.509}{42.243,1} \times 100\% = 15,40\%$	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian		
3	1)	Persentase alat-alat ukur,			Dinas	

				takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab Kota}} \times 100\%$ $\frac{98}{298} \times 100\% = 33\%$	Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
			2)	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku}}{\text{Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
30	Perindustrian	1	1)	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada Data</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
		2	1)	Persentase terselesainya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	Tidak Ada Data	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
		3	1)	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$ <p>0Belum Ada Data</p>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	
		4	1)	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada Data</p>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	
		5	1)	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di	$\frac{\text{Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota di SIKAS}}{\text{Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada Data</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	

				Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota			
31	Transmigrasi	1	1)	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Tidak ada penetapan warga transmigrasi baru	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
			2)	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Tidak ada yang difasilitasi pembangunan karena tidak ada satuan pemukiman baru	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
			3)	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Ada satu unit permukiman yang dibina yaitu UPT. Ujong Lamie Kec. Darul Makmur	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
32	Kehutanan	1	1)	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Urusan kehutanan Kabupaten Nagan Raya telah menjadi kewenangna dari Pemerintah Aceh sebagaimana Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan	Setdakab Nagan Raya	
			2)	Pemberdayaan Masyarakat di daerah penyangga	Urusan kehutanan Kabupaten Nagan Raya telah menjadi kewenangna dari Pemerintah Aceh sebagaimana Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan	Setdakab Nagan Raya	
			3)	Pemulihan Ekosistem pada Tahura	Urusan kehutanan Kabupaten Nagan Raya telah menjadi kewenangna dari Pemerintah Aceh sebagaimana Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan	Setdakab Nagan Raya	
			4)	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	Urusan kehutanan Kabupaten Nagan Raya telah menjadi kewenangna dari Pemerintah Aceh sebagaimana Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan	Setdakab Nagan Raya	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	1	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$ <p>Tidak ada dikarenakan data usia anak 5-6 tahun keseluruhan tidak tersedia</p>	Dinas Pendidikan	
		2	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$ <p>Tidak ada dikarenakan data usia anak 7-12 tahun keseluruhan tidak tersedia</p>	Dinas Pendidikan	
		3	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$ <p>Tidak ada dikarenakan data usia anak 13-15 tahun keseluruhan tidak tersedia</p>	Dinas Pendidikan	
		4	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$ <p>Tidak ada dikarenakan data usia anak 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah keseluruhan tidak ada</p>	Dinas Pendidikan	

2	Kesehatan	1	Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{183}{168.927} \times 100\% = 0,108\%$	Dinas Kesehatan	
		2	Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota yang telah memiliki akreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan	
		3	Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{2.922}{3.159} \times 100\% = 92,498\%$	Dinas Kesehatan	
		4	Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{2.730}{3.016} \times 100\% = 90,517\%$	Dinas Kesehatan	
		5	Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{1.883}{2.734} \times 100\% = 68,873\%$	Dinas Kesehatan	
		6	Mengukur persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{10.294}{14.933} \times 100\% = 68,935\%$	Dinas Kesehatan	
		7	Mengukur persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{1.767}{3.175} \times 100\% = 55,654\%$	Dinas Kesehatan	

8	Mengukur persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{74.991}{119.336} \times 100\% = 62,84\%$	Dinas Kesehatan	
9	Mengukur persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{5.825}{10.476} \times 100\% = 55,603\%$	Dinas Kesehatan	
10	Mengukur persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{31.446}{31.446} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan	
11	Mengukur persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{4.411}{4.411} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan	
12	Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{195}{213} \times 100\% = 91,549\%$	Dinas Kesehatan	
13	Mengukur persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota}} \times 100\%$ <p>Tidak ada data</p>	Dinas Kesehatan	

		14	Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{2.248}{3.159} \times 100\% = 71,162\%$	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum	1	Mengukur rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)}} \times 100\%$ $\frac{3.865}{17.165} \times 100\% = 22,517\%$	Dinas PUPR	
		2	Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		3	Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha)}}{\text{luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota}} \times 100\%$ $\frac{1.449}{1.602} \times 100\% = 90,45\%$	Dinas PUPR	
		4	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut}} \times 100\%$	Dinas PERKIM	

			melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{1290}{2600} \times 100\% = 49,61\%$		
		5	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten Kota}} \times 100\%$ Tidak Ada	Dinas PUPR	
		6	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/kota	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\% = 100\%$	Dinas PERKIM	
		7	Mengukur tingkat kemantapan jalan	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan Kabupaten yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{246.124 \text{ Km}}{1.152.031 \text{ Km}} \times 100\% = 21,364\%$	Dinas PUPR	
		8	Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ Tidak Ada	Dinas PUPR	
		9	Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\% = 100\%$	Dinas PUPR	
4	Perumahan Rakyat	1	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$ Tidak Ada	Dinas Perkim	

		2	Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan} + \text{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \text{Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Perkim	
		3	Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Perkim	
		4	Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Perkim	
		5	Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kab/kota}} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Perkim	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$ $\frac{62}{184} \times 100\% = 33,696\%$	Satpol Pp dan WH	
		2	Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$ $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	Satpol Pp dan WH	
		3	Mengukur jangkauan layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 168.392 warga	BPBD	
		4	Mengukur jangkauan layanan pencegahan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	BPBD	

			dan kesiapsiagaan terhadap bencana	pengegasan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Tidak Ada data		
		5	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 16.059 warga	BPBD	
		6	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<i>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah</i> Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	BPBD	
		7	Mengukur rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran 20 Unit	BPBD	
6	Sosial	1	Mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	<i>Jumlah penyandang disabilitas terlantar (0), anak terlantar (62), lanjut usia terlantar (160) dan gelandangan pengemis (14) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i> <i>Populasi penyandang disabilitas terlantar (606), anak terlantar (906), lanjut usia terlantar (7174) dan gelandangan pengemis (14)</i> x100% Tidak Ada	Dinas Sosial	
		2	Mengukur persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap	<i>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</i> <i>Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota</i> 100% $\frac{6.120}{6.120} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sosial	

			darurat bencana daerah kabupaten/kota			
7	Ketenagakerjaan	1	Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{5}{7} \times 100\% = 71,429\%$	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2	Mengukur Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$ 0/Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		3	Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$ 0/ Tidak Ada	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		4	Mengukur persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$ $\frac{18}{63} \times 100\% = 28,571\%$	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		5	Mengukur persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$ $\frac{8}{158} \times 100\% = 5,063\%$	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
8	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Tidak ada penetapan warga Transmigrasi baru	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2	Jumlah satuan pemukiman	Tidak ada yang difasilitasi pembangunankarena tidak ada	Dinas Transmigrasi dan	

			transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	satuan pemukiman baru	Tenaga Kerja	
		3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	1 unit pemukiman di UPT Ujong Lami Kec. Darul Makmur	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
9	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1	Mengukur persentase anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung di APBD}} \times 100\%$ $\frac{25.000.000}{11.372.814.757} \times 100\%$ $= 0,22\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong P4	
		2	Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi)}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$ $\frac{5}{32.845} \times 100\% = 0,015\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong P4	
		3	Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$ $\frac{25}{84.425} \times 100\% = 29,612\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong P4	
10	Pangan	1	Mengukur persentase ketersediaan pangan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$ <p>Belum Ada Data</p>	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
11	Pertanahan	1	Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100\%$ $\frac{211.096}{211.096} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pertanahan	
		2	Mengukur persentase	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}$	Dinas Pertanahan	

			penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\times 100\%$ Tidak Ada Data		
		3	Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$ $\frac{211096}{211096} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pertanahan	
		4	Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dngan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$ $\frac{389}{389} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pertanahan	
		5	Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$ Tidak Ada Data	Dinas Pertanahan	
		6	Mengukur persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$ $\frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pertanahan	
12	Lingkungan Hidup	1	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • IKA = 56,67 • IKU = 94,95 • ITH = Tidak Ada 	Dinas Lingkungan Hidup	
		2	Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{total volume timbunan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{11.469}{44.090} \times 100\% = 26,01\%$	Dinas Lingkungan Hidup	
		3	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab kota}}{\text{usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}}$	Dinas Lingkungan Hidup	

			PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$\frac{4}{17} \times 100\% = 23,52\%$		
13	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\%$ $\frac{121471}{115557} \times 100\% = 105,11\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 - 17 kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{jumlah anak usia 0 - 17 tahun}} \times 100\%$ $\frac{14682}{51015} \times 100\% = 28,78\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		3	Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 - 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0 - 18 tahun}} \times 100\%$ $\frac{52212}{57955} \times 100\% = 90,09\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		4	Mengukur persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ $\frac{0}{45} \times 100\%$ Tidak Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)}} \times 100\%$ $\frac{16}{76} \times 100\% = 21\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong P4	
		2	Mengukur perkembangan desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)}} \times 100\%$ $\frac{2}{119} \times 100\% = 1,68$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong P4	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga	1	Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)	$\text{TFR} = 5 \sum_{i=1}^7 \text{ASFR } i$ $\text{ASFR}_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong P4	

	Berencana			$\frac{\text{Angka kelahiran 0-1 tahun}}{\text{Jumlah wanita usia subur}} \times 100\%$ $\frac{4081}{13334} \times 100\% = 473,29\%$		
		2	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$ $\frac{13992}{26930} \times 100\% = 51,95\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong P4	
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber - KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$ $\frac{0}{26930} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong P4	
15	Perhubungan	1	Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Dinas Perhubungan	
		2	Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota Tidak Ada Data	Dinas Perhubungan	
16	Komunikasi dan Informatika	1	Mengukur persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ $\frac{14}{44} \times 100\% = 31,81\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		2	Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$ <p>Belum Ada Data</p>	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		3	Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

			mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{103.418}{172.363} \times 100\% = 60,0001$		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$ Tidak Ada Data	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
		2	Mengukur persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{304}{7.131} \times 100\% = 4,26\%$	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
18	Penanaman Modal	1	Mengukur persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1) \text{ di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{2.197.795.552.816 - 723.002.078.261}{723.002.078.261} \times 100\%$ =190,36%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{(\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$ 100% $\frac{1.600}{48.456} \times 100\% = 3,30\%$	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		2	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	$\frac{(\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{290}{48.456} \times 100\% = 0,59\%$	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		3	Mengukur peningkatan prestasi olahraga	Tidak ada data	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
20	Statistik	1	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam	$\frac{(\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ $\frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

			menyusun perencanaan pembangunan daerah			
		2	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{(\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah})}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ $\frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
21	Persandian	1	Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota	$\frac{(\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi})}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$ <p>Belum Ada Data</p>	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
22	Kebudayaan	1	Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya	$\frac{(\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan})}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$ $\frac{3}{80} \times 100\% = 3,75$	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
23	Perpustakaan	1	Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Tidak Ada	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
		2	Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat	<p>UPLM 1 -7 = 0</p> <p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =</p> $\sum \frac{UPLM}{ALM} \times 100$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
24	Kearsipan	1	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang	$T = (a + i + s + j)/4$ $T = (1+64+47,8+0)/4=52,95$	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	

			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
		2	Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ $T = (0+3+2+46+221+0) / 6$ $= 45,33$	Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip	
25	Perikanan	1	Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi	<p>Tangkap : 940,84 Ton</p> <p>Budidaya: 1.095,30 Ton</p> <p>= 2.036,14</p>	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
26	Pariwisata	1	Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$ <p>Tidak Ada Data</p>	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		2	Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$ $\frac{6.016 - 5.668}{5.668} \times 100\% = 6,14\%$	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		3	Mengukur tingkat hunian akomodasi di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$ $\frac{2.505}{89} \times 100\% = 2814,607\%$	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		4	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap	Tidak Ada Data	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	

			PDRB Kabupaten/Kota (harga berlaku)			
		5	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten/Kota (harga berlaku)	Tidak Ada Data	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
27	Pertanian	1	Mengukur tingkat produktivitas pertanian	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}} \times 100\%$ $\frac{14.700}{14.005} \times 100\% = 104,96\%$	Dinas Pertanian	
		2	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian penyakit hewan menular tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah kejadian penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$ $\frac{2.530-3.071}{3.071} \times 100\% = -17,61\%$	Dinas Pertanian	
28	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	Di Kabupaten Nagan Raya tidak terdapat panas bumi atau sumber daya mineral	Setdakab Nagan Raya	
29	Perdagangan	1	Mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota}} \times 100\%$ $\frac{143}{7.131} \times 100\% = 2,005$	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
		2	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$ $\frac{6.509}{42.243,1} \times 100\% = 15,408\%$	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	

		3	Mengukur persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota}} \times 100\%$ $\frac{98}{298} \times 100\% = 32,88\%$	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
30	Perindustrian	1	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Tidak Ada Data	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
		2	Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Tidak Ada Data	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
		3	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ Tidak Ada Data	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	
		4	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ Tidak Ada Data	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	

			yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		5	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industry (IUKI) dan izin perluasan kawasan indsutri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Tidak Ada Data		
		6	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	Tidak Ada Data	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian	

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan keuangan	1	Mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$ $\frac{120852682895}{1145834771001} \times 100\%$ $= 10,54\%$	Dinas Pengelolaan Keuangan	
		2	Mengukur tax ratio atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah.	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB Non Migas}} \times 100\%$ $\frac{98465608017}{0} \times 100\%$ <p>Tidak Ada</p>	Dinas Pengelolaan Keuangan dan BPS	
		3	Melihat maturitas Sistem Pengendalian Intern	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Nagan Raya pada Level berkembang 2,302/Tingkat 3 (Terdefenisi)	Laporan hasil penilaian tingkat Maturitas Penyelenggaraan	

			Pemerintah (SPIP)		pada Pemerintah Kab. Nagan Raya	
		4	Melihat tingkat peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada level 2 (Infrastrutur)	Surat Deputi Kepala BPKP	
		5	Mengukur efisiensi belanja operasi di luar transfer expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar transfer expenditures.	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan-transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$ $\frac{862556135079 - 244784216870}{1085840818172}$ $\frac{617781918209}{1085840818172} \times 100\%$ $= 56,894\%$	Dinas Pengelolaan Keuangan	
		6	Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir	10 (13 kali berturut-turut)	Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	
2	Pengadaan	1	Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrasrtuktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$ $\frac{0}{0}$ <p>Tidak Ada</p>	Setdakab Nagan Raya	
		2	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100\%$ $\frac{182}{1.325} \times 100\% = 13,73\%$	Setdakab Nagan Raya	

			kompetitif			
		3	Mengukur rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja langsung}} \times 100\%$ $\frac{55994800000}{921194158892} \times 100\%$ $=60,78\%$	Setdakab Nagan Raya	
		4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun } (n) - \text{Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun } (n - 1)} \times 100\%$ $\frac{91702403303 - 136633854259}{136633854259} \times 100\%$ $=-32,88\%$	Setdakab Nagan Raya	
3	Kepegawaian	1	Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}} \times 100\%$ $\frac{2.826}{735} \times 100\% = 384,49\%$	BKPSDM	
		2	Melihat jumlah pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$ $\frac{76}{1.694} \times 100\% = 4,48\%$	BKPSDM	
		3	Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai non fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$ $\frac{76}{1.694} \times 100\% = 4,48\%$	BKPSDM	

4	Manajemen Keuangan	1	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal	$\left\{ \left(\frac{\text{Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi total belanja APBD}}{\text{dikurangi satu}} - 1 \right) \right\} \times 100\%$ $\left\{ \left(\frac{1085840818172}{1237988722284} \right) - 1 \right\} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">=12,28%</p>	Dinas Pengelolaan Keuangan	
		2	Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal	$\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD dikurangi satu}} \times$ <p style="text-align: center;">100%</p> $\left\{ \left(\frac{98465608}{88548963729} \right) - 1 \right\} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">=99,88%</p>	Dinas Pengelolaan Keuangan	
		3	Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada	<p style="text-align: center;">10</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asset tetap (ada) • Manual untuk menyusun daftar asset tetap (tidak ada) • Proses inventarisasi asset tahunan (ada) • Nilai asset tercantum dalam laporan anggaran (ada) 	Dinas Pengelolaan Keuangan	
		4	Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$ $\frac{5.311.991.766}{1.132.517.829.317} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">=0,46%</p>	$\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	1	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}}{\text{realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}} \times$ <p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">0/Belum Ada Data</p>	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya	
		2	Mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di wensite pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">0/Belum Ada Data</p>	Setdakab Nagan Raya	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah.

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Adapun target Kinerja bupati Nagan Raya Tahun 2021 yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dilihat pada table 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Bupati Nagan Raya Tahun 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1	2	3		4
1.	Mengujudkan penegakan dan pengamalan Syariah Islam secara kaffah dalam kehidupan bermasyarakat.	1,1	Persentase penyelesaian pelanggaran kasus syariah Islam.	80%
		1,2	Jumlah dayah yang memenuhi standalisasi Dayah	11 Dayah
		1,3	Jumlah penerimaan ZIS	10 Miliar
		1,4	Jumlah Hafidz Al-qur'an	50 Orang
		1,5	Jumlah perolehan mendali pada MTQ tingkat provinsi dan nasional	10 Piagam
2.	Menwujudkan kata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)	2,1	Perolehan opini atas laporan keuangan	WTP
		2,2	Tingkat kapabilitas APIP	3 Level
		2,3	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	B
		2,4	Tingkat patisipasi keterwakilan masyarakat dalam musrembang	90%
		2,5	Persentase data pembangunan yang dapat di akses publik secara terpusat dan terpadu	80%
		2,6	Jumlah produk hukun yang di tertapkan	280 Dokumen
3.	Meningkatnya pembedayaan ekonomi masyarakat upaya memberantas kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	3,1	Angka Kemiskinan	17%
		3,2	Angka Pengangguran	4,10%
		3,3	Presentase PAD terhadap Pendapatan	7,80%
		3,4	Produksi Pertanian (Padi)	160.000 Ton
		3,5	Produksi Perikanan	4.031,57 Ton
		3,6	Ketersedian Pangan Utama	100 kg
4.	Meningkatnya kualitas	4,1	Angka Melek Huruf	98%

	Pendidikan yang mampu di jangkau seluruh lapisan masyarakat Nagan Raya	4,2	Angka Rata-rata lama sekolah	8,80 Tahun
		4,3	Presentase Kualifikasi Guru D4/S-1	94,50%
		4,4	Angka Patisipasi Murni : a. SD/MI b. SMP/MTS	a. 96% b. 84%
		4,5	Angka Partisipasi Kasar : a. SD/Mi b. SMP/MTS	a. 96% b. 84%
1	2	3	4	5
5.	Mewujudkan Pembangunan adat dan budaya melalui Serta Pemuda dan olahraga guna meningkatkan daya saing daerah	5,1	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Nagan Raya	5500 Orang
		5,2	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	36 OKP
		5,3	Jumlah perolehan mendali pada event olahraga tingkat Provinsi dan nasional	13 Mendali
		5,4	Frekuensi event piasan seni dan budaya yang terselenggara	4 Kali
6.	Meningkatnya kesejatraan social masyarakat melalui pembedayaan mantan kombatan, orang miskin dan korban komflik	6,1	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pembedayaan	60%
		6,2	Persentase PMKS yang tertagani	N/A
		6,3	Persentase kelompok perempuan yang diberdayakan	49,23%
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Nagan Raya	7,1	Usia Harap Hidup	70 Tahun
		7,2	Angka Kematian Ibu	150 / 100.000 LH
		7,3	Angka Kematian Bayi	7,30 /1000 LH
		7,4	Angka Kematian Balita	36,12 / 1000 LH
		7,5	Persentase Balita Gizi Buruk	0,70%
8.	Mewujudkan pembangunn infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah mendukung ekonomi kreatif	8,1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	286,56 Km
		8,2	Luas sawah yang terairi irigasi	18,460 Ha
		8,3	Persentase akses sanitasi	73,44%
		8,4	Persentase akses air minum non perpipaan	10%
		8,5	Jumlah rumah layak huni yang di bangun	809 Unit
		8,6	Persentase ruang terbuka hijau	19%

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat puluh (40) indikator di peroleh hasil seperti pada tabel 2.6 Berikut:

Tabel 2.6
Capaian Dari Target Perjanjian Kinerja Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	CAPAIAN
1	2	3		4	5
1.	Mengujudkan penegakan dan pengamalan Syariah Islam secara kaffah dalam kehidupan bermasyarakat.	1,1	Persentase penyelesaian pelanggaran kasus syariah Islam.	80%	80
		1,2	Jumlah dayah yang menuhi standalisasi Dayah	11 Dayah	85
		1,3	Jumlah penerimaan ZIS	10 Miliar	7,92
		1,4	Jumlah Hafidz Al-qur'an	50 Orang	80
		1,5	Jumlah perolehan medali pada MTQ tingkat provinsi dan nasional	10 Piagam	-
2.	Menwujudkan kata kelola pemerintahan yang baik (good governace) dan pemerintahan yang bersih (clean government)	2,1	Perolehan opini atas laporan keuangan	WTP	WTP
		2,2	Tingkat kapabilitas APIP	3 Level	2
		2,3	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	B	-
		2,4	Tingkat partisipasi keterwakilan masyarakat dalam musrembang	90%	80
		2,5	Persentase data pembangunan yang dapat di akses publik secara terpusat dan terpadu	80%	80
		2,6	Jumlah produk hukum yang di tertapkan	280 Dokumen	-
3.	Meningkatnya pembedayaan ekonomi masyarakat upaya memberantas kemiskinan dan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	3,1	Angka Kemiskinan	17%	17,85
		3,2	Angka Pengangguran	4,10%	-
		3,3	Presentase PAD terhadap Pendapatan	7,80%	4,44
		3,4	Produksi Pertanian (Padi)	160.000 Ton	127.700
		3,5	Produksi Perikanan	4.031,57 Ton	2.036,14
		3,6	Ketersediaan Pangan Utama	100 kg	100

4.	Meningkatnya kualitas Pendidikan yang mampu di jangkau seluruh lapisan masyarakat Nagan Raya	4,1	Angka Melek Huruf	98%	98
		4,2	Angka Rata-rata lama sekolah	8,80 Tahun	8,96
		4,3	Presentase Kualifikasi Guru D4/S-1	94,50%	98,72
		4,4	Angka Patisipasi Murni :		-
			a. SD/MI	a. 96%	-
		4,5	Angka Partisipasi Kasar :		-
a. SD/Mi	a. 96%		-		
			b. SMP/MTS	b. 84%	-
1	2	3	4	5	
5.	Mewujudkan Pembangunan adat dan budaya melalui Serta Pemuda dan olahraga guna meningkatkan daya saing daerah	5,1	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Nagan Raya	5500 Orang	-
		5,2	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	36 OKP	36
		5,3	Jumlah perolehan mendali pada event olahraga tingkat Provinsi dan nasional	13 Mendali	10
		5,4	Frekuensi event piasan seni dan budaya yang terselenggara	4 Kali	0
6.	Meningkatnya kesejahteraan social masyarakat melalui pembedayaan mantan kombatan, orang miskin dan korban komflik	6,1	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pembedayaan	60%	0,049
		6,2	Persentase PMKS yang tertagani	N/A	Ada
		6,3	Persentase kelompok perempuan yang diberdayakan	49,23%	N /A
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Nagan Raya	7,1	Usia Harap Hidup	70 Tahun	-
		7,2	Angka Kematian Ibu	150 / 100.000 LH	438,91
		7,3	Angka Kematian Bayi	7,30 /1000 LH	2,75
		7,4	Angka Kematian Balita	36,12 / 1000 LH	19,60
		7,5	Persentase Balita Gizi Buruk	0,70%	-

8. Mewujudkan pembangun infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah mendukung ekonomi kreatif	8,1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	286,56 Km	246,12
	8,2	Luas sawah yang terairi irigasi	18,460 Ha	7,626,2
	8,3	Persentase akses sanitasi	73,44%	73,5
	8,4	Persentase akses air minum non perpipaan	10%	10
	8,5	Jumlah rumah layak huni yang di bangun	809 Unit	0
	8,6	Persentase ruang terbuka hijau	19%	99,90

Dari tabel 2.6 diatas dapat dilihat bahwa secara umum capaian indikator pada setiap sasaran sudah sangat baik, hanya beberapa indikator saja yang belum ada data, dan akan di capai pada tahun ini.

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

Analisis ini berdasarkan masing-masing misi disertai dengan rencana dan realisasi setiap tahunnya yang menunjukkan peningkatan yang baik. Capaian dari setiap tahunnya terus meningkat sesuai dengan yang sudah direncanakan pada tahun berjalan. Hal ini tentunya menjadi semangat bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk terus mewujudkan semua misi yang tertuang didalam RPJMK. Untuk lebih jelasnya dalam membandingkan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat di lihat pada tabel 2.7 yang terdapat pada poin d.

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah disajikan berdasarkan masing-masing misi, dalam tabel yang disajikan juga memuat perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

1. Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam secara kaffah;

Misi mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam secara kaffah terdapat satu tujuan yaitu mewujudkan penegakan dan pengamalan syariat islam secara kaffah yang berbasis pemahaman untuk membentuk karakter dan kepribadian berdasarkan nilai islami dengan 6 sasaran yaitu menurunnya jumlah pelanggaran

Syariat Islam, meningkatnya mutu pendidikan dayah, meningkatnya kemakmuran Masjid, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran ZIS, meningkatnya kualitas dan kuantitas petugas tajhiz mayat, meningkatkan kualitas masyarakat berbasis Al-quran dan Hadist.

Secara umum capaian indikator pada misi ini sudah sangat baik dengan pencapaian indikator sudah tercapai, hanya satu indikator yang belum tersedia data pada tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu sasaran sasaran menurunnya jumlah pelanggaran Syariat Islam dengan indikator persentase penyelesaian kasus pelanggaran Syariat Islam. Untuk melihat hasil pencapaian indikator tujuan dan sasaran pada misi mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam secara kaffah, maka dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Capaian Sasaran Pembangunan Misi ke- 1 Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam secara kaffah

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan Kinerja	Kondisi Awal	Rencana					Realisasi				Pencapaian Terhadap Target Akhir Tahun RPJMK (2021)	SKPK	
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021			
Visi	Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Yang Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Syariat Islam														
Misi 1	Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam secara kaffah														
Tujuan.1.1	Mewujudkan penegakan dan pengamalan syariat islam secara kaffah yang berbasis pemahaman untuk membentuk karakter dan kepribadian berdasarkan nilai islami														
	Menurunnya jumlah pelanggaran Syariat Islam	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran syariat islam	%	50	50	60	70	80	80	50	60	70	80	Sudah Tercapai	DSI/WH
		Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Orang	155	160	164	200	210	220	160	164	200	210	Sudah Tercapai	DSI
	Meningkatnya mutu pendidikan dayah	Persentase Dayah yang memenuhi standarisasi dayah	%	N/A	Ada	Ada	57	85	100	Ada	Ada	57	85	Sudah Tercapai	DSI
	Meningkatnya Kemakmuran Masjid	Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu	Mesjid	47	48	49	50	55	60	48	49	50	55	Sudah Tercapai	DSI
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran ZIS	Jumlah ZIS yang terhimpun	Rp. Milyar	7,55	8,98	6,15	6,92	6,92	6,92	8,98	6,15	7,32	7,92	Sudah Tercapai	BAITUL MAL
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Petugas Tajhiz Mayat	Jumlah Petugas Tajhiz Mayat di Gampong	Orang	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	Sudah Tercapai	DSI
	Meningkatkan kualitas masyarakat berbasis Al-quran dan hadist	Jumlah Hafizh Alquran	Orang	23	23	30	50	60	80	23	30	60	80	Sudah Tercapai	DSI

Berdasarkan tabel 2.7 di atas dapat dilihat bahwa pencapaian misi pertama ini menunjukkan semua indikator sasaran untuk mencapai misi mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam secara kaffah sudah tercapai sesuai dengan target, yaitu: 1) sasaran menurunnya jumlah pelanggaran Syariat Islam dengan indikator persentase penyelesaian kasus pelanggaran Syariat Islam sesuai dengan target yaitu 50% pada tahun 2018 dan 60% tahun 2019, pada tahun 2020 mencapai N/A dan tahun 2021 mencapai N/A. Sedangkan indikator jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi sudah tercapai target yaitu 160 orang pada tahun 2018 dari target 160, pada tahun 2019 sebanyak 164 orang, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 200 orang dan tahun sebanyak 210 orang; 2) sasaran meningkatnya mutu pendidikan dayah dengan indikator jumlah persentase Dayah yang memenuhi standarisasi dayah sudah mencapai target dari sebelum tidak ada dayah yang memiliki standarisasi menjadi dayah yang memenuhi standar pada tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2020 mencapai 57 Dayah dan pada tahun 2021 mencapai 85 Dayah 3) meningkatnya kemakmuran Masjid dengan indikator jumlah Masjid yang melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu juga sudah mencapai target yaitu pada tahun 2018 sebanyak 48 Masjid, 2019 berjumlah 49 Masjid, 2020 sebanyak 50 Masjid dan pada tahun 2021 dengan jumlah 55 Masjid; 4) sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran ZIS dengan indikator jumlah ZIS yang terhimpun pada tahun 2018 sebanyak Rp8,98 Miliar, tahun 2019 sebanyak Rp 6,15 Miliar, tahun 2020 sebanyak 7,32 Miliar, dan tahun 2021 sebanyak Rp7,92 Miliar; 5) sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas Petugas Tajhiz Mayat dengan indikator jumlah Petugas Tajhiz Mayat di Gampong sudah mencapai target yaitu 444 orang setiap tahun mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan target yang telah ditentukan 444 orang setiap tahunnya; 5) sasaran meningkatkan kualitas masyarakat berbasis Al-quran dan hadist dengan indikator jumlah Hafizh Alquran juga sudah tercapai sesuai target yaitu pada tahun 2018 sebanyak 23 orang, pada tahun 2019 sebanyak 30 orang, tahun 2020 sebanyak 60 orang, dan pada tahun 2021 sebanyak 80 orang. Pada indikator menurunnya kasus pelanggaran khalawat/mesum sudah tercapai, ini berarti Kabupaten Nagan Raya telah efektif menerapkan Qanun Nagan Raya No. 14 Tahun 2003 tentang khalawat/mesum.

2. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan;

Tujuan dari misi ke-2 adalah Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). Terdapat 6 sasaran pada misi ini yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, meningkatnya kinerja birokrasi yang berkualitas, tersedianya sistem data base yang terpadu dan terintegrasi, terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik dan terwujudnya pelaksanaan Musrena. Capaian indikator sasaran pada misi ke-2 cukup baik, yaitu pada sasaran terwujudnya Birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel. Hasil pemeriksaan atau audit BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Nagan Raya telah meraih hasil penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 tahun berturut-turut yakni 2018 – 2021 sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sedangkan sasaran pembangunan meningkatnya kinerja birokrasi yang berkualitas untuk capaian indikator Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada tahun 2018 hingga tahun 2020 masih level 2, sementara pada tahun 2021 belum tercapai dari target level 3 masih berada pada level 2. Kemudian capaian indikator juga menunjukkan baik yaitu Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada tahun 2018 memperoleh nilai 2,89 dari target 2,49, namun pada tahun 2019 tidak ada data, pada tahun 2020 belum menerima data dari APIP Provinsi Aceh dan tahun 2021 belum ada data. LAKIP memperoleh nilai c pada Tahun 2018 hingga tahun 2020 sesuai dengan target sementara tahun 2021 belum diproses Kemenpan dengan harapan dapat memperoleh nilai cc sesuai dengan target yang telah ditentukan, dan berharap terjadi peningkatan yang tahun berikutnya dengan memperoleh nilai b pada tahun 2022. Capaian indikator sasaran misi kedua dapat dilihat dalam tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8
Capaian Sasaran Pembangunan Misi ke-2
Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan Kinerja	Kondisi Awal	Rencana					Realisasi				Prediksi Pencapaian Terhadap Target Akhir Tahun RPJMK (2021)	SKPK		
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021				
Visi	Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Yang Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Syariat Islam															
Misi 2	Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan															
Tujuan 2.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)															
	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sudah Tercapai	BPKD
	Meningkatnya kinerja birokrasi yang berkualitas	Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	Akan dicapai	Inspektorat	
	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Scor	2.32	2.89	belum ada	2,82	2,89	2,94	2.89	belum ada	belum menerima balasan dari APIP prov. Aceh	belum penilai an	Akan dicapai	Bag. Pemerintahan		

		Nilai LAKIP	Nilai	C	C	C	C	CC	B	C	C	C	Belum diproses Kemplan	Sudah Tercapai	Bag. Organisasi
	Tersedianya sistem data base yang terpadu dan terintegrasi	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	20	60	70	75	80	80	60	70	80	80	Sudah Tercapai	Bappeda
	Terwujudnya sistem perencanaan dan anggaran yang terintegrasi	Terlaksananya aplikasi e-planning dan e-butgeting	Terlaksana/ Belum Terlaksana	Belum Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Sudah Tercapai	Bappeda
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik	Tingkat Partisipasi Keterwakilan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	%	55	60	70	80	80	85	60	70	80	80	Sudah Tercapai	Bappeda
	Terwujudnya pelaksanaan Musrena	Terlaksananya Musrena	Terlaksana/ Belum Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Sudah Tercapai	Bappeda

Berdasarkan tabel 2.8 di atas dapat dilihat bahwa sasaran pembangunan selanjutnya adalah tersedianya sistem data base yang terpadu dan terintegrasi, indikator sasaran ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu sangat baik yaitu melebihi dari target yang telah ditentukan 60% pada tahun 2018, pada tahun 2019 mencapai 70%, tahun 2020 melebihi target yaitu 80% dari target 75%, sementara tahun 2021 mencapai 80% sesuai dengan target. Pada sasaran terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sudah tercapai target dengan terlaksananya aplikasi e-planning dan e-budgeting mulai tahun 2018 di Kabupaten Nagan Raya.

Indikator meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik juga sudah cukup bagus yaitu 60% pada tahun 2018, pada tahun 2019 sebanyak 70%, kemudian pada tahun 2020 dan 2021 mencapai 80% sesuai dengan target serta keterwakilan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan, selain itu pelaksanaan Musrena juga sudah terlaksana dengan baik.

3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis kearifan lokal menuju masyarakat yang produktif sebagai upaya pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah;

Tujuan dari Misi ke-3 ini adalah menurunnya angka kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sasaran pembangunan pada misi ke-3 ini masih harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nagan Raya khususnya bagi Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) terkait. Untuk melihat hasil pencapaian indikator sasaran pada misi ini dapat dilihat pada tabel 2.9 di bawah ini:

Tabel 2.9
Capaian Sasaran Pembangunan Misi ke-3
Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis kearifan lokal

Visi/ Misi/ Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan Kinerja	Kondisi Awal	Rencana					Realisasi				Prediksi Pencapaian Terhadap Target Akhir Tahun RPJMK (2021)	SKPK	
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021			
Visi	Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Yang Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Syariat Islam														
Misi 3	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yg berbasis kearifan lokal menuju masyarakat yang produktif sebagai upaya pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah														
Tujuan 3.1	Menurunkan Tingkat Kemiskinan														
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Angka kemiskinan	%	14,83	18,97	17,97	17,7	17,00	16,5	18,97	17,97	16,95	17,85	Perlu Kerja Keras	Dinas Sosial
		Kedalaman Kemiskinan (P1)	indeks	2,53	3,7	3,01	3,33	3,33	3,33	3,7	3,01	3,33	3,5	Perlu Kerja Keras	Dinas Sosial
		Keparahan Kemiskinan (P2)	indeks	0,58	1,01	0,83	0,94	0,94	0,94	1,01	0,83	0,94	1,01	Perlu Kerja Keras	Dinas Sosial
Menurunnya angka pengangguran	Angka Pengangguran	3,79	2,93	3,55	4,11	4	4,1	4,2	3,55	4,11	5,11	-	Perlu Kerja Keras	Dinas Sosial	
Tujuan 3.2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)														
	Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	10.06	9.89	9.89	9,35	11,22	13,46	9.89	9.89	8,93	4,44	Perlu Kerja Keras	BPKD

Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah Produksi TBS	Ton	316,164	117.819	529.137,25	564.730	600.325	635.919	117.819	529.137,25	520.272	547.888	Akan dicapai	Disbun
	Jumlah Produksi Gabah/Padi	Ton	170,151	180,278	130,582	155,000	160,000	165.000	180,278	130,582	127,500	127,700	Akan dicapai	Distannak
	Jumlah Produksi Ikan	Ton	3.257,29	4.498,03	4.804,27	3.769,16	4.031,57	4.233,15	4.498,03	4.804,27	4.641,87	2.036,14	Perlu Kerja Keras	DKP dan Pangan
Meningkatnya ketahanan pangan	Kecukupan pangan utama	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sudah Tercapai	DKP dan Pangan

Berdasarkan table 2.9 di atas, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih harus kerja keras dalam meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin, angka kemiskinan pada tahun 2018 masih tinggi sebesar 18,97%, kemudian pada tahun 2019 sebesar 17,97 %, pada tahun pada tahun 2020, angka kemiskinan sedikit menurun menjadi 16,95 % dari target 17,7, pada tahun 2021 terjadi kenaikan angka kemiskinan mencapai 17,85 dari target 17,00. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2018 mencapai indek 3,7, tahun 2019 mencapai indek 3,01, tahun 2020 mencapai 3,33 dan pada tahun 2021 semakin tinggi tingkat keparahan mencapai indek 3,5 dari target 3,33. Sementara Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2018 dengan indek 1,01, kemudian pada tahun 2019 menurun dengan indek 0,83, tahun 2020 meningkat lagi menjadi 0,94, tahun 2021 semakin tinggi dengan indek 1,01.

Pada Sasaran pembangunan menurunnya angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga harus bekerja keras, jumlah angka pengangguran pada tahun 2018 sebesar 3,55%, pada tahun 2019 semakin tinggi sebesar 4,11%, pada tahun 2020 semakin tinggi menjadi 5,11 dari target 4,2%.

Pada misi 3 ini indikator sasaran pembangunan belum tercapai dengan baik masih perlu kerja keras yaitu sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah belum mencapai target, pada tahun 2018 sebesar 9.89%, Tahun 2019 sebesar 9.89 %, sementara pada tahun 2020 menurun menjadi 8,93 dari rencana target 9,35%, pada tahun 2021 menurut jauh menjadi 4,44 dari target 11,22 %.

Pada sasaran meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah dengan indikator Jumlah Produksi TBS menunjukkan hasil akan dicapai pada tahun 2018 117,819 ton lebih rendah dari kondisi awal tahun 2017 sebanyak 316,164 ton dan tahun 2019 mencapai 529.137,25 ton, kemudian pada tahun 2020 mencapai 520.272 dari target 564.730 ton, sementara pada tahun 2021 mencapai 547.888 ton dari target 635.919 ton. Kemudian sasaran Jumlah Produksi Gabah/Padi juga masih perlu kerja keras, tahun 2018 hanya mencapai 180,278 ton, pada tahun 2019 menurun menjadi 130,582 ton, kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 127,500 ton dengan target 160,000, pada tahun 2021 naik sedikit menjadi 127,700 ton dari target 165.000 ton.

Jumlah Produksi Ikan lebih baik capaiannya pada tahun 2018 sebanyak 4.498,03 ton dari tahun 2017 sebanyak 3.257,29, tahun 2019 naik menjadi 4.804,27 ton, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan kembali menjadi 4.641,87 dan tahun 2021 menurut dratis ke 2.036,14 dari target 4.031,57. Sementara itu sasaran meningkatnya ketahanan pangan dengan indikator Kecukupan pangan utama sangat baik sudah tercapai 100%.

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memberi dukungan maksimal terhadap pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga

Misi ke-4 ini memiliki tujuan yaitu tujuan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing khusus di Bidang Pendidikan. Pencapaian sasaran pada misi ini menunjukkan beberapa indikator sangat positif dengan capaian sangat baik, capaian indikator dapat dilihat pada tabel 2.10 di bawah ini:

Tabel 2.10
Capaian Sasaran Pembangunan Misi ke-4 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memberi dukungan maksimal terhadap pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan Kinerja	Kondisi Awal	Rencana					Realisasi				Prediksi Pencapaian Terhadap Target Akhir Tahun RPJMK (2021)	SKPK	
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021			
Visi	Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Yang Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Syariat Islam														
Misi 4	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memberi dukungan maksimal terhadap pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga														
Tujuan 4.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata														
	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang terjangkau dan merata	Angka Melek Huruf	%	93.41	96.25	98.00	97,50	98,00	98,50	96.25	98.00	97,58	98	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.24	8.21	8.01	8,50	8,80	9,00	8.21	8.01	8,68	8,96	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.72	14.44	14.56	15,00	15,25	15,50	14,11	14,12	14,13	14,14	Perlu Kerja Keras	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1	%	37.51	94.33	97.74	93,5	94,5	96	94.33	97.74	98,25	98,72	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
		Persentase Distribusi Guru	%	65,15	67,5	75,5	80	85	90	67,5	75,5	80	85	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
		Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	53.16	67.44	79.88	81,5	83,5	86,5	67.44	79.88	81,5	83,5	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
		Persentase Distribusi Tenaga Kependidikan	%	55,25	60,5	65,5	70,5	75,5	85,5	60,5	65,5	70,5	75,5	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan

	Meningkatnya Ketersediaan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	%	45,25	55,5	60,5	65,5	70,5	75,5	55,5	60,5	65,5	70,5	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
	Terwujudnya lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing	Persentase lulusan Vokasional yang bersertifikat	%	72,15	80,5	85	87,25	90,5	92,5	80,5	85	87,25	90,5	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
		Jumlah pendidikan yang unggul	unit	6	8	9	10	11	12	8	9	10	11	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya Minat dan Kemampuan Masyarakat dalam literasi	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	1,781	1,210	925	500	900	1100	1,210	925	978	3,557	Sudah Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Melestarikan adat istiadat dan budaya														
Tujuan 4.2	Meningkatnya Peran dan fungsi lembaga adat	Jumlah Lembaga Adat dan Budaya yang Dibina	Lembaga	N/A	N/A	N/A	15	25	30	N/A	N/A	15	25	Sudah Tercapai	Disbudparpora
		Even piasan seni dan budaya yang terselenggara	Kegiatan	2	2	1	3	4	5	2	2	0	0	Perlu Kerja Keras	Disbudparpora
	Meningkatkan peran kepemudaan dan olahraga														
Tujuan 4.3	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah Organisasi kepemudaan yang aktif	Organisasi	10	16	28	30	40	50	10	16	32	36	Akan dicapai	Disbudparpora
	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah medali pada event olah raga tingkat daerah dan regional	Medali	5	17	19	25	30	35	5	17	25	10	Perlu Kerja Keras	Disbudparpora

Berdasarkan tabel 2.10 di atas menunjukkan capaian indikator sasaran yang sudah baik di antaranya meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang terjangkau dan merata dengan indikator angka melek huruf tahun 2018, 2019, dan 2021 tercapai sesuai dengan target yakni secara berturut-turut 96,25% dan 98,00%. Pada tahun 2020 capaian indikator ini melebihi target 97,50% yaitu sebesar 97,58%.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2018 dan 2019 capaiannya sesuai dengan target secara berturut-turut yakni 8,21 tahun. Demikian pula dengan tahun 2020, capaian angka rata-rata lama sekolah hanya sebesar 8,68 tahun dari target 8,50. Angka Harapan Lama Sekolah belum mencapai target maksimal sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2018 angka harapan lama sekolah mencapai 14,11 tahun dari target 14,44 tahun. Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 14,12 tahun namun tidak mencapai target yakni 14,56. Demikian pula dengan capaian tahun 2020 dan 2021 secara berturut-turut yakni 14,13 tahun (target 15,00 tahun) dan 14,14 tahun (target 15,25).

Untuk sasaran meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, indikator Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1 tahun 2020 terjadi peningkatan capaian sebesar 98,25% (target 93,5%). Demikian pula dengan tahun 2021 terjadi peningkatan capaiannya yakni sebesar 98,72% melebihi target sebesar 94,5%. Persentase Distribusi Guru Indeks Tahun 2018 mencapai realisasi sebesar 67,5%, realisasi tahun 2019 sebesar 75,5%, tahun 2020 mencapai 80%, dan realisasi tahun 2021 mencapai 85%. Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2018 realisasinya sesuai dengan target yaitu 67,44%. Demikian pula dengan realisasi tahun 2019, 2020, dan 2021 yang juga sesuai dengan target secara berturut-turut yakni 79,88%, 81,5%, dan 83,5%. Persentase Distribusi Tenaga Kependidikan tahun 2018 mencapai realisasi 60,5% dan sesuai dengan target. Realisasi indikator ini pada tahun 2019 mencapai 65,5, tahun 2020 mencapai 70,5, dan pada tahun 2021 mencapai 75,5.

Meningkatnya Peran dan fungsi lembaga adat dengan indikator Jumlah Lembaga Adat dan Budaya yang Dibina Lembaga Tahun 2018 dan Tahun 2019 tidak tersedia data baik pada target maupun realisasi. Sedangkan pada tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar 15 lembaga dengan realisasi yang sesuai dengan target. Tahun 2021 realisasi indikator ini tercapai sesuai target, yakni 25 lembaga. Even piasan seni dan budaya yang terselenggara pada tahun 2018 target 2 dengan realisasi yang sesuai target. Tahun 2019 target 2, realisasi 1 kegiatan. Sedangkan pada tahun

2020 target 3 dengan tidak ada realisasi. Demikian pula dengan tahun 2021 dimana target 4 kegiatan namun tidak ada realisasi.

Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dengan indikator jumlah organisasi kepemudaan yang aktif target organisasi tahun 2018 target 16, realisasi hanya 10 organisasi. Tahun 2019 target 28, realisasi hanya 16 organisasi. Tahun 2020 target 30 dan realisasi mencapai 32 organisasi. Sedangkan tahun 2021 targetnya adalah 40 sedangkan realisasi hanya 36 organisasi. Indikator meningkatnya prestasi olahraga Jumlah medali pada event olah raga tingkat daerah dan regional Tahun 2018 target 17 medali, namun capaiannya hanya 5 medali. Tahun 2019 target 19 dan capaian mencapai 17. Tahun 2020 capaiannya sesuai dengan target, yakni 25 medali, sedangkan pada tahun 2021 target 30 medali namun realisasinya hanya 10 medali.

5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

Tujuan dari Misi 5 adalah meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan mewujudkan perlindungan sosial masyarakat. Sasaran pembangunan pada misi Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yaitu; 1)Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin dengan indikator Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan; 2)Meningkatnya kesejahteraan PMKS dengan indikator Persentase PMKS yang tertangani; 3)Meningkatnya pemberdayaan kelompok perempuan dengan indikator jumlah kelompok perempuan diberdayakan; 4)Meningkatnya pemberdayaan mantan kombatan dan korban konflik dengan indikator Jumlah mantan kombatan dan korban konflik yang mendapat pemberdayaan; 5) Meningkatnya ketahanan keluarga Persentase peran keluarga dalam pembinaan masyarakat; dan 6)Terwujudnya penyelenggaraan santunan kematian bagi masyarakat adanya regulasi santunan kematian.

Tabel 2.11 Capaian Sasaran Pembangunan Misi ke-5 Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan Kinerja	Kondisi Awal	Rencana					Realisasi				Prediksi Pencapaian Terhadap Target Akhir Tahun RPJMK (2021)	SKPK		
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021				
Visi	Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Yang Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Syariat Islam															
Misi 5	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat															
Tujuan 5.1	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat															
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan	%	46.56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,61	0,049	Perlu Kerja Keras	Dinas Sosial
	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	PMKS yang tertangani	Ada/ Tidak ada	Tidak Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Sudah Tercapai	Dinas Sosial
	Meningkatnya pemberdayaan kelompok perempuan	Jumlah kelompok perempuan diberdayakan	kelompok	23.74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada target/tidak ada capaian/ blm diisi/	DPMGP4
	Meningkatnya pemberdayaan mantan kombatan dan korban konflik	Jumlah mantan kombatan dan korban konflik yang mendapat pemberdayaan	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ada target/tidak ada capaian/ blm diisi/	Kesbangpol
	Meningkatnya ketahanan keluarga	Persentase peran keluarga dalam pembinaan masyarakat	%	N/A	80	80	85	85	85	80	80	80	80	80	Akan dicapai	DPMGP4
Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat																
Tujuan 5.2	Terwujudnya penyelenggaraan santunan kematian bagi masyarakat	Adanya regulasi santunan kematian	Ada/ Tidak ada	Tidak Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Sudah Tercapai	Bag. Keisra

Dari tabel 2.11 di atas dapat dilihat bahwa hanya satu indikator sasaran pembangunan yang dapat dilihat capaiannya yaitu sasaran yang ke enam terwujudnya penyelenggaraan santunan kematian bagi masyarakat dengan indikator adanya regulasi santunan kematian menunjukkan capaian yang sangat baik, mulai tahun 2018 hingga tahun 2021 sudah adanya regulasi dan implemenasinya yang sebelumnya pada tahun 2017 belum ada baik santunan maupun regulasinya. Indikator sasaran ini merupakan sasaran pembangunan andalan dan unggulan serta prioritas pembangunan Kabupaten Nagan Raya dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2017-2022. Kemudian pada indikator meningkatnya ketahanan keluarga akan tercapai.

Sayangnya pada misi ke-5 ini indikator sasaran lainnya tidak dapat dianalisis secara komprehensif karena banyak indikator yang tidak memiliki data target dan realisasi. Hanya beberapa data yang tersedia, seperti sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin dengan indikator persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan tidak ada realisasi baik pada tahun 2018 hingga 2021. Namun ada realisasi pada tahun 2020 sebesar 2,61% dan tahun 2021 sebesar 0,049%. Indikator lainnya, yakni, PMKS yang tertangani. Realisasi tahun 2018-2021 sudah sesuai dengan target yaitu adanya penanganan terhadap PMKS. Indikator persentase peran keluarga dalam pembinaan masyarakat tahun 2018 target 80% sesuai dengan realisasi. Tahun 2019 target dan realisasi sangat sesuai yaitu 80%. Tahun 2020 terjadi penurunan realisasi yang tidak sesuai target, yakni target 85%, realisasi 80%. Hal serupa juga ditemukan pada data tahun 2021. Terakhir indikator adanya regulasi santunan kematian tahun 2018 sampai 2021 sudah tercapai sesuai dengan target, yakni, adanya regulasi terkait santunan kematian.

6. Meningkatkan Pelayanan Yang Berkualitas Mewujudkan Masyarakat yang Sehat

Tujuan dari Misi 6 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Berdasarkan capaian indikator sasaran dilihat dari tabel 2.12 di bawah, maka dapat dilihat beberapa indikator yang telah menunjukkan hasil cukup baik yaitu Meningkatnya Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2020 realisasi yakni 69,22 tahun dari target 69,05 tahun. Capaian ini meningkat dari tahun 2018 dan 2019 yang realisasinya sesuai dengan target. Namun pada tahun 2021 realisasinya

menurun menjadi 69,22 tahun dari target 70,00 tahun. Angka kematian bayi /1000 KH dapat ditekan yakni pada tahun 2021 sebesar 2,75 dari rencana 7,30. Realisasi tersebut cukup baik jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana persentasenya hanya dapat dicapai sebesar 9,19 dari target 7,50. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 realisasinya sesuai dengan target yakni secara berturut-turut 11,00 dan 7,20. Berikutnya Meningkatnya status RSUD Nagan Raya cukup baik dari sebelumnya belum Akreditasi menjadi sudah Akreditasi RSUD Nagan Raya. Pencapaian tujuan dan sasaran Misi 6 dapat dilihat pada table 2.12 berikut:

Tabel 2.12 Capaian Sasaran Pembangunan Misi ke-6 Meningkatkan Pelayanan Yang Berkualitas Mewujudkan Masyarakat yang Sehat

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan Kinerja	Kondisi Awal	Rencana					Realisasi				Prediksi Pencapaian Terhadap Target Akhir Tahun RPJMK (2021)	SKPK	
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021			
Visi	Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Yang Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Syariat Islam														
Misi 6	Meningkatkan Pelayanan Yang Berkualitas Mewujudkan Masyarakat yang Sehat														
Tujuan 6.1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat														
	Meningkatnya angka Usia Harapan Hidup	Angka usia harapan hidup	Tahun	68.7	68.89	69,14	69,05	70,00	70,20	68.89	69,14	69,22	-		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Persentase kinerja pelayanan Rumah Sakit													BLUD
		- BOR	%	70	85	95	85	80	75	85	95	62	69	Sudah Tercapai	BLUD
		- TOI	Hari	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	Sudah Tercapai	BLUD
		- ALOS	Hari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Sudah Tercapai	BLUD
		- NDR	/1000 Pasien	0.001	6	8,2	5	4	3	6	8,2	14,6	17,0	Perlu Kerja Keras	BLUD
		- GDR	/1000 Pasien	0.002	6	12	6	5	4	6	12	20,7	23,0	Perlu Kerja Keras	BLUD
		Angka kematian ibu	/100000 KH	99.63	28,40	331,02	153,03	150,00	140,00	28,40	331,02	141,44	438,91	Perlu Kerja Keras	Dinas Kesehatan
Angka kematian neonatus	/1000 KH	14.28	10,00	12,58	12,59	11,98	11,79	10,00	12,58	13,08	13,09	Perlu Kerja Keras	Dinas Kesehatan		

		Angka kematian bayi	/1000 KH	5.65	11,00	7,20	7,50	7,30	7,00	11,00	7,20	9,19	2,75	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan
		Angka kematian balita	/1000 KH	37.2	12,00	8,94	36,37	36,12	35,97	12,00	8,94	1,40	19,60	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya status RSU Nagan Raya	Akreditasi RSU Nagan Raya	Akreditasi	Belum Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	Sudah Tercapai	BLUD

Indikator sasaran yang belum menunjukkan hasil baik dan perlu kerja keras Angka kematian ibu /100000 KH pada tahun 2020 mencapai 141,44 dari target 153,03. Namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan yaitu sebesar 438,91 dari target 150,00. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2019 dimana angka kematian ibu mencapai 331,02. Begitu pula Angka Kematian Neonatus /1000 KH tahun 2018 dan 2019 dapat direalisasikan sesuai dengan target yaitu berturut-turut 10,00 dan 12,58. Tahun 2020 realisasinya adalah 13,08 di atas target 12,59. Sementara itu Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator Persentase kinerja pelayanan Rumah Sakit, Capaian BOR tahun 2021 adalah 69% dari target 80%, TOI dapat direalisasikan 2 hari, ALOS 3 hari, NDR 17,0 per 1000 KH, dan GDR 23,0 /1000 KH.

7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan potensi dan karakteristik wilayah

Tujuan dari misi ke-7 ini adalah Menyediakan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana sesuai potensi wilayah bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Sasaran pada misi ini beberapa indikator menunjukkan cukup baik dan terpenuhi sesuai target yaitu sasaran meningkatnya sarana dan prasarana pertanian. Indikator jumlah sawah yang terlayani irigasi pada tahun 2021 capainya sebesar 7.626,2 ha dari target 5.700 ha. Capaian ini sama dengan tahun 2020 dan mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 yaitu capaiannya sebesar 10.626 ha. Capaian tujuan dan sasaran dapat dilihat dalam tabel 2.13 di bawah ini:

Tabel 2.13
Capaian Sasaran Pembangunan Misi ke-7 Meningkatkan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan potens dan kerateristik wilayah

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan Kinerja	Kondisi Awal	Rencana					Realisasi				Prediksi Pencapaian Terhadap Target Akhir Tahun RPJMK (2021)	SKPK	
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021			
Visi	Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Yang Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Syariat Islam														
Misi 7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan potensi dan kerateristik wilayah														
Tujuan 7.1	Menyediakan Infrastruktur, Sarana & Prasarana sesuai potensi wilayah bagi peningkatan ekonomi masyarakat														
	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Km	243.54	242.54	242.56	261,56	286,56	311,56	221.932	242.56	274,609	246,12	Akan dicapai	PU PR
	Terwujudnya pengembangan kawasan strategis	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Tidak ada target/tidak ada capaian/ blm diisi/	Bappeda
	Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian	Jumlah sawah yang terlayani irigasi	Ha	17,597	15.239	10.626	5700	5700	5700	15.239	10.626	7,626,2	7,626,2	Sudah Tercapai	Distannak
	Meningkatnya pembangunan infrastruktur untuk pengurangan resiko bencana	Panjang Jalan evakuasi	Km	2	0	0	1	1	2	0	0	0	0	Perlu Kerja Keras	BPBD
		Jumlah pos pemadam kebakaran	Unit	3	0	0	1	1	2	0	0	0	0	Perlu Kerja Keras	BPBD
		Jumlah bangunan evakuasi	Unit	2	0	0	1	1	2	0	0	0	0	Perlu Kerja Keras	BPBD
	Persentase akses sanitasi	%	42	52	67,64	67,64	73,44	80,04	52	67,64	67,6	73,5	Sudah Tercapai	Dinas Perkim	

Meningkatnya akses sanitasi dan air minum bagi masyarakat	Persentase akses air minum Perpipaan	%	0	52.00	67.64	72,24	76,74	81,04	52.00	67.64	72,2	86,3	Sudah Tercapai	Dinas Perkim
	Persentase akses air minum non Perpipaan	%	58.15	0	10	10	10	10	0	10	10	10	Sudah Tercapai	Dinas Perkim
Tersedianya rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	Unit	607	0	709	320	320	321	0	709	320	0	Perlu Kerja Keras	Dinas Perkim
	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	29	0	127	100	200	200	0	127	100	0	Perlu Kerja Keras	Dinas Perkim
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka publik.	Persentase ruang terbuka hijau	%	7.8	10.00	11.00	11,70	19,00	27,00	10.00	11.00	111,11	99,90	Sudah Tercapai	DLH
Tersedianya infrastruktur yang mendukung ekonomi kreatif	Persentase infrastruktur pendukung ekonomi kreatif	%	0	30	50	60	70	80	30	50	60	70	Sudah Tercapai	Disperinda gkop dan UKM

Untuk sasaran meningkatnya akses sanitasi dan air minum bagi masyarakat. Indikator yang dapat dicapai adalah persentase akses sanitasi yakni tahun 2021 target 73,44% dengan realisasi 73,5%. Realisasi ini meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 67,6% (target 67,64). Persentase akses air minum perpipaan realisasi tahun 2021 sebesar 86,3% melebihi target 76,74%. Persentase ruang terbuka hijau yang dapat direalisasikan pada tahun 2021 adalah sebesar 99,90% lebih besar dari target 19,00%. Meskipun capaian tahun 2021 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang dapat direalisasikan sebesar 111,11% namun capainya ini cukup baik bagi sasaran meningkatnya pengelolaan dan apemanfaatan ruang terbuka publik. Demikian pula dengan persentase infrastruktur pendukung ekonomi kreatif tahun 2021 capainya sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 70%. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 50% (target 50%) dan tahun 2020 sebesar 60% (target 50%).

Beberapa data yang perlu mendapat perhatian dan kerja keras adalah jumlah (1) kawasan strategis tidak ada data tahun 2020 dan 2021; (2) panjang jalan evakuasi dimana tahun 2020 dan 2021 tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan; (3) jumlah pos pemadam kebakaran; dan (4) jumlah bangunan evakuasi. Masingmasing indikator tersebut tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Demikian pula dengan sasaran tersedianya rumah layak huni untuk indikator jumlah rumah layak huni yang terbangun pada tahun 2021 tidak ada realisasi dari target 320 unit. Capaian ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2020 dimana 320 unit rumah layak huni berhasil dibangun sesuai dengan target di tahun yang sama. Indikator jumlah rumah tidak layak huni yang direhab juga mengalami capaian yang sama, yakni tidak ada realisasi pada tahun 2021 dari target 200 unit. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 berhasil dibangun sesuai target berturut-turut yaitu 127 unit dan 100 unit.

e. Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Tingkat efektifitas Sumber Daya Aparatur disandingkan dengan profile Organisasi Perangkat Daerah terkait data jumlah Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai bahan analisis. Data jumlah Sumber Daya Aparatur Menurut Jenis Kelamin dan Eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.14 berikut:

Tabel 2.14
Jumlah Sumber Daya Aparatur Menurut Jenis Kelamin dan Eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021

No	Nama OPD	Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin		Total	Eselon Yang Terisi					
		L	P		II. a	II. b	III. a	III. b	IV. a	IV. b
1	Sekretariat Daerah	70	14	84	1	5	9	-	2	-
2	Inspektorat	19	19	38	-	1	5	-	3	-
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26	20	46	-	1	1	4	1	-
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16	10	26	-	1	1	2	6	-
5	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	38	20	58	-	1	1	5	1	-
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	8	20	-	1	1	2	5	-
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan	23	10	33	-	1	1	4	7	-
8	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	14	6	20	-	1	1	3	2	-
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16	4	20	-	1	1	3	4	-
10	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	7	1	8	-	-	1	-	1	-
11	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	24	7	31	-	1	3	-	4	-
12	Dinas Pendidikan	48	21	69	-	-	1	3	1	-
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	54	15	69	-	1	1	3	8	-
14	Dinas Kesehatan	19	14	33	-	1	1	3	2	-
15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	23	4	27	-	1	1	3	8	-
16	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	21	3	24	-	1	1	3	3	-
17	Dinas Sosial	17	8	25	-	1	1	3	1	-
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17	2	19	-	1	1	2	3	-

19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14	13	27	-	1	1	4	9	-
20	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	19	4	23	-	-	1	4	9	-
21	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	22	7	29	-	1	1	3	7	-
22	Dinas Pertanian dan Peternakan	71	51	122	-	-	1	4	1	2
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	8	20	-	1	1	2	-	-
24	Dinas Lingkungan Hidup	16	6	22	-	-	1	3	7	-
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	11	24	-	1	1	3	7	-
26	Dinas Perhubungan	19	3	22	-	1	1	2	5	-
27	Dinas Perkebunan	19	7	26	-	1	1	2	6	-
28	Dinas Syariat Islam	12	10	22	-	1	1	3	5	-
29	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	4	2	6	-	-	1	-	1	-
30	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	4	1	5	-	-	1	-	1	-
31	Sekretariat Majelis Adat Aceh	3	3	6	-	-	1	-	1	-
32	Sekretariat Kecamatan Beutong	23	11	34	-	-	1	1	5	2
33	Sekretariat Kecamatan Seunagan Timur	16	7	23	-	-	1	1	4	1
34	Sekretariat Kecamatan Seunagan	18	6	24	-	-	1	1	2	1
35	Sekretariat Kecamatan Suka Makmue	17	8	25	-	-	1	1	3	1
36	Sekretariat Kecamatan Kuala	14	10	24	-	-	1	1	4	2
37	Sekretariat Kecamatan Kuala Pesisir	17	10	27	-	-	1	1	3	2
38	Sekretariat Kecamatan Darul Makmur	15	13	28	-	-	1	1	4	2
39	Sekretariat Kecamatan Tadu Raya	15	1	16	-	-	1	1	1	2
40	Sekretariat Kecamatan Tripa Makmur	11	4	15	-	-	1	1	4	2
41	Sekretariat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang	13	0	13	-	-	1	1	2	2
42	Dinas Pertanahan	7	1	8	-	1	1	2	1	-
43	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	8	3	11	-	-	1	-	3	-
44	Rumah Sakit Umum Daerah SIM	34	112	146	-	-	1	3	9	-
JUMLAH		900	498	1398						
		Jumlah Jabatan Eselon			584					
		Jumlah Jabatan Eselon yang terisi			460					
		Jumlah Jabatan Eselon yang Lowong			124					

f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Misi 1: Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam Secara Kaffah

1. Program Pelayanan Keagamaan;
2. Program Peningkatan dan Pengawasan Syariat Islam;
3. Program Pengembangan Penguatan Syariat Islam;
4. Program Pembinaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan;
5. Program Peningkatan Pengkaderan Ulama;
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendidikan;
7. Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Agama Islam;
8. Program Pembinaan Mutu Pendidikan Dayah;
9. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (Bidang Pemberdayaan santri-DayahTerpadu);
10. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan;
11. Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Agama Islam;
13. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Kehidupan Beragama.

Misi 2: Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Baik dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
9. Program Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;

10. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
11. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
12. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
13. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
14. Program Layanan Publik;
15. Program Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
16. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
17. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
18. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
19. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
20. Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas;
21. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
22. Program Peningkatan Kesehatan KDH/WKDH;
23. Program Peningkatan Kerja Sama AntarPemerintah Daerah;
24. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
25. Program Pengembangan Data /Informasi Statistik Sektoral;
26. Program Pengembangan Data/Informasi;
27. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
28. Program Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
29. Program Pengembangan Data Statistik Perikanan;
30. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database jalan dan jembatan;
31. Program Pengembangan Pusat Komando Penanggulangan Bencana;
32. Program Perencanaan Tata Ruang;
33. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;
34. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
35. Program Pengembangan Transmigrasi dan Perencanaan RTSP;
36. Program Penyusunan Laporan Pelaksanaan Investasi PMDN / PMA;
37. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Program Penataan Daerah Otonomi Baru;
39. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
40. Program Perencanaan Sosial Budaya;
41. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
42. Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;

43. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;
44. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Gampong;
45. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
46. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
47. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Misi 3: Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Kearifan Lokal Menuju Masyarakat Yang Produktif Sebagai Upaya Pemberantasan Kemiskinan dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Penopang Kemandirian Daerah

1. Program Keluarga Berencana;
2. Program Keluarga Sejahtera;
3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
8. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
9. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
10. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda;
11. Program Pengembangan Kerja Sama Pengelolaan Kekayaan Budaya;
12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
13. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
14. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
15. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
16. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;
17. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
18. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut;
19. Program Pengembangan Penyuluhan Perikanan;
20. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikian;

21. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
22. Program Pendataan Tanah-Tanah Asset Milik Pemerintah Daerah;
23. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi;
24. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
25. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
26. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;
27. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan;
28. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif;
29. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
30. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
31. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
32. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
33. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
34. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
35. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan;
36. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
37. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
38. Program Pemberdayaan SDM Pertanian/Perkebunan;
39. Program Peningkatan Kelembagaan RDK/RDKK Pupuk Bersubsidi;
40. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
41. Program Peningkatan Kelembagaan dan SDM Penyuluh Pertanian;
42. Program Penguatan Kelembagaan Pertanian/Perkebunan;
43. Program Rehabilitasi Tanaman Pertanian/Perkebunan.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Memberi Dukungan Maksimal Terhadap Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga

1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Non Formal dan Informal;
2. Program Peningkatan Mutu Ruang Sekolah;
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
4. Program Pendidikan Non Formal;
5. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Tenaga Kependidikan;

6. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Program Peningkatan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
9. Program Pengembangan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;
10. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
11. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah;
12. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
13. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
14. Program Penguatan Lembaga Adat dan Budaya;
15. Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai Adat dan Budaya;
16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
17. Program Pagelaran Seni dan Budaya Daerah (Nagan Festival);
18. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
19. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
20. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
21. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga;
22. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

Misi 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
2. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
6. Program Pembinaan Anak Terlantar;
7. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
8. Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapina, PSK , Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya);

9. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
10. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
12. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
13. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
14. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
15. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
16. Program Peningkatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
17. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
18. Program Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum;
19. Program Jaminan Sosial Santunan Kematian;
20. Program Keluarga Harapan Plus.

Misi 6: Meningkatkan Pelayanan Yang Berkualitas Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Program Penyehatan Lingkungan;
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
5. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
6. Program Pengembangan Kesehatan;
7. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
8. Program Kesehatan Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (PDTK) Termasuk Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK);
9. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
10. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
11. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
13. Program Pendampingan Akreditasi Puskesmas;
14. Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Puskesmas;
15. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan;
16. Program Pelaksanaan Operasional BLUD;

17. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
18. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
19. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
20. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
21. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
22. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.

Misi 7: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Kebutuhan Potensi dan Karakteristik Wilayah

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
3. Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong;
4. Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
5. Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Talud/Bronjong;
6. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
7. Program Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Tempat;
8. Program Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan;
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
10. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan;
11. Program Perencanaan Kota Menengah dan Besar;
12. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
13. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;
14. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
15. Program Transmigrasi Lokal;
16. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
17. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
18. Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian;
19. Program Peningkatan Sistem Sarana dan Prasarana Pertanian;
20. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan;
21. Program Pengendalian Banjir;
22. Program Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan;
23. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

24. Program Pembangunan Saluran Limbah Rumah Tangga;
25. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman;
26. Program Penyusunan RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum);
27. Program Penyusunan Raqa BUMDPDAM;
28. Program Pembangunan Infrastruktur Air Bersih (PDAM);
29. Program Pengembangan Perumahan;
30. Program Pembangunan Saluran Limbah Rumah Tangga;
31. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
32. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
33. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
34. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
35. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
36. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar;
37. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kawasan Wisata Rawa Tripa;

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dengan alokasi dana berasal dari pemberi tugas, yang dilaksanakan oleh daerah dan ataupun desa.

1. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

11. Peraturan Menteri perdagangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
12. Peraturan Menteri perdagangan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Pada tahun 2021 Kabupaten Nagan Raya hanya menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat. Kementerian/Lembaga yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2021 adalah Kementerian Perdagangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 98 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/ Wali Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021.

B. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan dalam Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten Nagan Raya adalah Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat dengan nama Pasar Serba Jadi yang bertipe C.

C. Anggaran

Anggaran yang Digunakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya untuk melaksanakan Tugas Pembantuan bersumber dari Kementerian Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).

3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Nagan Raya

Pada tahun 2021 Kabupaten Nagan Raya menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat. Kementerian/Lembaga yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2021 adalah Kementerian Perdagangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 98 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/ Wali Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021.

3.1.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/Lembaga atas penugasan yang tertuang dalam peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan. Pembangunan/ Revitalisasi sarana perdagangan Pasar Rakyat Serba Jadi ditargetkan selesai sesuai kontrak kerja paling lambat sampai akhir Tahun Anggaran 2021 dengan capaian 100 persen.

3.1.2 Realisasi

Realisasi Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mencapai 100%, dengan total serapan anggaran 95,07% dari alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah). Lebih jelasnya, realisasi tugas pembantuan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
yang dilaksanakan oleh Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

No.	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan penugasan (TP)	Program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan	Lokasi	OPD pelaksana	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	%	Realisasi capaian target	%	Ket
1.	Kementerian Perdagangan	Peraturan Menteri Perdagangan No. 98 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan 314udang nonsistem resi 314udang yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Program: Perdagangan dalam negeri - Kegiatan: Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat - Output: Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dan Sarana Perdagangan - Rincian Kegiatan: Pembangunan Pasar Serba jadi 	Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul makmur	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya	6.000.000.000,-	5.704.235.003,-	95,07%	100	%	

3.2 Permasalahan dan Kendala

Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan sebagai berikut:

1. Kondisi tanah dilapangan sedikit rawa sehingga perlu dilakukan soundbir (uji lab tanah);
2. Terlambatnya review di Kementerian Perdagangan;
3. Terlambat keluar dipa;

3.3 Saran dan Tindak Lanjut

Adapun saran untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan kedepan sebagai berikut:

1. Pembahasan Tugas Pembantuan sebaiknya dilakukan diawal tahun/ bukan ditahun pelaksanaan tugas pembantuan tersebut, sehingga daerah dapat mempersiapkan perencanaan dengan matang, dan persoalan review dan keluarnya dipa juga akan teratasi.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Pendidikan diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan jenis pelayanan dasar SPM bidang pendidikan yaitu sebagai berikut:

a. Pendidikan Dasar.

Capaian SPM Pendidikan dasar dihitung dari jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.

b. Pendidikan Kesetaraan.

Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan dihitung dari jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

c. Pendidikan Anak Usia Dini.

Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini dihitung dari jumlah warga negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, target capaian untuk masing-masing pelayanan dasar tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Capaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah	100 %	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
		yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap Tahun

4.1.3 Realisasi

Pada tahun 2021, berbagai upaya pelaksanaan pencapaian target SPM urusan pendidikan sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan capaian SPM urusan pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya. Berikut ini disampaikan realisasi capaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 bidang urusan Pendidikan sebagai berikut:

Tabel. 4.2

Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
A.	KABUPATEN/KOTA KAB. NAGAN RAYA				89.55 %
1 .	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)			80.91%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	100%
		14717	14717	0	
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	61.81%
				4	4
	1 . Buku Teks Pelajaran	0	0	0	0%

	2 . Perlengkapan Belajar	0	0	0	0%
	3 . Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	178	178	0	100.00 %
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	419	63	356	15.04 %
	5 . jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1281	1265	16	98.75 %
	6 . Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	14717	14717	0	110%
	7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	2178	1758	420	80.72 %
	8 . satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	178	178	0	100.00 %
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan			99.65%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	100%
		152	152	0	
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan 1	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia 2	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia 3	Persentase capaian mutu 100% 99.29%
					4
	1 . Modul Belajar	50	50	0	100%

	2 . jumlah rombongan belajar di PKBM	23	23	0	100.00 %
	3 . Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	152	150	2	98.68 %
	4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	115	110	5	95.65 %
	5 . Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	0	0	0	0%
	6 . Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	11	11	0	100.00 %
	7 . Perlengkapan Belajar	11	11	0	100.00 %
	8 . PKBM Terakreditasi minimal C	1	1	0	100.00 %
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD			88.11%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	100%
		3436	3436	0	
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 76.22%
		1	2	3	3
	1 . Buku Gambar	3436	1743	1693	50.73 %
	2 . Alat Mewarnai	3436	1743	1693	50.73 %
	3 . Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	3436	1743	1693	50.73 %

4	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	121	121	0	100%
5	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	150	122	28	81.33%
6	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	108	108	0	100%
7	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	10	10	0	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

Dari gambaran tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Capaian SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Nagan Raya.
Pada tahun 2021 jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang ada di Kabupaten Nagan Raya adalah 14717 orang. Dari angka tersebut anak yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar di Kabupaten Nagan Raya berjumlah 14717 orang, sehingga capaian SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Nagan Raya yaitu 100%.
- b. Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Nagan Raya.
Pada tahun 2021 Jumlah anak usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah di Kabupaten Nagan Raya, berjumlah 152 yang sudah didata dari angka tersebut semuanya berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan sehingga Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Nagan Raya adalah 100%.
- c. Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nagan Raya
Pada tahun 2021 jumlah anak usia 5- 6 Tahun di Kabupaten Nagan Raya adalah sebanyak 3436 orang. Dari jumlah tersebut semuanya berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Sehingga capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 yaitu 100%.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Dalam upaya melaksanakan SPM urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2021, telah mengalokasikan anggaran senilai Rp. 30.921.759.137 (tiga puluh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

4.1.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan penerapan SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, personil yang terlibat di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3

Data Personil Bidang Pendidikan Yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Personil Tahun 2021	
		ASN	KONTRAK
1.	Pendidikan Dasar	1518	106
2.	Pendidikan Kesetaraan	-	104
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	127	511

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, 2022

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Kita semua menyadari bahwa capaian pelayanan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2021 masih belum sesuai dengan target SPM yang ditetapkan Pemerintah. Berbagai permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam upaya pencapaian target SPM tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Kondisi bangunan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Nagan Raya masih banyak yang dalam kondisi rusak, sehingga berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar terhadap anak didik.
- b. Standar kualifikasi tenaga pendidik formal di SD dan SMP masih belum sesuai dengan yang ditetapkan seperti masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1.

- c. Pemerataan guru di Kabupaten Nagan Raya belum sepenuhnya merata khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, terutama sekolah di daerah terpencil karena jumlah guru belum sepenuhnya terpenuhi.
- d. Standar kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan banyak yang belum sesuai dengan standar Nasional.
- e. Pencapaian rata-rata lama sekolah masih belum mencapai angka 7,58 tahun sebagai indikasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun.

Untuk menjawab semua permasalahan yang ada, berbagai solusi yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya antara lain:

- a. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber Dana Otsus (DOKA), DAK dan dari APBK Kabupaten, serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah.
- b. Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan S-1, baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru.
- c. Melalui pemeratan di tingkat kecamatan dan menekan adanya perpindahan dari SD yang kurang guru ke sekolah yang sudah memenuhi kecukupan guru.
- d. Melakukan optimalisasi kegiatan PKG dan PKB.
- e. Melakukan inventarisasi dan penyisiran ke daerah-daerah yang pencapaian angka partisipasi sekolahnya masih rendah.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Urusan Kesehatan diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan jenis pelayanan dasar SPM bidang kesehatan yaitu sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, target capaian untuk masing-masing pelayanan dasar bidang kesehatan tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4
Target Capaian SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	Setiap Tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

4.2.3 Realisasi

Pada tahun 2021, berbagai upaya pelaksanaan pencapaian target SPM Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap capaian SPM urusan kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya. Berikut ini disampaikan realisasi capaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 bidang urusan kesehatan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Capaian SPM Urusan Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TOTAL PENCA PAIAN
1	2	3	4
A.	KABUPATEN/KOTA KAB. NAGAN RAYA		59.62%

1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan			91.70 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	%
		16194	14834	1360	91.60%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	91.81 %
		1	2	3	
	1 . Buku KIA	3159	3159	0	100%
	2 . Tablet Tambah Darah	3159	2966	193	93.89%
	3 .Vaksin Tetanus Difetri (Td)	3558	3058	500	85.95%
	4 .Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	3159	3159	0	100%
	5 . Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin	3159	2502	657	79.20%
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan			95.28 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	%
		9048	8193	855	90.55%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100 %
		1	2	3	
	1 . Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	3159	3159	0	100%
	2 . Buku KIA	3159	3159	0	100%
	3 . Formulir Fotograf	3159	3159	0	100%
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan			61.40%

	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	%
		17694	16558	1136	93.58%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	29.23 %
		1	2	3	
	1 . Vaksin Hepatitis BO	3334	2513	821	75.53%
	2 . Vitamin K1 Injeksi	TIDAK ADA DI LAPORAN		0	0%
	3 .Salep/Tetes Mata Antibiotik	TIDAK ADA DI LAPORAN		0	0%
	4 .Formulir Bayi Baru Lahir	TIDAK ADA DI LAPORAN		0	0%
	5 . Formulir MTBM	TIDAK ADA DI LAPORAN		0	0%
	6 . Buku KIA	2872	2872	0	100%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan			54.36 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	%
		49277	34005	15272	69.01%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	39.71 %
		1	2	3	

	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku			0	0%
	2 . Formulir DDTK			0	0%
	3 . Buku KIA	10658	10658	0	100%
	4 . Vitamin A Biru	2602	2458	144	94.47%
	5 . Vitamin A Merah	9086	8334	752	91.72%
	6 .Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella	4392	DPT-HB-Hib=527/CA MPAK Rubella=518	DPT-HB-Hib =3865/C AMPAK Rubella= 3874	23.79%
	7 . Jarum Suntik dan BHP				
	8 . Peralatan Anafilaktik				
	9 . Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO* BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubell	3334	1580	1754	47.39%
1	2	3			4
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar Yang Mendapat Layanan Kesehatan			4.02 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	%
		109805	8835	100970	8.05%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	0.00 %
		1	2	3	
	1 .Buku Raport Kesehatananku	TIDAK ADA DI LAPORAN		0	0%
	2 .Buku Pemantauan Kesehatan	TIDAK ADA DI LAPORAN		0	0%
	3 .Kuesioner Skrining Kesehatan	TIDAK ADA DI LAPORAN		0	0%
	4 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	TIDAK ADA DI LAPORAN		0	0%

	5 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah			0	0%
6 .	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan			34.68 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	69.36 %
		216226	149982	66244	69.36%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	0.00 %
		1	2	3	
	1 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	TIDAK ADA DI LAPORAN		0	0%
	2 . Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes	TIDAK ADA DI LAPORAN		0	0%
7 .	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan			57.28 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	%
		36480	17475	19005	47.90%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	66.67 %
		1	2	3	
	1 . Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	TIDAK ADA DI LAPORAN		0	0%

	2. Buku Kesehatan Lansia	12160	12160	0	100%
	3. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	12160	12160	0	100%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan			53.34 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	53.87 %
		94338	50820	43518	53.87%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	52.81 %
		1	2	3	
	1. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	31.446	24.910	6.536	79.22%
	2. Tensimeter	31.446	24.910	6.536	79.22%
	3. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	31.446	0	0	0%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan			41.47 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	%
		9255	3838	5417	41.47%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	41.47 %
		1	2	3	
	1. * Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	3.085	1.819	1.266	59%

	2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	3.085	200	2885	6.48%
	3. Pedoman dan Media KIE	3.085	1.819	1.266	58.96%
1	2	3			4
10.	Pelayanan kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan			100 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	0.00 %
		1065	1065	0	100%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100 %
		1	2	3	
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis	213	213	0	100%
	Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	213	213	0	100%
	2. Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	213	213	0	100%
	3. Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	213	213	0	100%
	4. Media KIE	213	213	0	100%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan			42.93 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	%
		125388	47138	78250	37.59%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	48.28%
		1	2	3	
	1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	4460	817	3643	18.32%

	2 . Reagen Zn TB	5798	1175	4623	20.27%
	3 . Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	107040	42960	64080	40.13%
	4 . Catridge Tes Cepat Molekuler	2098	817	1281	39%
	5 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan	179	179	0	100%
	6 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur	15	15	0	100%
	7 . Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	5798	1175	4623	20.27%
12 .	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh			78.91 %
	(Human Immunodeficiency Virus)	(Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan Layanan Kesehatan			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	0.00 %
		10005	7895	2110	78.91%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	78.91 %
		1	2	3	
	1 . Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	3335	3335	3335	100%
	2 . Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	3335	2280	1055	68.37%
	3 . Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril KTP/NIK	3335	2280	1055	68.37%

Pada tahun 2021, berbagai upaya pelaksanaan pencapaian target SPM Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab

terhadap capaian SPM urusan kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya. Berikut ini disampaikan realisasi capaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 bidang urusan kesehatan sebagai berikut.

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.

Pada tahun 2021 Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten Nagan Raya adalah sebanyak 16194 orang. Dari jumlah tersebut Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 14834 orang sehingga capaian kinerja yang dapat diperoleh senilai 91.60% dari target kinerja 100% yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kendala yang dihadapi dalam pemberian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tersebut antara lain karena keterbatasan jumlah petugas yang ada dalam memberikan pelayanan. Selain itu adanya wabah pandemi Covid 19 juga menyebabkan terhambatnya pemberian pelayanan. Kita sadari bahwa ibu hamil termasuk dalam sasaran yang rawan penularan virus Covid 19.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.

Pada tahun 2021 jumlah Ibu Bersalin di Kabupaten Nagan Raya adalah sebanyak 9048 orang. Dari jumlah tersebut Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 8193 orang, sehingga capaian kinerja yang dapat diperoleh senilai 90.55% dari target kinerja 100% yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kendala yang dihadapi dalam pemberian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin tersebut antara lain karena masih ada masyarakat yang memilih melahirkan di rumah, tidak difasilitasi kesehatan sebagaimana yang dipersyaratkan, hal ini memerlukan konseling yang baik pada ibu hamil. Selain itu sulitnya memperoleh data persalinan dari fasilitas kesehatan Swasta juga memberikan dampak pada rendahnya cakupan target SPM yang telah ditetapkan.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.

Pada tahun 2021 jumlah bayi baru lahir di Kabupaten Nagan Raya adalah sebanyak 17694 orang. Dari jumlah tersebut bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 16558 orang, sehingga capaian kinerja pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang dapat diperoleh senilai 93.58% dari target kinerja 100% yang ditetapkan oleh pemerintah. Kendala yang dihadapi dalam pemberian pelayanan kesehatan bayi baru lahir tersebut antara lain karena pelayanan pada periode ini adalah kunjungan neonatal lengkap (KN Lengkap). Dalam kondisi ini petugas persalinan ibu yang bukan merupakan tenaga kesehatan (bidan didesa) setempat, memberikan dampak tidak dilakukannya kunjungan secara periodik sesuai yang ditetapkan, sedang penolong persalinan tidak lagi melakukan kunjungan

setelah tali pusat bayi lepas. Keterbatasan dalam melakukan informasi dari fasilitas kesehatan swasta memberikan dampak pada tidak terkumpulnya informasi yang lengkap

d. Pelayanan kesehatan balita.

Pada tahun 2021 jumlah balita di Kabupaten Nagan Raya adalah sebanyak 49277 orang. Dari jumlah tersebut balita yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 34005 orang, dengan capaian kinerja senilai 69.01% dari target kinerja 100% yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kendala yang dihadapi dalam pemberian pelayanan kesehatan balita tersebut antara lain karena dari 503 orang Bidan di desa yang tersebar di 222 Desa dalam Kabupaten Nagan Raya belum ada yang mendapatkan Pelatihan SDIDTK. Selain itu karena kondisi Pandemi Covid 19, membuat banyak orangtua balita kurang berkenan balitanya dilakukan pemantauan, terlebih adanya pembatasan dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan massa di Posyandu.

e. Pelayanan kesehatan pada usia Kesehatan dasar.

Pada tahun 2021 jumlah anak usia 7-15 tahun di Kabupaten Nagan Raya adalah sebanyak 109805 orang. Dari jumlah tersebut anak usia 7-15 tahun yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 8835 orang, sehingga capaian kinerja yang dapat diperoleh senilai 8.05% dari target kinerja 100% yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kendala yang dihadapi dalam pemberian Pelayanan kesehatan pada usia 7-15 tahun tersebut antara lain karena Pandemi Covid 19 sejak tanggal 16 Maret 2020 sehingga menghambat proses belajar, Tim UKS Puskesmas tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anak sekolah. Selain itu keterbatasan tenaga dan waktu yang tersedia juga menjadi penghambat Puskesmas dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada sekolah-sekolah.

f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.

Pada tahun 2021 Jumlah penduduk usia 15 - 59 tahun di Kabupaten Nagan Raya adalah sebanyak 216226 orang, dari jumlah tersebut hanya 149982 yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Nagan Raya, sehingga capaian kinerja yang diperoleh senilai 69.36% baik itu layanan kesehatan di Puskesmas maupun pelayanan pada Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) yang tersebar di desa – desa.

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.

Pada tahun 2021 Jumlah penduduk usia ≥ 60 tahun di Kabupaten Nagan Raya adalah sebanyak 36480 orang. Dari jumlah tersebut penduduk usia ≥ 60 tahun yang

mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 17475 orang, sehingga capaian kinerja yang dapat diperoleh senilai 47.90% dari target kinerja 100% yang ditetapkan oleh Pemerintah.

h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.

Pada Tahun 2021 jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun penderita hipertensi di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 94338 orang. Dari jumlah tersebut yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Nagan Raya hanya 50820 dengan capaian kinerja hanya 53.87% dari 100% yang telah ditetapkan. Belum tercapainya target sasaran tersebut karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan ke fasyankes (kunjungan dilakukan jika penyakit/gejala klinis sudah dirasakan parah). Selain itu Sistem Pelaporan PTM (Hipertensi) belum ada standart baku dari Kementerian Kesehatan sampai saat ini menyebabkan belum tercapainya target sasaran estimasi hipertensi.

i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.

Pada tahun 2021 jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun penderita diabetes mellitus di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 9255 orang. Dari angka tersebut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 3838 orang dengan capaian kinerja mancapai 41.47% dari target 100% yang telah ditetapkan Pemerintah. Diabetes mendapat julukan sebagai “ibu jari segala penyakit” karena kondisi ini dapat mempengaruhi banyak organ tubuh. Kadar gula darah yang tinggi pada penderita diabetes dapat menyebabkan banyak komplikasi . Terjadinya peningkatan penyakit Diabetes Melitus dikarenakan beberapa hal antara lain adalah kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang kurang sehat, rokok dan alkohol, stress berlebihan, kurang tidur serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kesehatan ke fasyankes (kunjungan dilakukan jika penyakit/gejala klinis sudah dirasakan parah).

j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.

Pada tahun 2021 Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 1065. Dari jumlah tersebut yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 1065 orang, dengan capaian kinerja 100%% dari 100% yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

k. Pelayanan kesehatan orang terduga TBC.

Pada tahun 2021 jumlah orang terduga TBC di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 125388 orang. Dari jumlah tersebut yang mendapatkan layanan kesehatan di

Kabupaten Nagan Raya sebanyak 47138, dengan capaian kinerja 37.59% dari 100% yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Program TB merupakan program yang ditujukan kepada seluruh penderita Tb yang ada di Kabupaten Nagan Raya (14 puskesmas dan 1 RSUD).

I. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV.

Pada tahun 2021 Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 10005 orang. Dari jumlah tersebut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 7895 orang dengan capaian kinerja 78.91% dari 100% target kinerja yang telah ditetapkan Pemerintah. Program HIV adalah program yang sangat sulit dan terus bekerja secara terintegrasi secara LP dan LS untuk menjangkau sasaran sangat sulit karena pandangan masyarakat terhadap HIV sangat tabu sehingga sulit untuk memberikan kesadaran pada masyarakat.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Dalam upaya melaksanakan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2021, telah mengalokasikan anggaran senilai Rp. 2.445.101.402 (Dua milyar empat ratus empat puluh lima juta seratus satu ribu empat ratus dua rupiah)

4.2.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan penerapan SPM Urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, personil yang terlibat di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- a. Tenaga Kesehatan
 - 1). Dokter
 - 2). Bidan
 - 3). Perawat
 - 4). Gizi
 - 5). Tenaga Kesehatan Masyarakat

Tabel 4.6
Data Personil SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

No	Tatanan Pelayanan	Dokter (dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi)	Bidan	Perawat	Gizi	Tenaga Kesehatan Masyarakat
1	2					
2.	Dinkes dan Puskesmas (14 Faskes)	26	503	239	23	92

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

4.2.6 Permasalahan dan Solusi.

Kita semua menyadari bahwa capaian pelayanan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2021 masih belum sesuai dengan target SPM yang ditetapkan Pemerintah. Berbagai permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam upaya pencapaian target SPM tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Pemahaman Ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya deteksi dini tanda bahaya dan Resiko Tinggi saat hamil dan Bersalin dan masih kurangnya sasaran ibu hamil Memamfaatkan Posyandu di Wilayahnya
2. Masih ada ibu Hamil dan bersalin yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di luar Wilayahnya maupun di luar Kabupaten Nagan Raya sehingga tidak dilaporkan.
3. Masyarakat Kabupaten Nagan Raya masih ada yang tidak diperbolehkan bayi baru lahir untuk mendapatkan Imunisasi dan Pelayanan kesehatan lainnya .
4. Sumber daya Manusia Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan yang Melayani sasaran di Puskesmas belum sesuai dengan No : 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
5. Kondisi Ruang Laboratorium pemeriksaan mikroskopis Tuberkulosis di Puskesmas tidak standar dan belum adanya Booth sputum (Bilik pengambilan sputum) di 14 Puskesmas.
6. Kelengkapan alat pemeriksaan BTA seperti mikroskope dan alat pendukung masih belum memadai.
7. Ketersediaan alat TCM (Test Cepat Molekuler) untuk pemeriksaan Tuberkulosis hanya tersedia di RSUD Sultan Iskandar Muda.

8. Standar kualifikasi tenaga kesehatan masih belum sesuai dengan yang ditetapkan seperti petugas pemeriksaan klinis masih ada yang dilakukan oleh bukan perawat/dokter, tenaga edukasi/promosi kesehatan pelayanan tuberkulosis di Rumah sakit dan puskesmas belum (Kesehatan Masyarakat) tersedia.
9. Pemberdayaan Kader Kesehatan di Gampong belum maksimal, sehingga kader yang sudah terlatih belum aktif mendukung pelayanan orang terduga tuberkulosis.
10. Minimnya ketersediaan anggaran untuk manajemen program maupun melaksanakan aktif dan pasive case finding serta edukasi termasuk transport petugas pengiriman sample ke Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda untuk pemeriksaan TCM dalam penegakan diagnosa Tuberkulosis sebagaimana Standar penegakan diagnosa Tuberkulosis.
11. Penemuan terduga tuberkulosis Kabupaten Nagan Raya sebesar 18 % masih jauh dari standar minimal yang diharapkan.
Dampak Pandemi COVID-19 diperkirakan juga membuat masyarakat takut atau kurang mengakses fasilitas kesehatan.
12. Fasilitas ruang laboratorium belum memadai untuk mendukung pemeriksaan HIV di 14 Puskesmas
13. Kelengkapan alat pemeriksaan seperti centrifuge alat pendukung masih belum memadai.
14. Kurangnya kerja sama lintas program di Puskesmas antara pengelola program HIV, pengelola program TB dan bidan desa dalam pemeriksaan orang dengan resiko terinfeksi HIV.
15. Tidak semua Puskesmas melakukan Pelaporan Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) ke Kemenkes dikarenakan petugas tidak memiliki laptop/komputer.
16. Standar kualifikasi tenaga kesehatan masih belum sesuai dengan yang ditetapkan seperti petugas pemeriksaan klinis, karena tidak semua Puskesmas mempunyai analis.
17. Tidak adanya biaya pemetaan penemuan kelompok sasaran
18. Pemberdayaan Kader Kesehatan di Gampong belum maksimal, sehingga kader yang sudah terlatih belum aktif mendukung pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV.
19. Pergantian pengelola program HIV yang sudah terlatih di puskesmas sehingga sangat menghambat dalam pencapaian target SPM

20. Stigma buruk masyarakat tentang HIV masih sangat tinggi sehingga menghambat dalam pemeriksaan.
21. Minimnya ketersediaan anggaran untuk manajemen program maupun melaksanakan aktif dan pasive case finding serta edukasi.
22. Pemeriksaan orang dengan resiko terinfeksi HIV Kabupaten Nagan Raya hanya 68% masih jauh dari standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
23. Dampak Pandemi COVID-19 diperkirakan juga membuat masyarakat takut atau kurang mengakses fasilitas kesehatan.
24. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE masih belum maksimal serta Kelengkapan alat pemeriksaan berupa tensimeter masih belum memadai.
25. Ketersediaan formulir pencatatan dan pelaporan SI PTM belum berjalan dengan baik
26. Standar kualifikasi tenaga kesehatan masih belum sesuai dengan yang ditetapkan seperti petugas pemeriksaan klinis masih ada yang dilakukan oleh bukan perawat/dokter, tenaga edukasi/promosi kesehatan pelayanan Hipertensi di Rumah sakit dan puskesmas belum tersedia.
27. Pemberdayaan Kader Kesehatan di Gampong belum maksimal, sehingga kader yang sudah terlatih belum aktif mendukung pelayanan Skrinning Awal penyakit Hipertensi
28. Minimnya ketersediaan anggaran untuk manajemen program untuk melaksanakan edukasi termasuk transport petugas untuk Skrinning Awal Hipertensi di seluruh Faskes.
29. Penemuan kasus Hipertensi di Kabupaten Nagan Raya sebesar 79 % masih jauh dari standar minimal yang diharapkan.
30. Dampak Pandemi COVID-19 diperkirakan juga membuat masyarakat takut atau kurang mengakses fasilitas kesehatan.
31. Kelengkapan alat pemeriksaan Diabetes Mellitus seperti Glukometer Strip tes gula darah, kapas alkohol dan lencet masih belum memadai.
32. Ketersediaan pencatatan dan pelaporan SI PTM belum berjalan dengan baik
33. Standar kualifikasi tenaga kesehatan masih belum sesuai dengan yang ditetapkan seperti petugas pemeriksaan klinis masih ada yang dilakukan oleh bukan perawat/dokter, tenaga edukasi/promosi kesehatan pelayanan Diabetes Mellitus di Rumah sakit dan puskesmas belum tersedia.

34. Pemberdayaan Kader Kesehatan di Gampong belum maksimal, sehingga kader yang sudah terlatih belum aktif mendukung pelayanan Srinting Awal penyakit Diabetes Mellitus.
35. Minimnya ketersediaan anggaran untuk manajemen program maupun melaksanakan aktif dan pasive case finding serta edukasi termasuk transport petugas untuk melakukan Skrinting Awal Diabetes Mellitus
36. Penemuan kasus Diabetes Mellitus di Kabupaten Nagan Raya sebesar 59 % masih jauh dari standar minimal yang diharapkan.
37. Dampak Pandemi COVID-19 diperkirakan juga membuat masyarakat takut atau kurang mengakses fasilitas kesehatan.

Untuk menjawab semua permasalahan yang ada, berbagai solusi yang telah ditempuh oleh Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi dalam Memenuhi SPM Bidang Kesehatan antara lain:

1. Melakukan peningkatan Kapasitas Petugas, Kader kesehatan, TOMA dan TOGA serta Keluarga tentang Pentingnya Pemeriksaan dan Deteksi Dini tanda Bahaya Selama Kehamilan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir melalui dana APBK, OTSUS dan DAK .
2. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintahan Desa tentang Penertiban Administrasi Kependudukan sehingga Semua Warga yang sudah enam bulan tinggal di wilayahnya supaya di usulkan menjadi warga tetap
3. Memberi Penyuluhan dan edukasi atau Konseling kepada semua sasaran yang ada agar semua Bayi Baru alahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
4. Memberiakan kesempatan Pendidikan Penyerataan tenaga kesehatan melalui mandiri maupun yang di biyai oleh Pemerintah.
5. Monitoring dan Evaluasi Minimal setiap tiga bulan terhadap semua Aspek yang berperan dalam penerapan SPM bidang kesehatan.
6. Menata manajemen pelayanan orang terduga tuberkulosis sehingga tenaga pelaksana di Dinas Kesehatan, Labkesda, Rumah Sakit dan Puskesmas dapat sesuai dengan Standar jumlah dan Kualitas Tenaga Kesehatan.
7. Melakukan pemberdayaan masyarakat Gerakan Gampong Peduli Tuberkulosis sesuai dengan Peraturan Presiden No.67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 64 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Gampong Sehat.
8. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber DAK dan dari APBK Kabupaten.

9. Menata manajemen pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV sehingga tenaga pelaksana di Dinas Kesehatan, Labkesda, Rumah Sakit dan Puskesmas dapat sesuai dengan Standar jumlah dan Kualitas Tenaga Kesehatan.
10. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber Dana Otsus (DOKA), DAK dan dari APBK Kabupaten.
11. Menata manajemen pelayanan Hipertensi sehingga tenaga pelaksana di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas dapat sesuai dengan Standar jumlah dan Kualitas Tenaga Kesehatan.
12. Penambahan tenaga kesehatan / Non Kesehatan agar pelayanan maupun Skrinning awal dapat dilakukan pada semua penduduk
13. Menata manajemen pelayanan Diabetes Mellitus sehingga tenaga pelaksana di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas dapat sesuai dengan Standar jumlah dan Kualitas Tenaga Kesehatan.
14. Penambahan tenaga kesehatan / Non Kesehatan agar pelayanan pada Faskes maupun Skrinning awal pada Posbindu dapat dilakukan pada semua penduduk

4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Urusan Pekerjaan Umum diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan jenis pelayanan dasar SPM bidang pekerjaan umum yaitu sebagai berikut:

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, target capaian untuk masing-masing pelayanan dasar tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7
Target Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap Tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap Tahun

4.3.3 Realisasi

Pada tahun 2021, berbagai upaya pelaksanaan pencapaian target SPM pekerjaan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan capaian SPM urusan pekerjaan umum yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nagan Raya. Berikut ini disampaikan realisasi capaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 bidang urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut:

Tabel 4.8
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

A.	KABUPATEN/KOTA KAB. NAGAN RAYA			11.55 %	
1 .	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari		9.2 %	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	172.566	20.745	151.821	12,02%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	6.01%
		1	2	3	

	1 . Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	172.566	20.745	151.821	12,02%
	2 . Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	-	-	-	0,00%
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			14.09 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	172.566	36.478	136.088	21,14%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	7.05%
		1	2	3	
	1 . Pelayanan Penyediaan prasaran dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	172.566	2.500	170.066	1,45%
	2 . Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	172.566	33.978	138.588	19,69%
	3 . Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	-	-	-	0,00%

- a. Jenis pelayanan dasar penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari sampai pada akhir tahun 2021 pencapaian SPM adalah 12,02%. Belum

tercapainya 100% disebabkan adanya berbagai kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian SPM seperti :

- Terbatasnya kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nagan Raya dalam pemenuhan SPM.
- Adanya refocusing anggaran untuk menangani Pandemi COVID-19
- Terbatasnya kapasitas dan kapabilitas SDM Dinas.
- Belum adanya regulasi pendukung dalam penerapan SPM dari dinas-dinas terkait yang melaksanakan tupoksi dibidang pekerjaan umum.
- Pendataan dan Pelaksanaan penerapan pencapaian SPM yang belum maksimal.

b. Jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sampai pada akhir tahun 2021 pencapaian SPM adalah 21,14%. Belum tercapainya 100% disebabkan adanya berbagai kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian SPM seperti :

- Belum tersedianya anggaran dalam DPA-SKPD untuk kegiatan sistem pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja.
- Belum beroperasinya Instalasi Pengolahan Limbah Terpusat (IPLT).
- Terbatasnya kemampuan keuangan daerah.
- Adanya refocusing anggaran untuk menangani Pandemi COVID-19
- Terbatasnya kapasitas dan kapabilitas SDM Dinas.
- Belum adanya regulasi pendukung dalam penerapan SPM dari dinas-dinas terkait yang melaksanakan tupoksi dibidang pekerjaan umum.
- Pendataan dan Pelaksanaan penerapan pencapaian SPM yang belum maksimal.

4.3.4 Alokasi Anggaran

Dalam upaya melaksanakan SPM urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal untuk urusan Pekerjaan umum sebesar Rp. 8.441.509.417 (Delapan milyar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan ribu empat ratus tujuh belas rupiah)

4.3.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan TUPOKSI Bidang Kawasan Permukiman personil yang terlibat di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 sebanyak 7 (tujuh) Orang yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.9
Dukungan Personil Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Personil Tahun 2021	
		ASN	THL
1	2	3	4
1.	Bidang Kawasan Permukiman - Kepala Bidang - Seksi Permukiman - Seksi Air Minum dan Sanitasi - Staf	1 1 2	3
Jumlah		4	3

Sumber : PUPR Nagan Raya, 2022

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Air Minum
Sampai dengan Tahun 2021 persentase penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari baru dapat melayani sebanyak 20.745 jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya sebesar 172.566 jiwa atau sebesar 12,02 %, hal ini menyebabkan kurang optimalnya pelayanan air minum kepada masyarakat.
- Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik
Sampai dengan Tahun 2021 persentase penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari baru dapat melayani sebanyak 33.978 jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya sebesar 172.566 jiwa atau sebesar 19,69 %, hal ini menyebabkan kurang optimalnya pelayanan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik.

Solusi

- Air Minum
Mengoptimalkan anggaran yang tersedia di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman baik yang bersumber Dana Otsus (DOKA), DAK dan dari APBK untuk mencapai target SPM dengan melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota untuk melayani kebutuhan masyarakat.
- Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik

Mengoptimalkan anggaran yang tersedia di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman baik yang bersumber Dana Otsus (DOKA), DAK dan dari APBK untuk mencapai target SPM dengan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota, dan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota untuk melayani kebutuhan masyarakat.

4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Urusan Perumahan Rakyat diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Dalam peraturan ter

sebut dijelaskan jenis pelayanan dasar SPM bidang perumahan rakyat yaitu sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, target capaian untuk masing-masing pelayanan dasar tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.10
Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100 %	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
	terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni		

4.4.3 Realisasi

Pada tahun 2021, berbagai upaya pelaksanaan pencapaian target SPM perumahan rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan capaian SPM urusan perumahan rakyat yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nagan Raya. Berikut ini disampaikan realisasi capaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 bidang urusan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

Tabel 4.11
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3			4
A.	KABUPATEN/KAB. NAGAN RAYA				7.36%
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni			0,00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	9	0	9	0,00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	0,00%
		1	2	3	
	1. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak	0	0	0	0,00%

	Huni Bagi Korban Bencana				
	2 . Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	9	0	9	0,00%
	3 . Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	0,00%
	4 . Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.	0	0	0	0,00%
2 .	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni			14.72%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	7.408	1.636	5.772	22,08%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	7.36%
		1	2	3	
	1 . Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	-	-	-	0,00%
	2 . Subsidi Uang Sewa	-	-	-	0,00%
	3 . Penyediaan Rumah Layak Huni	7.408	1.636	5.772	22,08%

a. Jenis pelayanan dasar fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2021 mencapai 22,08% dari target kinerja 100% yang telah ditetapkan pemerintah. Hal itu karena dari 3 (tiga) jenis pelayanan hanya satu layanan yang dilaksanakan yaitu Penyediaan Rumah Layak Huni, Hal ini karena adanya berbagai kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian SPM seperti :

- Terbatasnya kemampuan keuangan daerah;
- Adanya refocusing anggaran untuk menangani Pandemi COVID-19

- Belum tersedianya anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nagan Raya.
- Terbatasnya kapasitas dan kapabilitas SDM Dinas
- Belum adanya regulasi pendukung dalam penerapan SPM dari dinas-dinas terkait yang melaksanakan tupoksi dibidang perumahan.
- Pendataan dan Pelaksanaan penerapan pencapaian SPM yang belum maksimal.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Dalam upaya melaksanakan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2021, telah mengalokasikan anggaran senilai Rp. 19,674,411,526. (Sembilan belar milyar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

4.4.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan TUPOKSI Bidang Perumahan personil yang terlibat di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 sebanyak 7 (tujuh) Orang yaitu sebagai berikut

Tabel 4.12
Dukungan Personil Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Personil Tahun 2021	
		ASN	THL
1.	Bidang Perumahan Rakyat		
	- Kepala Bidang	1	
	- Seksi Perumahan	3	
	- Seksi Izin Mendirikan Bangunan	1	
	- Staf		2
Jumlah		5	2

Sumber : PERKIM Nagan Raya, 2022

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Pada Tahun 2021 anggaran yang tersedia sebesar Rp. 28.115.920.943 diperuntukkan melaksanakan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), sementara untuk pelaksanaan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sosialisasi dan persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program provinsi, dan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tidak tersedia alokasi anggaran.

Solusi

Mengalokasikan anggaran yang tersedia di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman baik yang bersumber Dana Otsus (DOKA), DAK dan dari APBK untuk mencapai target SPM dengan melaksanakan kegiatan :

- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota,
- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota,
- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/kota,
- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program provinsi, dan
- Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tidak tersedia alokasi anggaran.

4.5 BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Capaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terbagi kedalam 2 (dua) sub urusan yaitu:

- a. Sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Sub urusan bencana daerah

a. Satuan Polisi Pamong Praja/ Wilayahul Hisbah

a.4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut dijelaskan jenis pelayanan dasar SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum yaitu pelayanan ketentraman dan ketertiban umum

a.4.5.2 Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, target capaian untuk pelayanan dasar tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.13
Target Capaian SPM Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	100 %	Setiap Tahun

a.4.5.3 Realisasi.

Pada tahun 2021, berbagai upaya pelaksanaan pencapaian target SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Nagan Raya. Berikut ini disampaikan realisasi capaian SPM sub bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut:

Tabel 4.14
Capaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3			4
A.	KABUPATEN/KAB. NAGAN RAYA				50.87 %
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			25%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	%
		40	20	20	50%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	0%
		1	2	3	
	1 . warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	0%
	2 . warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan				
2 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu			41.67%

Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu				
	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	%
• Jumlah yang Harus Dilayani :	50	25	25	50%
	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	33.33 %
	1	2	3	
1 .Penegakan Perda sesuai SOP	4	2	2	50%
2 .Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	0	0	0	0%
3 .Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	2	1	1	50%

Sesuai dengan Permendagri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada adalah meliputi pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan.

Kerugian materil dimaksud berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Sedangkan kerugian materiil terdiri atas rusak ringan dan rusak sedang dan/atau berat. Untuk pelayanan pengobatan yaitu berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Pada tahun 2021 jumlah penertiban dan penindakan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Nagan Raya sebanyak 6 kali. Selama melaksanakan kegiatan tersebut Satpol PP dan WH Kabupaten Nagan Raya senantiasa mengikuti SOP yang telah ditetapkan, sehingga kerugian material dan pelayanan pengobatan dapat ditekan semaksimal mungkin sehingga pengaduan imbas penertiban maupun tuntutan ganti rugi tidak pernah ada. Hal ini membuat capaian SPM sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 adalah 50%.

a.4.5.4 Alokasi Anggaran

Dalam upaya melaksanakan SPM sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2020, telah mengalokasikan anggaran senilai Rp.1.511.025.000. (satu milyar lima ratus sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah).

a.4.5.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan penerapan SPM urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketertentaman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/ Kota, personil yang terlibat di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.15

Data Personil Satpol PP/WH yang terlibat dalam proses Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Personil Tahun 2021	
		ASN	KONTRAK
1	2	3	4
1.	Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam	12	30
2.	Bidang Trantibumtranmas	12	30
3.	Bidang Linmas	12	10

Sumber : Satpol PP/WH Nagan Raya, 2022

a.4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Kita semua menyadari bahwa capaian pelayanan SPM urusan Ketertiban

Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2021 masih belum sesuai dengan target SPM yang ditetapkan Pemerintah. Berbagai permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam upaya pencapaian target SPM tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Belum tersedia Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk menjangkau pelayanan/pengaduan di tingkat kecamatan secara efektif dan efisien bagi masyarakat yang terdampak terhadap penegakan peraturan daerah/ Qanun.
- b. Belum tersedia Sarana dan Prasarana Tempat Karantina Hewan ternak liar pada saat penegakan Perda/ Qanun tentang Penertiban Hewan Ternak.
- c. Belum tersedia Sarana dan Prasarana Kendaraan Operasi Roda Empat dan Roda Dua yang memadai.
- d. Belum terpenuhi tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Untuk menjawab semua permasalahan yang ada, berbagai solusi yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi Perda/ Qanun melalui Pemberitaan Media, membuka Pos Pelayanan Pengaduan di Markas Komando Satpol PP dan WH Nagan Raya serta mendorong kesadaran masyarakat untuk mematuhi Peraturan yang berlaku.
- b. Menunjuk Rumah Potong atau Tempat lain untuk dijadikan tempat karantina Hewan Ternak Liar dari hasil penegakan Perda/Qanun.
- c. Melakukan Perawatan berkala serta melakukan kegiatan operasi penegakan perda/qanun sesuai dengan kemampuan sarana prasarana yang ada.
- d. Memberikan laporan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terkait Formasi PNS yang dibutuhkan untuk tahun 2023, melakukan optimalisasi pemantapan Sumber Daya PNS yang ada dan melakukan pembinaan Personil THL melalui Pendidikan dan Latihan.

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

b.4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM sub urusan bencana daerah diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut dijelaskan jenis pelayanan dasar SPM sub urusan bencana daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana;
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

b.4.5.2 Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Pemendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, target capaian untuk masing-masing pelayanan dasar tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.16
Target Capaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap Tahun

b.4.5.3 Realisasi

Pada tahun 2021, berbagai upaya pelaksanaan pencapaian target SPM sebagaimana diatur dalam Pemendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan capaian SPM

sub urusan bencana daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya. Berikut ini disampaikan realisasi capaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 sub urusan bencana daerah sebagai berikut:

Tabel 4.17

Capaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana				78.21%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i> 168392	<i>*jumlah total yang Terlayani</i> 168392	<i>*yang belum Terlayani</i> 0	100%
		Jumlah yang harus dilayani 1	Jumlah yang terlayani 2	Jumlah yang belum terlayani 3	Persentase capaian mutu 56.41% 4
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	10	10	0	100.00 %
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	168392	168392	0	100.00 %
	3 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	168392	54000	114392	32.07 %
	4 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	10	5	5	50.00 %
	5 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	9	0	9	0%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				35.63%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	35.63%

		168392	60000	108392	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu
		1	2	3	4
	1 . Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	168392	60000	108392	35.63 %
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				49.65%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i> 168392	<i>*jumlah total yang Terlayani</i> 40000	<i>*yang belum Terlayani</i> 128392	23.75%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu
		1	2	3	4
	1 . Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	168392	40000	128392	23.75 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	10000	3000	7000	30.00 %
	3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	35	35	0	100.00 %
	4 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	2	2	0	100.00 %
	5 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1	1	0	100.00 %
	6 . Pelaksanaan pencarian,	6	6	0	100.00 %

	pertolongan evakuasi korban bencana				
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				75%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i> 45	<i>*jumlah total yang Terlayani</i> 45	<i>*yang belum Terlayani</i> 0	100%
		Jumlah yang harus dilayani 1	Jumlah yang terlayani 2	Jumlah yang belum terlayani 3	Persentase capaian mutu 50.00% 4
	1 . Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	45	45	0	100.00 %
	2 . Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	0	0	0	0%

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

- a) Capaian SPM untuk ini adalah 100% yang telah ditetapkan Pemerintah.
- b) Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana di Kabupaten Nagan Raya. Kabupaten Nagan Raya memiliki kontur muka bumi yang bergunung dan lautan, sehingga Kabupaten Nagan Raya sering mengalami berbagai bencana. Karena itu seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Nagan Raya beresiko mengalami bencana tersebut, sehingga informasi bencana harus diberikan kepada seluruh masyarakat, seperti bencana longsor, banjir, angin puting peliung, kebakaran, pandemi Covid 19, dan bencana sosial lainnya. Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana di Kabupaten Nagan Raya senantiasa

diberikan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui berbagai bentuk sosialisasi, seminar, pelatihan, dan informasi pada berbagai media Radio, cetak, elektronik, maupun online. Namun capaian kinerja Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana di Kabupaten Nagan Raya hanya tercapai 50%.

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pencapaian SPM ini adalah 35.63% dari 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

- a) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Nagan Raya. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana telah diberikan kepada semua masyarakat yang ada dalam Kabupaten Nagan Raya. Laporan Pusdalop dilakukan sesuai dengan SOP yang ada, melalui pemantauan bencana yang dibuat di pos Induk Pusdalops BPBD Kabupaten Nagan Raya. Laporan pemantau senantiasa diberikan secara berjenjang kepada pimpinan atasan dan juga kepada instansi terkait lainnya setiap saat, sehingga capaian kinerja SPM ini mencapai 100%.
- b) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Nagan Raya. Pada tahun 2021 Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Nagan Raya terutama Pandemi Covid 19 telah diberikan kepada seluruh masyarakat sehingga capaian kinerja SPM ini mencapai 100%.

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- a) Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas di Kabupaten Nagan Raya. Pada tahun 2021 penetapan KLB di Kabupaten Nagan Raya dibuat pada saat penetapan Pandemi Covid 19 melalui Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 360/333/BPBD/2020 Tentang Penetapan Status Darurat Bencana Nonalam wabah Penyakit corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Nagan Raya. Penetapan tersebut dibuat dalam kurun waktu yang sangat cepat, kurang dari 1 x 24 jam sejak adanya penetapan Pandemi Covid 19 oleh Pemerintah secara Nasional, sehingga capaian kinerja penetapan status KLB di Kabupaten Nagan Raya mencapai 100%
- b) Respon cepat darurat bencana di Kabupaten Nagan Raya. Pada tahun 2021 jumlah seluruh penetapan status darurat bencana di Kabupaten Nagan Raya

adalah sebanyak 65 kali, dan semuanya ditindaklanjuti dengan kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana sehingga capaian SPM ini mencapai 100% sesuai dengan ketetapan Pemerintah.

- c) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana di Kabupaten Nagan Raya. Pada tahun 2021 jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten Nagan Raya adalah sebanyak 133 orang, yang terdiri dari 20 ASN dan 113 tenaga kontrak. Semua petugas tersebut sangat aktif dalam menjalankan Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana di Kabupaten Nagan Raya sehingga capaian kinerja SPM ini mencapai 100%.
- d) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Nagan Raya. Pada tahun 2021 jumlah korban bencana sebanyak 6 orang. Dari jumlah tersebut semuanya berhasil dievakuasi, sehingga capaian SPM ini mencapai 100% sesuai target kinerja yang ditetapkan.

b.4.5.4 Alokasi Anggaran

Sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM), adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerima Pelayanan dasar SPM sub-urusan bencana adalah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar. Pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2021, telah mengalokasikan anggaran senilai Rp Rp 322.295.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

b.4.5.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan penerapan SPM pada Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021, kondisi sumber daya manusia yang ada yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.18
Data Jumlah Pegawai Pada BPBD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah Personil Tahun 2021	
		ASN	KONTRAK
1	2	3	4
4.	Tingkat Esselon: II.b III.a III.b IV.a	1 1 3 2	0 0 0 0
5.	Pangkat/Golongan: IV II II	6 9 5	0 0 0
6.	Jenjang Pendidikan: S2 S1 D3 SMA SMP	1 8 1 9 1	0 26 6 76 5

Sumber : BPBD Nagan Raya, 2022

Berdasarkan tabel tersebut diatas total pegawai dalam lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya sebanyak 20 orang Pegawai Negeri Sipil dan 113 orang merupakan Tenaga Harian Lepas (THL).

b.4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pencapaian target SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai
- 2) Tingkat pendidikan aparatur dan masyarakat tentang bencana masih rendah
- 3) Kurangnya sumber daya manusia/ aparat Kebencanaan
- 4) Tuntutan tingkat kewajiban dan tanggung jawab bidang penanggulangan bencana sangat tinggi.
- 5) Kurang/ minimnya dukungan Anggaran/ pembiayaan penanggulangan bencana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dan minimnya Dana Tak Terduga Kebencanaan.
- 6) Belum memadainya/ masih kurangnya sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Adapun solusi sebagai berikut:

- 1) Perlunya penyusunan buku daerah rawan bencana lengkap dengan regulasinya
- 2) Perlunya diklat aparaturnya dan Sosialisasi/ Pelatihan bagi masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana
- 3) Perlunya penambahan personil Penanggulangan bencana
- 4) Perlunya pembentukan pos lapangan di daerah rawan bencana untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana
- 5) Pengalokasian dana yang cukup sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung kegiatan terutama yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) penanggulangan bencana dan penambahan jumlah Dana Tak Terduga Kebencanaan
- 6) Perlunya penambahan sarana dan prasarana operasional penanganan bencana.

4.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM urusan sosial diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut dijelaskan pelayanan dasar SPM Urusan Sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. target capaian untuk masing-masing pelayanan dasar tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.19
Target Capaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Setiap Tahun

4.6.3 Realisasi

Pada tahun 2021, berbagai upaya pelaksanaan pencapaian target SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan capaian SPM urusan Sosial yaitu Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya. Berikut ini disampaikan realisasi capaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 bidang urusan Sosial sebagai berikut:

Tabel 4.20
Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3			4
A.	KABUPATEN/KOTA KAB. NAGAN RAYA				18.17 %
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			13.15 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	%
		(350 Jiwa)	(70 Jiwa)	(280 Jiwa)	6.30%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	6.30 %
		1	2	3	
	1 . Layanan Data dan Pengaduan	0	0	0	0%
	2 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti			0	0%
	3 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	4 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	0%
	4 . Penyediaan Permakanan	100 Jiwa	24 Jiwa	76 Jiwa	24.00%

	5. Penyediaan Sandang	200 Jiwa	70 Jiwa	130 Jiwa	35.00%
	6. Penyediaan Alat bantu	180 Jiwa	64 Jiwa	116 jiwa	35.56%
	7. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0	
	8. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	0	0	0	
	9. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	0	0	0	
	10. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	
	11. Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	0	
	12. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	0	0	0	
	13. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	0	
	14. Layanan Rujukan	0	0	0	
	15. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak				34.67 %

	Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			%
		*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	(110 Jiwa)	(70 Jiwa)	(40 Jiwa)	63.64%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	5.70%
		1	2	3	
	1.Layanan Data dan Pengaduan	0	0	0	0%
	2. Penyediaan Permakanan	110 Jiwa	24 jiwa	86 jiwa	21.82%
	3.Penyediaan Sandang	110 jiwa	70 Jiwa	40 jiwa	63.64%
	4. Penyediaan Alat bantu	0	0	0	
	5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0	
	6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	0	0	0	
	7. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	0	0	0	
	8. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	
	9 .Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	0	
	10 .Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	0	0	0	

	11 . Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	0	
	12 . Layanan Rujukan	0	0	0	
	13 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	0	
	14 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	0	0	0	
	15 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0	
1	2	3			4
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			40.47 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	%
		(100 Jiwa)	(76 Jiwa)	(24 Jiwa)	76%

		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	4.93 %
		1	2	3	
	1 .Layanan Data dan Pengaduan	0	0	0	0%
	2 .Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	0	0%
	3 .Penyediaan Permakanan	100 Jiwa	24 Jiwa	76 Jiwa	24.00%
	4. Penyediaan Sandang	100 Jiwa	50 Jiwa	50 jiwa	50.00%
	5 .Penyediaan Alat bantu	0	0	0	0%
	6 .Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0	
	7 .Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	0	0	0	
	8 .Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	0	0	0	
	9 .Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu identitas Anak	0	0	0	
	10 .Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	0	
	11 .Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	0	0	0	
	12 .Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	0	
	13 .Layanan Rujukan	0	0	0	

	14 .Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0	
	15 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	0	0	0	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial			0.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	0.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	0.00 %
		1	2	3	
	1 .Layanan Data dan Pengaduan	0	0	0	0%
	2 .Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan	0	0	0	0%

	Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti				
	3 .Penyediaan Permakanan	0	0	0	
	4 .Penyediaan Sandang	0	0	0	0%
	5 .Penyediaan Alat bantu	0	0	0	
	6 .Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0	
	7 .Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	0	0	0	
	8 .Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	0	0	0	
	9 .Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	
	10 . Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	0	0%
	11 .Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	0	0	0	0%
	12 .Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	0	
	13 . Layanan Rujukan	0	0	0	
	14 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan	0	0	0	

	Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan				
	15 .Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	0	0	0	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota			2.57 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	%
		(350 Jiwa)	(18 Jiwa)	(332 Jiwa)	5.14%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	0.00 %
		1	2	3	
	1 . Penyediaan Permakanan	0	0	0	0%
	2 . Penyediaan Sandang	0	0	0	0%
	3 . Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	4 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	0%
	4 . Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	50 kelompok	18 Kelompok	32 kelompok	0%
	5 . Pelayanan Dukungan Psikososial	-	-	-	0%

Dari tabel diatas realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.

Pada tahun 2021 jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Nagan Raya berjumlah 350 orang. Dan dari jumlah tersebut tidak ada satu orangpun yang terlantar. Capaian target SPM sebesar 20% dari target 100% yang ditetapkan.

2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.

Pada tahun 2021 ada jumlah anak terlantar di luar panti di Kabupaten Nagan Raya berjumlah 110. Dari jumlah tersebut hanya sebanyak 70 orang anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Kabupaten Nagan Raya dengan capaian target SPM hanya sebesar 63.64% dari target 100% yang ditetapkan.

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.

Pada tahun 2021 jumlah lanjut usia terlantar di luar panti di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 100 orang. Dari jumlah tersebut hanya sebanyak 76 orang lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial di Kabupaten Nagan Raya dengan capaian target SPM hanya sebesar 76.00% dari target 100% yang ditetapkan.

4.6.4 Alokasi Anggaran

Dalam upaya melaksanakan SPM urusan Sosial sesuai peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 61 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial yang membawahi tiga bidang teknis yaitu Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan. Dinas Sosial telah mengalokasikan anggaran senilai Rp. 163.339.708,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah).

4.6.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan penerapan SPM Bidang Sosial. Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.21
Data Personil Bidang Sosial Yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

NO	PERSONIL DINSOS	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	25 Orang
2	Tenaga Kontrak	11 Orang
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	10 Orang
4	PKH	50 Orang
5	Sakti Peksos	1 Orang

6	Korda	1 Orang
7	Sakti Peksos	1 Orang
8	Tagana	27 Orang
9	Palopor Perdamaian	2 Orang
JUMLAH		128 Orang

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Kita semua menyadari bahwa capaian pelayanan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2021 masih belum sesuai dengan target SPM yang ditetapkan Pemerintah. Berbagai permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam upaya pencapaian target SPM tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat belum terealisasi sepenuhnya. Sehingga masih banyak penyandang Cacat penyandang disabilitas belum dapat meningkatkan perekonomian keluarga sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari.
- b. Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia dan anak Terlantar. Kegiatan ini kita targetkan sebanyak 100 Jiwa lanjut usia dan 100 jiwa anak terlantar. Dan mampu kita realisasi sebanyak 50 jiwa lanjut usia dan 70 jiwa anak terlantar.
- c. Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial Belum maksimal.
- d. Terkendalanya dengan Data. Karena Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum mendapatkan pembinaan yang memadai sehingga mereka belum mampu menjalankan tugas yang di bebankan untuk proses kerja lebih cepat dan akurat.

Untuk menjawab semua permasalahan yang ada, berbagai solusi yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya antara lain:

- a. Kita lakukan upaya kegiatan memberdayakan sekaligus merehabilitasi para penyandang disabilitas agar menjadi manusia yang mandiri dan dapat meningkatkan perekonomian keluarga sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari.
- b. Dengan pemberian bantuan perlengkapan sarana ibadah untuk lanjut usia terlantar dan pemberian seragam sekolah untuk anak terlantar tingkat SD dan SLTP.

- c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan sosial yang menentukan sasaran strategis tercapainya tujuan yang ingin di capai dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.
- d. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat pada kegiatan ini lebih ditujukan untuk peningkatan kompetensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang ada di Kabupaten Nagan Raya, sehingga para TKSK mampu menjalankan tugas lebih cepat dan akurat serta mengatasi permasalahan sosial di wilayahnya, Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi review TKSP, outbond TKSK dan seleksi pilar – pilar sosial untuk mengikuti kompetensi di tingkat nasional.

BAB V PENUTUP

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Aceh serta Bapak Menteri Dalam Negeri yang merupakan kewajiban kami sebagai Bupati Nagan Raya dalam melaksanakan berbagai urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan terus berupaya untuk dapat melaksanakan berbagai program kegiatan dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, disadari bahwa penyelenggaraannya masih saja belum sempurna, dimana masih terdapat tugas-tugas yang memerlukan penanganan lebih lanjut untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk itu, pada kesempatan ini kami juga mengharapkan adanya masukan dan bimbingan lebih lanjut dari Bapak Gubernur Aceh serta Bapak Menteri Dalam Negeri dalam rangka penyempurnaan tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan sehingga di masa yang akan datang dapat lebih baik lagi.

Akhirnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa kita berserah diri, semoga segala upaya dan keikhlasan kita bersama membangun Nagan Raya tercinta ini bisa mewujudkan masyarakat Nagan Raya yang Meu Agama (Islami), damai, sehat, Carong (cerdas) dan bermartabat menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri, maju dan berdaya saing. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wabillahitaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Suka Makmue, Maret 2022
BUPATI NAGAN RAYA
H.M. JAMIN IDHAM